



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN
PENDIDIKAN (KTSP) DI SDN KALIBARU 01 DAN SDN
SEMPER TIMUR 05 JAKARTA UTARA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si.)**

**LANNY ANGGRAINI
0806441390**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
JAKARTA
JUNI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ILMU ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN


LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Lanny Anggraini
NPM : 0806441390
Judul : Implementasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SDN Kalibaru 01 dan SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara

Tesis ini telah mendapatkan persetujuan dari pembimbing pada tanggal 07 Bulan Juni Tahun 2010 dan dinyatakan layak untuk diajukan ke ujian tesis.

Pembimbing

Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc



(.....) ✓

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Lanny Anggraini

NPM : 0806441390

Tanda Tangan : 

Tanggal : 23 Juni 2010

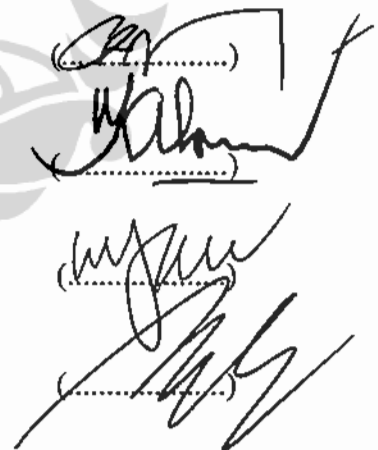
HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Lanny Anggraini
NPM : 0806441390
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SDN Kalibaru 01 dan SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Studi Ilmu Administrasi, Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Chandra Wijaya, MM, M.Si.
Pembimbing : Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc,Sc.
Penguji : Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si.
Sekretaris : Lina Miftahul Jannah, M.Si .



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 23 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulisan tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SDN Kalibaru 01 dan SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Administrasi.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik dukungan moril dan materiil, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam diucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penyelesaian tesis ini.
2. Prof. Dr. Chandra Wijaya, MM, M.si., Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si., dan Lina Miftahul Jannah, M.Si. selaku tim penguji.
3. Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
4. Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta Utara.
5. Kepala Sekolah beserta para guru SDN Kalibaru 01 dan SDN Semper Timur 05 Jakarta.
6. Suami tercinta yang selalu berdoa dan mendukung dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak, Ibu, adik-adik yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi dalam menyelesaikan kuliah dan tesis ini secepat mungkin.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga penelitian ini berguna bagi perkembangan Administrasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia, khususnya studi implementasi kebijakan pendidikan; dan dapat dijadikan masukan bagi pembaca dan pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam tentang implementasi kebijakan pendidikan.



Jakarta, 23 Juni 2010

Lanny Anggraini

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lanny Anggraini
NPM : 0806441390
Program Studi : Kekhususan Ilmu Administrasi Kebijakan Pendidikan
Departemen : Program Pasca Sarjana
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SDN Kalibaru 01 Dan SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara

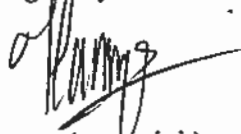
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Juni 2010

Yang menyatakan



(Lanny Anggraini)

ABSTRAK

Nama : Lanny Anggraini
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul : Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SDN Kalibaru 01 dan SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara

Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan pendidikan nasional tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SDN Kalibaru 01 dan SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kebijakan pendidikan tentang implementasi KTSP di SDN Kalibaru 01 sebagai sekolah yang berkategori standar nasional dan SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara yang berkategori sebagai sekolah reguler, serta menganalisis pengaruh kebijakan tersebut terhadap nilai UASBN siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum implementasi KTSP jika dinilai dari empat faktor Edward III telah dipenuhi oleh pemerintah kotamadya Jakarta Utara meskipun tidak cukup sempurna dan kebijakan KTSP telah dilaksanakan oleh kedua sekolah dan pengaruhnya terhadap peningkatan nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) siswa hanya mengalami peningkatan sekitar 0,15 dari 6,45 pada tahun ajaran 2007/2008 menjadi 6,60 pada tahun ajaran 2008/2009 di SDN Kalibaru 01. SDN Semper timur 05 Jakarta Utara mengalami peningkatan 0,18 dari 6,60 pada tahun ajaran 2007/2008 menjadi 6,78 pada tahun ajaran 2008/2009. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan perlu meninjau kembali implementasi kebijakan KTSP ini melalui sosialisasi secara merata dan sampai dengan tingkat sekolah. Pemerintah pusat dan daerah perlu saling berkoordinasi dalam melakukan pembekalan pengetahuan dan pemahaman terhadap pengembangan KTSP. Pemerintah pusat memberikan subsidi pembangunan sarana dan prasarana kepada sekolah-sekolah secara merata. Serta adanya pengontrolan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan KTSP di sekolah.

Kata Kunci: Sekolah Standar Nasional, Sekolah Kategori reguler, UASBN, KTSP

ABSTRACT

Name : Lanny Anggraini
Study Program : Administrative Science
Title : Implementation of Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Policy in SDN Kalibaru 01 and SDN Semper Timur 05 North Jakarta

The focus of this study is the implementation of Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Policy in SDN Kalibaru 01 and SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara. The objective of this study is to analyze KTSP implementation in SDN Kalibaru 01 as national standard school and SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara as regular school, and analyze the effect of the policy through student performance of UASBN. This research is qualitative. The result of the study shows that generally the implementation of KTSP according to Edward III theory, has been conducted by the government of Jakarta Utara eventhough it is not perfect already and the implementation of KTSP has been implemented in both schools. The influence for students' performance of UASBN only increased 0,15 from 6, 45 in 2007/2008 become 6, 60 in 2008/2009 in SDN Kalibaru 01. The students' performance of UASBN in SDN Semper Timur 05 increased 0, 18 from 6, 60 to 6, 78. The researcher suggests that central government as a policy maker should have to review the policy with the socialization to schools. Central government and local government have to coordinate to give knowledge and understanding about KTSP. Central government should give blockgrant for school infrastructures. Local government has to control the implementation of KTSP in schools directly.

Key words:

National Standard School, Reguler School, UASBN, KTSP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Signifikansi Penelitian	9
1.5 Batasan Masalah	9
1.6 Sistematika Penulisan	9
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN	11
2.1 Tinjauan Pustaka	11
2.1.1 Teori Kebijakan Publik	22
2.1.2 Proses dan Siklus Pembuatan Kebijakan Publik	28
2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik	31
2.1.3.1 Komunikasi	35
2.1.3.2 Sumber Daya	40
2.1.3.3 Sikap	43
2.1.3.4 Struktur Birokrasi	43
2.1.4 Teori tentang Kurikulum	46
2.1.5 Teori tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	50
2.1.6 Landasan Hukum KTSP	53
2.1.7 Tujuan KTSP	54
2.1.8 Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	55
2.2 Model Analisis	62
2.3 Hipotesis	62
2.4 Operasionalisasi Konsep	63
2.4.1 Definisi Konsep	63
2.4.2 Definisi Operasional	64
2.5 Metode Penelitian	66
2.5.1 Objek Penelitian	66
2.5.2 Pendekatan Penelitian	66
2.5.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	67
2.5.4 Informan Atau Narasumber	68

3. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	70
3.1 SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara	70
3.1.1 Sejarah Singkat SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara	70
3.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Sekolah	71
3.1.3 Tenaga Kependidikan	72
3.1.4 Kondisi Siswa	73
3.1.5 Kondisi Sarana dan Prasarana	75
3.1.6 Program Sekolah	77
3.1.7 Prestasi Sekolah	79
3.1.8 Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	81
3.2 SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara	82
3.2.1 Sejarah Singkat SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara	82
3.2.2 Visi, Misi dan Tujuan Sekolah	82
3.2.3 Tenaga Kependidikan	83
3.2.4 Kondisi Siswa	84
3.2.5 Kondisi Sarana dan Prasarana	86
3.2.6 Program Sekolah	88
3.2.7 Prestasi Sekolah	90
3.2.8 Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	91
4. ANALISIS HASIL PENELITIAN	93
4.1 Implementasi Kebijakan KTSP di SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara	95
4.1.1 Persiapan Implementasi KTSP	95
4.1.2 Implementasi KTSP dalam Pembelajaran	104
4.1.3 Hambatan dalam Implementasi KTSP	106
4.2 Implementasi Kebijakan KTSP di SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara	107
4.2.1 Persiapan Implementasi KTSP	107
4.2.2 Implementasi KTSP dalam Pembelajaran	113
4.2.3 Hambatan dalam Implementasi KTSP	115
4.3 Variabel Komunikasi	116
4.4 Variabel Sumber daya	120
4.5 Variabel Sikap.....	122
4.6 Variabel Struktur Birokrasi	125
4.7 Pengaruh Implementasi Kebijakan KTSP terhadap Nilai UASBN Siswa	126
4.7.1 Pengaruh Implementasi Kebijakan KTSP terhadap Nilai UASBN Siswa SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara	126
4.7.2 Pengaruh Implementasi Kebijakan KTSP terhadap Nilai UASBN Siswa SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara	128
5. KESIMPULAN DAN SARAN	131
5.1 Kesimpulan	131
5.2 Saran-Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Nilai UASBN Tahun Pelajaran 2007/2008 dan 2008/2009 untuk Wilayah Provinsi DKI Jakarta	7
Tabel 2.1	Penelitian tentang Implementasi KTSP, Implementasi Kebijakan	11
Tabel 2.2	Konsep, Variabel, dan Indikator Penelitian	64
Tabel 2.3	Jumlah Informan	69
Tabel 3.1	Daftar Nama-Nama Kepala Sekolah yang Pernah Menjabat Di SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara	71
Tabel 3.2	Data Pekerjaan Orang Tua Siswa SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara Tahun Ajaran 2008/2009	74
Tabel 3.3	Data Sarana dan Prasarana SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara ...	75
Tabel 3.4	Data Kegiatan Siswa SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara	78
Tabel 3.5	Data Prestasi SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara Tahun 2005-2009	80
Tabel 3.6	Data Pekerjaan Orang Tua Siswa SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara	85
Tabel 3.7	Data Sarana dan Prasarana SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara	86
Tabel 3.8	Data Prestasi SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara Tahun 2003-2007	91
Tabel 4.1	Status Pendidikan Informan	93
Tabel 4.2	Daftar Nilai Rata-rata Ujian Sekolah dan UASBN Tahun Ajaran 2006/2007-2008/2009 SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara	128

Tabel 4.3	Daftar Nilai Rata-rata Ujian Sekolah dan UASBN Tahun Ajaran 2006/2007-2008/2009 SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara	129
-----------	---	-----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses Kebijakan Sebagai Input dan Output	29
Gambar 2.2	Model Analisis Penelitian Implementasi Kebijakan KTSP SD di SDN Kalibaru 01 dan SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara	62
Gambar 3.1	Diagram Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara	73
Gambar 3.2	Diagram Kondisi Siswa SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara Tahun Ajaran 2008/2009	74
Gambar 3.3	Diagram Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara	84
Gambar 3.4	Diagram Kondisi Siswa SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara Tahun Ajaran 2008/2009	85
Gambar 4.1	Alur komunikasi Kebijakan KTSP	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sudah 101 tahun bangsa Indonesia memperingati hari kebangkitan nasional. Hari kebangkitan nasional ini adalah masa dimana para pejuang berusaha bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan akibat penjajahan. Pada saat itu mereka melihat bahwa jalan yang paling ampuh untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia adalah melalui pendidikan. Namun sampai saat ini pendidikan nasional masih dalam kondisi memprihatinkan dan berada pada potret yang buram. Pendidikan kita masih sangat tertinggal dari negara-negara tetangga. Rendahnya kualitas pendidikan kita dapat dilihat dari Human Development Index (HDI) Indonesia yang mana menurut laporan United Nation Development Program/UNDP HDI pada tahun 2007 dari 177 negara yang dipublikasikan, HDI Indonesia berada pada urutan ke-107 dibawah Singapura, Brunei Darrusalam, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam.

Di samping itu, sejak lama pula pendidikan nasional menerima kritikan dari berbagai kalangan, baik yang terkait dengan tingkat ketercapaian tujuan pendidikan, sarana prasarana, maupun pengelolaan pendidikan. Menurut Zuhail (2008). "masalah-masalah yang bersifat mendasar dalam dunia pendidikan adalah rendahnya mutu pendidikan, kurang relevannya program dan keluaran pendidikan dengan kebutuhan pembangunan dan industri, serta ketidakefisienan dalam pengelolaan pendidikan" (p.44).

Demikian juga berbagai lembaga menyatakan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah dan tidak memiliki daya saing. Hal ini terlihat dari berbagai indikator, seperti hasil studi *Trends in International mathematic and Science Study* (TIMSS) Tahun 2000, 2003, bahwa Indonesia dalam bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan menempati urutan 34 dan 35 dari 38 negara (*Mathematic Achievement*). Sedangkan menurut *Program for International Student Assessment* (PISA) Tahun 2000, 2003, dan 2006 bahwa kemampuan membaca, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Siswa Indonesia menempati urutan ke 39 dari 41 negara (*Science Performance*).

Berbagai permasalahan diatas, mencerminkan bahwa perkembangan Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas masih jauh dari yang diharapkan, mengingat pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka merespon tuntutan global terhadap pendidikan nasional, berbagai upaya bangsa Indonesia telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia yang bermutu. Seperti yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial” (UUD 45, 2004, p.4). Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan pendidikan telah dinyatakan pula dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 hasil amandemen ke empat, yaitu:

ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang; ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (UUD 45, 2004, p.53-54).

Implementasi dan sekaligus penjabaran dari pasal 31 UUD 1945 tersebut di atas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu komponen penting dari sistem pendidikan nasional adalah kurikulum. Kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara; khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Seperti yang Mulyasa

(2006) menyatakan bahwa: "sejak Indonesia memiliki kebebasan dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak bangsanya, sejak saat itu pula pemerintah menyusun kurikulum" (p.4).

Kurikulum sebagai alat yang sangat penting bagi perkembangan suatu bangsa. Dapat pula dipahami betapa pentingnya usaha mengembangkan kurikulum tersebut. Kurikulum juga merupakan alat yang penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Dalam sejarah pendidikan Indonesia sudah beberapa kali diadakan perubahan dan perbaikan kurikulum yang tujuannya sudah tentu untuk menyesuikannya dengan perkembangan dan kemajuan jaman. Dengan kurikulum yang sesuai dan tepat, maka dapat diharapkan sasaran dan tujuan pendidikan akan dapat tercapai secara maksimal. Hal tersebut sudah menjadi fraksis pendidikan kontemporer, yang mana perubahan-perubahan itu menggiring pada dianutnya paradigma baru, baik yang menyangkut visi maupun aksi dalam pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan.

Salah satu inovasi terbaru yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan menyempurnakan kualitas kurikulum yang lama, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengamanatkan kurikulum pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

KTSP ini juga mengacu pada Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Visi pokok dari otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan bermuara pada upaya pemberdayaan (*empowering*) terhadap masyarakat setempat untuk menyusun kurikulum sendiri, menentukan sendiri jenis dan muatan kurikulum, proses pembelajaran dan sistem penilaian hasil belajar, guru dan kepala sekolah, fasilitas dan sarana belajar untuk putra-

putri mereka. Peran pemerintah baik yang diwakili oleh Departemen Teknik maupun oleh Pemerintah Daerah (Pemda) di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi adalah memberikan dukungan baik berupa dana, fasilitas, dan *ekspertis* agar dapat terselenggaranya pelayanan pendidikan yang bermanfaat bagi pembangunan kehidupan riil di masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan mengacu pada standar mutu akademik secara nasional maupun internasional.

Pengembangan KTSP ini merupakan salah satu otonomi yang lebih besar diberikan kepada sekolah/madrasah yang mana penyusunan dan pelaksanaan KTSP ini dilakukan oleh sekolah. KTSP ini diresmikan pada tanggal 7 Juli 2006. Selain itu, KTSP juga berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) serta penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan dari kedua Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut. Panduan yang disusun BSNP terdiri dari atas dua bagian. Pertama, Panduan Umum yang memuat ketentuan umum pengembangan kurikulum yang dapat diterapkan pada satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang terdapat dalam SI dan SKL. Termasuk dalam ketentuan umum adalah penjabaran amanat dalam UU 20/2003 dan ketentuan PP 19/2005 serta prinsip dan langkah yang harus diacu dalam pengembangan KTSP. Kedua, model KTSP sebagai salah satu contoh alternatif hasil akhir pengembangan KTSP dengan mengacu pada SI dan SKL dengan berpedoman pada Panduan Umum yang dikembangkan BSNP. Sebagai model KTSP, tentu tidak dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga hanya dapat digunakan sebagai referensi dan tidak diadopsi begitu saja. Kurikulum ini

mengakomodir kepentingan daerah. Guru dan sekolah diberi otonomi untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi sekolah, permasalahan sekolah dan kebutuhan sekolah. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini di tuntut adanya kesanggupan guru untuk membuat kurikulum yang berdasarkan pada kebolehan, kemampuan dan kebutuhan sekolah.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) tahun 2006 ini memiliki komponen-komponen yang harus dikembangkan oleh satuan-satuan pendidikan. Komponen yang dimaksud mencakup visi, misi, dan tujuan tingkat satuan pendidikan; struktur dan muatan; kalender pendidikan; silabus sampai pada rencana pelaksanaan pembelajaran. KTSP juga memiliki beberapa karakteristik yang secara umum antara lain, adanya partisipasi guru; partisipasi keseluruhan atau sebagian staf sekolah; rentang aktivitasnya mencakup seleksi (pilihan dari sejumlah alternatif kurikulum), adaptasi (modifikasi kurikulum yang ada), dan kreasi (mendesain kurikulum baru); perpindahan tanggung jawab dari pemerintah pusat (bukan pemutusan tanggung jawab); proses berkelanjutan yang melibatkan masyarakat; dan ketersediaan struktur pendukung (untuk membantu guru maupun sekolah).

Pada dasarnya, tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah bagaimana membuat siswa dan guru lebih aktif dalam pembelajaran. Selain murid harus aktif dalam kegiatan belajar dan mengajar, guru juga harus aktif dalam memancing kreativitas anak didiknya sehingga dialog dua arah terjadi dengan sangat dinamis. Kelebihan lain KTSP adalah memberi alokasi waktu pada kegiatan pengembangan diri siswa. Siswa tidak melulu mengenal teori, tetapi diajak untuk terlibat dalam sebuah proses pengalaman belajar.

KTSP ini menuntut sekolah-sekolah untuk membuat kurikulum yang berbeda. Namun, dalam penyusunannya harus memperhatikan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Dalam kurikulum baru ini sekolah diberi otonomi dalam menjabarkan kurikulum, dan murid sebagai subyek dalam proses belajar mengajar. Dari situlah diharapkan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dapat memenuhi standarisasi evaluasi belajar siswa.

Saat ini sebagian besar sekolah dasar di DKI Jakarta sudah mengimplementasikan KTSP. Demikian pula sekolah-sekolah dasar yang berada di wilayah Jakarta Utara. Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta Utara seluruh sekolah dasar di wilayah Jakarta Utara telah melaksanakan KTSP yang mengacu pada Standar Isi dan Standar Kelulusan yang disusun oleh BSNP. Sekolah-sekolah dasar tersebut telah melakukan pengembangan KTSP yang meliputi: penyusunan dokumen, pelaksanaan dokumen, dan evaluasi dokumen.

Namun demikian kebijakan KTSP ini setelah tiga tahun berjalan pada kenyataannya sebagai konsep baru dalam meningkatkan mutu kurikulum, belum memberikan pengaruh yang berarti terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sepertinya masih banyak guru yang tidak tahu bagaimana menyusun kurikulum model tersebut. Menurut potret nilai UASBN SD di Jakarta Utara pada tahun ajaran 2007/2008-2008/2009, bahwa wilayah Jakarta Utara menempati posisi terendah dibandingkan wilayah Jakarta lainnya (lihat tabel 1.1). Meskipun nilai UASBN tersebut bukan satu-satunya indikator mutu pendidikan, namun untuk mengukur hasil prestasi belajar peserta didik sebagai salah satu indikator mutu pendidikan dapat diketahui dari nilai UASBN tersebut. Yang mana pelaksanaan UASBN ini diujikan 3 mata pelajaran secara nasional meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 39 tahun 2007 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional, dijelaskan pada pasal 2 (dua) bahwa UASBN tersebut ditujukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam; dan mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu. Pada pasal 3 (tiga) dijelaskan bahwa hasil UASBN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu satuan pendidikan; dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Tabel 1.1
Daftar Nilai UASBN Tahun Pelajaran 2007/2008 dan 2008/2009 untuk Wilayah
Provinsi DKI Jakarta

No	Kotamadya/ Kab.	2007/2008			Jml	Rank	2008/2009			Jml	Rank
		Mata Ujian					Mata Ujian				
		BI	Mat	IPA			BI	Mat	IPA		
1	Jakarta Pusat	7,49	5,76	6,27	19,52	ke-4	7,17	6,15	6,41	19,73	ke-3
2	Jakarta Utara	7,55	5,56	5,64	18,75	ke-6	7,06	6,02	6,45	19,53	ke-6
3	Jakarta Barat	7,63	5,80	6,44	19,87	ke-3	7,24	6,07	6,35	19,66	ke-4
4	Jakarta Selatan	7,85	6,10	6,09	20,04	ke-2	7,49	6,60	7,00	21,09	ke-1
5	Jakarta Timur	7,84	6,29	6,76	20,89	ke-1	7,54	6,65	6,83	21,02	ke-2
6	Kep. Seribu	7,26	6,07	6,16	19,49	ke-5	6,72	6,28	6,61	19,61	ke-5

Sumber: Data olahan dari Laporan UASBN SD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2009

Berdasarkan hasil dari potret UASBN tersebut, dapat dilihat bahwa Kebijakan KTSP ini tidaklah mudah diterapkan khususnya di wilayah Jakarta Utara. Berbagai persoalan masih banyak ditemukan yang sampai saat ini belum teratasi. Berdasarkan pengamatan peneliti, pelaksanaan KTSP SD di kotamadya Jakarta Utara ditemui permasalahan seperti manajemen sekolah, kondisi psikologis sosial, sarana-prasarana sampai pada persoalan praktis oleh guru di lapangan. Terlebih lagi dengan diberlakukannya kurikulum baru ini, guru dan sekolah semakin bertambah bingung tentang apa harus dikerjakan dengan kurikulum yang ada. Berbagai kasus menunjukkan kurangnya pemahaman para penyelenggara, dan para pelaksana termasuk guru dan kepala sekolah terhadap kurikulum, bahkan tidak sedikit guru dan instruktur yang tidak tahu kurikulum. Kendala yang dihadapi sekolah dalam menyusun KTSP maupun melaksanakan KTSP antara lain seperti pada faktor komunikasi bahwa dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan tentang KTSP baik secara langsung maupun tidak langsung oleh instansi yang terkait kepada para pelaksana dalam bentuk sosialisasi maupun pembinaan masih belum merata, hal ini dapat dilihat masih banyaknya guru maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang belum mendapatkan sosialisasi maupun pembinaan KTSP, sehingga mereka belum

memahami bagaimana melaksanakan kebijakan KTSP. Pada faktor sumber dayapun ditemukan permasalahan seperti kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan sekolah. Sebagian besar guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan kurikulum itu (KTSP), baik di atas kertas maupun di depan kelas. Bahkan banyak kasus ditemukan kurikulum sekolah dibuat dengan meniru/atau mengkopi dari sekolah lain yang notabene memiliki karakteristik dan potensi sekolah yang berbeda-beda. Selain itu juga masih kuatnya pengaruh kurikulum lama yang terlanjur mengekang kreativitas guru. Kurangnya fasilitas yang mendukung keterlaksanaan KTSP maupun dana pendukung. Belum meratanya pengawasan terhadap implementasi kebijakan KTSP ini oleh dinas pendidikan provinsi maupun kotamadya secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan kondisi yang terjadi di Jakarta Utara, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan KTSP sekolah dasar di 2 (dua) sekolah di Jakarta Utara yaitu SDN Kalibaru 01 dan SDN Semper Timur 05 dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edwards III, serta menganalisa bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap prestasi belajar anak.

1.2 Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan dari latar belakang diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan tentang KTSP pada SDN Kali Baru 01 dan SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan tersebut terhadap nilai UASBN siswa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis kebijakan pendidikan tentang pelaksanaan KTSP di SDN Kalibaru 01 dan SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara.
2. Menganalisis pengaruh kebijakan tersebut terhadap UASBN siswa.

1.4 Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana studi kebijakan publik, khususnya tentang implementasi kebijakan dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) serta memberikan rekomendasi bagi penelitian lain yang tertarik untuk meneliti hal yang sejenis. Sedangkan manfaat praktis adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi Pusat Kurikulum dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam memberikan manfaat umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan kurikulum.

1.5 Batasan Masalah

Mengingat pelaksanaan KTSP ini mencakup semua kelas baik dari kelas I sampai dengan kelas 6 SD serta mencakup semua mata pelajaran, maka penelitian ini memiliki keterbatasan yang hanya mencakup pada kelas 6 dan dampak dari kebijakan KTSP ini hanya dilihat dari nilai UASBN siswa kelas VI.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing berisi sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan dijelaskan tentang teori-teori yang digunakan untuk mewakili hal-hal yang diteliti seperti teori kebijakan publik, proses dan siklus pembuatan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, teori tentang kurikulum, teori tentang KTSP, implementasi KTSP, model analisis yang digunakan dan hipotesis, serta operasionalisasi

konsep. Pada bagian Metode Penelitian dijelaskan tentang objek penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, serta informan data atau nara sumber

BAB 3 : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab 3 ini menguraikan karakteristik dari objek penelitian yang terkait dengan penelitian dan dilengkapi data statistik.

BAB 4 : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bagian bab 4 ini menjelaskan tentang hasil temuan lapangan yang dikaitkan dengan konsep dan teori yang digunakan yaitu antara teori implementasi kebijakan publik model Edwards III dengan praktek implementasi KTSP di SDN Kalibaru 01 dan SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian bab 5 ini menyajikan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan, serta saran yang dapat diberikan.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

2.1. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengimplementasian KTSP, selain itu juga penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Beberapa penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian tentang Implementasi KTSP, Implementasi Kebijakan

Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian
<i>Kesiapan Sekolah dalam Melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP, Studi Kasus SDN Dukuhan, Kerten, Surakarta Tahun ajaran 2006/2007)</i>	Nurani Daruretno (FAI UMS, 2007)	Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan KTSP di SDN Dukuhan meliputi kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, siswa, keuangan dan pembiayaan, sarana dan prasarana, <i>stakeholder</i> dan layanan khusus. Kesiapan SDN Dukuhan dalam melaksanakan kurikulum dan program pengajaran terlaksana dengan baik. Siswa, keuangan dan pembiayaan dibantu oleh Badan Operasional Sekolah (BOS), <i>stakeholder</i> dan layanan khusus berjalan sesuai rencana. -Ketidaksiapan SDN Dukuhan dalam pelaksanaan KTSP

		disebabkan karena tenaga kependidikan masih kurang memahami pelaksanaan KTSP, dan sebaiknya diadakan pengarahan mengenai KTSP. Sarana dan prasarana kurang memadai dan rusak.
<i>Perencanaan Pembelajaran Matematika KTSP SMA Muhammadiyah Surakarta (Studi Multi Kasus di SMA Muhammadiyah 1, 2, dan 3 Surakarta)</i>	Krisdiana Hidayati (UMS, 2008)	Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa langkah-langkah perencanaan pembelajaran di ketiga tempat sudah memenuhi prosedur. Faktor pendukung perencanaan matematika di ketiga tempat adalah karakteristik guru matematika dan MGMP. Sedangkan kendala perencanaan pembelajaran yaitu keadaan perpustakaan yang kurang memadai.
<i>Profil Pelaksanaan KTSP di Provinsi Jambi (Studi Evaluatif Pelaksanaan KTSP SD, SMP, SMA)</i>	Sutrisno (Universitas Jambi Kampus Pinang Masak, 2008)	Berdasarkan temuan yang diperoleh dari pengamatan empirik tersebut dapat dikemukakan beberapa kesimpulan berikut ini: a. Pada semua jenjang bahwa (SD, SMP dan SMA) elemen-elemen KTSP belum terimplementasi dengan baik yakni (a) penyusunan pengembangan KTSP, (b)

		<p>pengembangan silabus, (c) pengembangan diri, (d) pembelajaran terpadu, (e) pengembangan muatan lokal, (f) penyusunan rancangan penilaian hasil belajar, (g) penyusunan laporan peserta didik.</p> <p>b. Proses belajar mengajar yang berlangsung dengan menggunakan KTSP di provinsi Jambi dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pedagogi modern dan yang mengutamakan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang tepat. Hal ini dapat diindikasikan dari (1) kelengkapan persiapan mengajar guru (Satuan Acara Pelajaran/skenario pembelajaran), bahan ajar (Lembar Kegiatan Siswa), serta media yang digunakan guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran; (2) kesesuaian pembelajaran dengan skenario pembelajaran dan bervariasinya metode pembelajaran yang digunakan</p>
--	--	---

		oleh guru; dan (3) ketepatan dalam pemberian tugas, pemanfaatan sumber belajar, dan penggunaan perangkat evaluasi yang tepat untuk mendapatkan umpan balik dari siswa. Namun, dari perspektif kualitas masih dibutuhkan pembimbingan.
<i>Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pada Pembelajaran IPS Sejarah di SMPN 21 Semarang Tahun Ajaran 2006/2007</i>	Basuki Dwi Sulistyono (Universitas Negeri Semarang, 2007)	<p>Penelitian tersebut menyimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman guru-guru IPS Sejarah di SMP N 21 Semarang mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagian besar masih terbatas hanya mengetahui secara garis besarnya. Guru hanya mampu memahami konsep dasar KTSP secara singkat seperti pengertian KTSP, SKL, SI, RPP serta perbedaan yang mendasar antara KTSP dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. 2. Proses Pembelajaran <ol style="list-style-type: none"> a. Persiapan pelaksanaan pembelajaran, Pengembangan program yang disusun oleh guru IPS Sejarah di SMP Negeri 21

		<p>Semarang telah sesuai dengan acuan dalam KTSP. Dalam pengembangan silabus, guru IPS Sejarah di SMP Negeri 21 Semarang masih mengadopsi model silabus dari Depdiknas.</p> <p>selanjutnya model silabus tersebut ditelaah dan disesuaikan dengan kondisi sekolah.</p> <p>b. Pelaksanaan Pembelajaran</p> <p>Pada awal pembelajaran guru melakukan apersepsi, namun tidak pernah melakukan pre-test, guru telah mengurangi metode ceramah dan keaktifan siswa sangat diprioritaskan. Guru IPS Sejarah SMP N 21 123 Semarang dalam pembelajaran telah menerapkan berbagai metode, sumber belajar, serta media yang variatif.</p> <p>c. Evaluasi hasil belajar,</p> <p>Guru melakukan Penilaian Berbasis Kelas (PBK) untuk memperoleh penilaian dari aspek</p>
--	--	--

		<p>penguasaan konsep dan aspek penerapan konsep. Guru menerapkan pendekatan pembelajaran tuntas dengan mengadakan program remidi dan program pengayaan.</p> <p>3. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi KTSP di SMP Negeri 21 Semarang</p> <p>a. Faktor pendukung antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Sarana prasarana pembelajaran di SMP Negeri 21 Semarang secara kuantitas maupun kualitas sudah cukup memadai.2) Adanya program-program sekolah dalam rangka implementasi KTSP antara lain : sosialisasi mengenai konsep-konsep dasar KTSP, Pembentukan kepanitiaan KTSP, Adanya tim pengembang dan penyusun KTSP,
--	--	---

		<p>Setiap satu bulan sekali dilakukan evaluasi yang dikemas dalam <i>briefing</i> atau rapat dinas sekolah.</p> <p>3) Adanya sistem penilaian kinerja terhadap guru dan siswa dengan menerapkan <i>reward</i> (penghargaan) serta <i>punishment</i> (hukuman).</p> <p>b. Faktor penghambat dalam implementasi KTSP di SMP N 21 Semarang antara lain : Lemahnya kemampuan guru dalam melakukan penilaian secara mandiri atau berkelanjutan, terbatasnya (dana, waktu, serta tenaga) dalam penggunaan metode pembelajaran, terjadinya integrasi (penggabungan) pada mata pelajaran ilmu-ilmu sosial menjadi IPS terpadu, kurangnya kesiapan siswa untuk belajar mandiri.</p>
<p><i>Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lebak Lebung Sungai dan</i></p>	<p>Katriza Imania (Universitas Indonesia, 2008)</p>	<p>Penelitian tersebut menyimpulkan sebagai berikut:</p> <p>a. Ada hubungan antara</p>

<p><i>Sumber Daya Perikanan (Studi Analisis di Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan</i></p>		<p>standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas implementasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta disposisi pelaksana dengan implementasi kebijakan. Komitmen para pelaksana (disposisi pelaksana) mempengaruhi implementasi kebijakan. Ketidakjelasan standar dan tujuan, ketiadaan dukungan sumberdaya kebijakan, komunikasi antar organisasi yang tidak baik, karakteristik badan pelaksana yang tidak mendukung (tidak ada dukungan struktur organisasi dalam implementasi kebijakan dan tidak ada SOP dapat mempengaruhi komitmen para pelaksana dalam implementasi kebijakan.</p>
--	--	--

		<p>Aspek di luar organisasi seperti ketiadaan dukungan ekonomi dan partisipasi masyarakat serta aktivitas partai politik turut mempengaruhi implementasi kebijakan.</p> <p>b. Keluaran kebijakan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Pemberian layanan yang tidak baik mengurangi kinerja pencapaian tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan Pengelolaan Lebak Lebung Sungai dan Sumberdaya Perikanan belum memberikan dampak yang diharapkan oleh para nelayan.</p>
<p><i>Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemunjukkan Pihak Ketiga Dalam Urusan Pelayanan Kemetrolagian (Studi Kasus: Peneraan Meter kWh)</i></p>	<p>Usman (Universitas Indonesia, 2005)</p>	<p>Dari hasil penelitian studi kasus ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:</p> <p>1. Komunikasi yang terjalin antara Direktorat Metrologi dengan unit metrologi daerah dan perusahaan pihak ketiga tergolong cukup baik. Hambatan dalam komunikasi antara</p>

		<p>Direktorat Metrologi, Unit Metrologi Daerah, dan perusahaan Pihak ketiga disebabkan oleh terbentuknya hierarki birokrasi baru karena adanya paradigma otonomi daerah.</p> <p>2. Dukungan sumber daya dalam rangka pelaksanaan peneraan meter kWh oleh Perusahaan Pihak Ketiga tergolong cukup baik. Disatu sisi dengan adanya Perusahaan pihak Ketiga, Pemerintah terbantu dalam pengadaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk melakukan pengujian meter kWh. Namun disisi lain legalitas adanya perusahaan pihak ketiga tersebut masih dipertanyakan, karena sisten akreditasi laboratorium yang telah disepakati belum berjalan secara optimal.</p> <p>3. Dukungan sikap para pelaksana kebijakan terhadap efektifitas pelaksanaan peneraan meter kWh oleh Perusahaan Pihak</p>
--	--	---

		<p>Ketiga tergolong baik. Disatu sisi kegiatan pengujian meter kWh di Perusahaan Pihak Ketiga dilaksanakan secara lebih profesional dan lebih netral, namun disisi lain ada persepsi bahwa biaya peneraan menjadi lebih mahal.</p> <p>4. Dukungan struktur birokrasi yang ada pada saat ini terhadap efektifitas pelaksanaan peneraan meter kWh oleh perusahaan pihak ketiga tergolong cukup baik. Struktur birokrasi yang terbentuk pasca otonomi daerah menyebabkan kegiatan kordinasi antara pusat dan daerah dalam peneraan meter kWh di Perusahaan Pihak Ketiga menjadi agak terhambat.</p> <p>5. Secara umum komunikasi yang terjalin, sumber daya yang tersedia, sikap para pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi yang ada pada saat ini tergolong cukup baik dalam mendukung pelaksanaan</p>
--	--	--

		<p>peneraan meter kWh oleh Perusahaan Pihak Ketiga.</p> <p>6. Secara umum sikap para pelaksana kebijakan hubungannya sikap atas kesesuaian antara partisipasi pihak ketiga dalam proses peneraan meter kWh dengan peraturan perundang-undangan yang ada tergolong cukup baik.</p>
--	--	---

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, meskipun dengan topik yang sama yaitu terkait tentang implementasi KTSP, namun pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Edwards III (1980) dengan pendekatan kualitatif.

2.1.1 Teori Kebijakan Publik

Dalam kehidupan kita sehari-hari baik di lingkungan akademis, pemerintahan maupun lingkungan politik kita sering mendengar istilah kebijakan publik (*public policy*). Yang mana dalam lingkungan akademis, kebijakan publik telah menjadi salah satu aspek penting untuk dijadikan fokus kajian. Ada berbagai buku yang telah diterbitkan yang membahas tentang teori kebijakan publik dengan penekanan yang bermacam-macam dari para pakar. Umumnya para pakar lebih dulu mendeskripsikan pengertian kebijakan (*policy*). Seperti Lasswell mengidentifikasi ruang lingkup kebijakan (*scope of policy*) dengan sekumpulan pilihan (*set of choices*). Lasswell mengatakan "kebijakan merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan pilihan paling penting yang dibuat baik oleh organisasi maupun dalam kehidupan sehari-hari" (Lane, 1995:291). Berdasarkan definisi tersebut subjek atau aktor pembuat kebijakan

sangatlah luas, tidak terbatas pada organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah tetapi juga dapat di buat oleh perorangan.

Begitupun Anderson (1979) mendefinisikan “kebijakan adalah suatu rangkaian kegiatan dan maksud tertentu yang diikuti oleh seorang atau seperangkat pemeran (aktor) dalam mengatasi satu masalah mengenai satu hal “ (p.3). Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mendefinisikan bahwa “kebijakan adalah “ keputusan tetap” yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut “(Jones, 1996:47). Definisi dari Eulau dan Prewitt ini menimbulkan permasalahan atau pertanyaan untuk menilai berapa lama sebuah keputusan dapat bertahan atau hal apakah yang membentuk konsistensi dan pengulangan tingkah laku yang dimaksud serta siapa yang sebenarnya menentukan jumlah pembuat kebijakan dan pematuh kebijakan tersebut. Tetapi walau demikian, definisi ini telah memperkenalkan beberapa komponen kebijakan publik.

Dengan demikian ada dua buah penggunaan yang luas dari istilah kebijakan ini; yang pertama sebagai pengganti kata atau ungkapan pendek (*shorthand*) dimana pengertian umum sering diasumsikan, dan yang kedua adalah sebagai seperangkat ciri-ciri yang dikhususkan dan diidentifikasi melalui riset. Yang kedua ini jelas lebih dapat dipakai untuk keperluan kita. Kegunaannya adalah untuk mendorong studi kita tentang kebijakan publik dan juga tentang bagaimana kebijakan tersebut dibuat. Kita tidak bermaksud mengadakan riset untuk mempertanyakan kebijakan seperti yang dikemukakan di atas tetapi untuk lebih melengkapi pengertian dasar mengenai “ konsistensi dan pengulangan tingkah laku” yang dikaitkan dengan usaha di dalam atau melalui pemerintahan untuk mencapai masalah-masalah publik .

Wahab (2001) menyatakan bahwa “kebijakan merupakan tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu”(p.3). Friedrich mengemukakan bahwa “kebijakan merupakan suatu tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan

sasaran yang diinginkan” (dalam Wahab, 2001:3). Sama halnya dengan pendapat-pendapat diatas, Hoogerwerf (1987) berpendapat “Kebijakan dapat dirumuskan dengan alasan yang baik sebagai usaha mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu, kebijakan adalah upaya untuk memecahkan atau mengurangi atau mencegah suatu masalah tertentu yaitu dengan tindakan terarah”(p.31).

Isworo (1996) menyebutkan bahwa “kebijakan adalah hasil dari suatu keputusan setelah melalui pemilihan alternatif yang tersedia dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif” (p.229-230). Budiharjo (1992) mendefinisikan kebijakan adalah “suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku dan atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara mencapai tujuan-tujuan itu”(p.12).

Hoogerwerf (1983) menggambarkan kebijakan sebagai “usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu”(p.3-4). PBB (1975) mengartikan “kebijakan sebagai suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu atau suatu rencana”. Secara sederhana, Mustofadijaya (1992) merumuskan batasan kebijakan sebagai berikut:

Keputusan suatu organisasi (publik atau bisnis) yang bertujuan mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman berperilaku dalam (a) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijaksanaan, dan (b) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijaksanaan yang telah ditetapkan, baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan (p.16-17).

Pendapat-pendapat tersebut diatas menilai bahwa kebijakan sebagai upaya/usaha untuk memecahkan suatu permasalahan. Masalah-masalah yang dimaksud tergantung dari ukuran-ukuran yang kita pakai dan gambaran-gambaran yang kita lihat dari keadaan yang sedang berlangsung. Pengertian selanjutnya dikemukakan oleh A. Raksatya (1986), bahwa:

Kebijaksanaan sebagai taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 (tiga) elemen yaitu:

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3. Penyediaan berbagai input yang memungkinkan pelaksanaan secara nyata. Dari taktik dan strategi, (Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara (P.17).

Pengertian ini melihat kebijakan sebagai taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan penyediaan input untuk melaksanakan taktik atau strategi. Pengertian-pengertian diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan sebagai suatu usaha yang merupakan taktik atau strategi yang mempunyai tujuan tertentu. Untuk pencapaian tujuan tersebut diperlukan input yang berupa sarana-sarana tertentu yang telah dipilih dan dilakukan pada waktu tertentu. Dalam konteks kebijakan publik (*public policy*), Islami (1988) menyatakan bahwa "kebijakan itu mencakup aturan-aturan dan tidak dapat dipisahkan dengan politik, karena pada hakekatnya proses pembuatan kebijakan itu tiada lain adalah merupakan proses politik"(p.3). Seperti yang didefinisikan Jenkins bahwa *Public Policy* sebagai: "*a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selections of goals and the means of achieving the within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve*" (dalam Wahab, 2001:4).

Definisi di atas, didasarkan kepada suatu hakikat bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan politik untuk mencapai tujuan-tujuan publik, di mana pemerintah (sebagai aktor politik) bisa memilih alternatif kebijakan dalam suatu situasi/kondisi dengan menggunakan kekuasaannya. Secara umum pengertian kebijakan publik dikemukakan oleh Anderson (1978), yakni "*Public policies are those developed by governmental bodies and officials*"(p.3). atau kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Dunn (1994), ia mendefinisikan bahwa kebijakan publik

adalah “*a complex pattern of interdependent collective choice, including decisions not act. made by governmental bodies and official*”(p.1). Pengertian Dunn dapat dipahami bahwa kebijakan publik mengedepankan berbagai hal dengan berdasarkan pola-pola yang bersifat kolektif, kompleks, dan saling ketergantungan, dilakukan tidak hanya oleh pejabat pemerintah, melainkan juga oleh lembaga pemerintah secara keseluruhan.

Sedangkan Dye (1972) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do*” (p.1), atau dalam pengertian lain, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Demikian juga Islamy (1997) yang menyatakan bahwa “kebijaksanaan negara (*Public Policy*) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat” (p.20-21). Chief J.O Udoji dalam mengidentifikasi bahwa “kebijaksanaan negara sebagai suatu tindakan yang bersanksi mengarahkan pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau pada suatu kelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat” (Wahab, 1991:15).

Edwards III dan Sharkansky secara silogistis, kebijakan publik dikatakan sebagai sasaran atau tujuan program-program pemerintah (*public policy is what government say and do, or do not do. It is the goals or purpose of government programs*) (dalam Islamy, 2002:18). Santoso (1988) juga mengemukakan kebijakan publik sebagai “serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk satu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah” (p.5).

Laswell dan Kaplan memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai “sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah (*a projected program of goal, value and practise*)” (Iskandar, 2001:63). Secara umum, karena berkaitan dengan tujuan publik, kebijakan publik ditetapkan secara jelas dalam bentuk ketentuan-ketentuan dalam hirarki perundang-undangan atau dalam bentuk apapun program-program dan tindakan-

tindakan yang dilakukan pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan/ perundang-undangan dengan demikian mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengikat objek maupun subjeknya. Jika tindakan tersebut dilakukan pemerintah (pejabat dan/atau badan pemerintah maka disebut kebijakan pemerintah/*public policy*). Selanjutnya Isworo (1996) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: "(1) identifikasi masalah yang akan mengarah kepada permintaan untuk mengatasi masalah tersebut, (2) formulasi kebijakan berupa langkah yang dilakukan setelah memilih alternatif, (3) legitimasi dari kebijakan, (4) implementasi, (5) evaluasi melalui berbagai sumber untuk melihat sejauh mana usaha pencapaian tujuan"(p.229-230).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, kebijakan publik selalu dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah, sehingga Thola (1992) mengemukakan bahwa "kebijakan publik tidak bisa dipisahkan dengan birokrasi" (p.64). Dan juga menurut Islamy (1997) bahwa kebijakan publik mempunyai implikasi sebagai berikut:

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan publik senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.
3. Kebijakan publik berupa penetapan tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
4. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud lakukan.
5. Kebijakan publik bersifat positif, dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan untuk tidak melakukan sesuatu.
6. Kebijakan publik yang positif didasarkan pada ketentuan/perundangan dan bersifat memaksa (p.20).

Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja (1996) mengemukakan langkah-langkah pokok dalam melakukan analisa kebijakan dapat disederhanakan sebagai berikut:

1. Pengkajian persoalan
2. Penentuan tujuan
3. Perumusan alternatif
4. Penyusunan model
5. Penentuan kriteria
6. Penilaian alternatif
7. Perumusan rekomendasi (p.100-103)

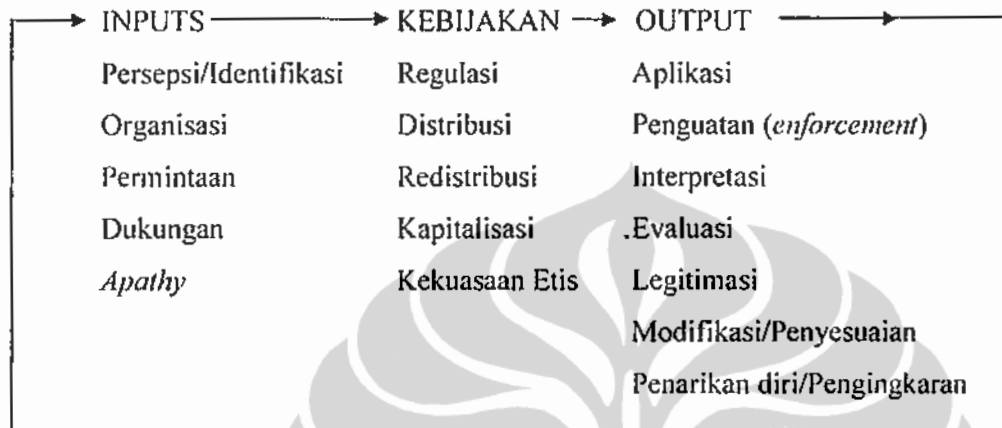
Dengan demikian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau yang tidak dilakukan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kepentingan publik, yang pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh jajaran birokrasi pemerintahan yang tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

2.1.2 Proses dan Siklus Pembuatan Kebijakan Publik

Suatu proses kebijakan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berhubungan. Ada beberapa pendekatan yang menjelaskan konteks politik dari proses pembuatan kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh Almond (1993) bahwa "model sistem politik sebagai model yang terdiri dari input (artikulasi kepentingan), fungsi proses (agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan keputusan kebijakan), dan fungsi kebijakan (*extration*, regulasi, dan distribusi)" (dalam Parsons, 1997:26). Output kebijakan dikembalikan ke dalam sistem politik, yang berada di lingkungan domestik dan internasional. Versi (1993) ini berusaha lebih banyak menjelaskan peran institusi ketimbang di masa lalu, masa ketika ilmuwan politik cenderung mengabaikan fakta bahwa institusi, aturan dan konstitusi adalah sesuatu yang benar-benar penting. Berdasarkan pendekatan *Stagist* yang berasal dari Lasswell, Simon dan Easton, memandang proses pembuatan kebijakan sebagai proses yang terdiri dari serangkaian tahapan atau urutan-urutan. Pendekatan ini menganalisis kebijakan dari sudut pandang proses yang dimulai dengan "*agenda setting*" dan diakhiri

dengan evaluasi dan terminasi kebijakan seperti yang diilustrasikan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Proses Kebijakan sebagai Input dan Output



Sumber : Frohock (1979); Jones (1970)

Sedangkan menurut Dye yang dikutip Widodo (2007, 16-17) proses kebijakan meliputi beberapa hal, yaitu: (1) Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*), dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan atas tindakan pemerintah; (2) Penyusunan agenda (*agenda setting*), merupakan aktifitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan apa yang diputuskan terhadap masalah publik tertentu; (3) Perumusan kebijakan merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif; (4) Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*), melalui tindakan politik oleh partai, kelompok penekan, dan presiden; (5) Implementasi Kebijakan (*policy implementation*) dilakukan melalui anggaran publik dan kegiatan pemerintah, dan (6) Evaluasi kebijakan (*policy implementation*), dilakukan oleh pemerintah sendiri, lembaga *independent*, pers dan masyarakat. Demikian juga dengan Cochran dan Malone (1999:39) yang menyatakan bahwa proses pembuatan

kebijakan publik terbagi ke dalam lima tahapan, yaitu identifikasi masalah dan *agenda setting*, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi dan evaluasi.

Proses yang menggambarkan keseluruhan proses pengambilan kebijakan dikemukakan oleh Gerston (1992) bahwa "proses penentuan suatu kebijakan mencakup lima tahapan, yaitu: (1) mengidentifikasi isu-isu kebijakan publik, (2) mengembangkan proposal kebijakan publik, (3) melakukan advokasi kebijakan publik, (4) melaksanakan kebijakan publik, dan (5) melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dilaksanakan" (p.5).

Sementara Dunn (1994) mengungkapkan lima tahapan baku dalam keseluruhan proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Proses ini dimulai dari kegiatan (1) mengidentifikasi dan menemukan masalah publik (*public issues*), (2) memformulasikan berbagai alternative kebijakan (*policy formulation*) yang rasional, (3) memutuskan kebijakan (*policy adoption*), (4) melaksanakan kebijakan (*policy implementation*) yang telah dipilih dan (5) mengukur dan menilai hasil kebijakan (*policy assessment*) yang telah dilaksanakan. Proses ini tidak hanya bersifat bertahap (*sequential*) tetapi juga bersifat siklus (*cycle*) yang akan selalu berulang untuk memperbaiki titik-titik kelemahan sebuah kebijakan.

Beberapa pakar kebijakan publik menyederhanakan proses kebijakan publik menjadi tiga tahapan. Seperti yang diungkapkan oleh Mustopadidjaja (2002) dari sudut manajemen proses pembuatan kebijakan dapat dipandang melalui kegiatan yang meliputi paling tidak tiga kelompok kegiatan utama, antara lain: (1) formulasi kebijakan, (2) pelaksanaan kebijakan, dan (3) evaluasi kebijakan.

Bromley (1989) menyatakan bahwa susunan hirarki proses pembuatan kebijakan terdiri dari tiga tingkatan, mulai dari tingkatan teratas sampai dengan tingkatan terendah berturut-turut adalah *policy level*, *organization level*, dan *operational level*. *Policy level* merupakan tingkatan kebijakan yang paling atas dalam suatu hirarki ketatanegaraan, karena untuk menetapkan suatu *policy level* pihak eksekutif harus mendapatkan persetujuan dari pihak legislatif. Sebagai contoh, diberlakukannya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, harus mendapatkan pengesahan dari pihak legislatif. Hirarki keluarnya kebijakan

tersebut dalam teori Blomley digambarkan dalam suatu rangkaian proses yang dapat keluar dari *policy level* maupun *organizational level* yang akan berinteraksi dalam *pattern of interaction* untuk menghasilkan beberapa *outcomes*.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan akan dapat memodifikasi *institutional arrangement* yang telah ada atau sebaliknya akan terjadi konflik kepentingan antara beberapa pihak yang berkaitan, maka pemerintah dapat melakukan campur tangan dengan mengeluarkan *institutional arrangement* baru. Setelah keluarnya *institutional arrangement* tersebut akan menghasilkan suatu *pattern of interaction*. Hal ini tentu saja merupakan hal yang wajar terjadi karena adanya penyesuaian-penyesuaian antara kepentingan-kepentingan yang terlibat. Akibatnya akan muncul *outcomes* lain yang akan disusul dengan adanya *institutional arrangement* baru lagi.

2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan hal yang krusial bagi pengkajian administrasi publik dan kebijakan publik. Kebijakan publik yang telah direkomendasikan oleh para pembuat keputusan tidak menjamin bahwa kebijakan tersebut berhasil dalam pelaksanaannya. Implementasi kebijakan melibatkan usaha-usaha dari para pembuat keputusan dalam memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Implementasi kebijakan sederhana melibatkan satu institusi sebagai pelaksana (*implementor*). Sedangkan implementasi kebijakan makro melibatkan berbagai institusi seperti birokrasi dinas kabupaten, dinas kecamatan atau pemerintah desa.

Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalan pun masih bisa terjadi, jika proses implementasi tidak tepat. Namun bahkan sebuah kebijakan yang brilliant sekalipun jika diimplementasikan buruk bisa gagal untuk mencapai tujuan para perancangannya. Dengan demikian jika menghendaki tujuan kebijakan

dapat dicapai dengan baik, maka tidak hanya pada tahap implementasi yang harus disiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan harus diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. Proses implementasi yang kompleks tidak hanya ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai variabel baik variabel individu maupun variabel organisasional dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

Meter dan Horn (1978) menyatakan bahwa "implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan" (p.45). Sedangkan Mazmanian dan Sabatier (1983) menyatakan bahwa implementasi adalah "*to understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those even and activities that occur after the issuing of authoritative public policy directives, which included both the effort to administer and the substantive impact on people and event*" (p.4). Maksud dari pernyataan diatas bahwa implementasi dalam kebijakan publik merupakan salah satu tahapan atau komponen dari proses kebijakan publik (*public policy process*) yang sangat penting. Demikian pula, hal penting dalam implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu kebijakan dirumuskan dan dinyatakan berlaku.

Demikian pula menurut Sebagaimana diungkapkan oleh duet Donald S. Van Mater dan Carl E. Van Horn dalam Widodo (2007:86) batasan implementasi sebagai: "*Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This include both one time efforts to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small.P.//;L'l changes mandated by policy decisions*". Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada saat tindakan-tindakan ini berusaha mentransformasikan

keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Menurut Gerston (1992) implementasi merupakan "*administrative task of transferring policy commitment into practice*" (p.109). Sebagai bagian dari proses kebijakan pembuatan kebijakan publik, implementasi merupakan cara atau bentuk pengubahan dari keputusan ke dalam aplikasi. Dengan kata lain, implementasi merupakan upaya untuk melaksanakan yang seharusnya apa yang telah diputuskan oleh pengambil kebijakan. Dari sisi ilmu politik, lebih jauh lagi Grindle (1990) mengemukakan bahwa "implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih jauh dari itu, implementasi kebijakan menyangkut masalah politik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan"(p.82).

Sementara menurut Pressman dan Wildavsky (1984) menyatakan:

"When objectives are not realized one explanation is the assertion of faulty implementation. The activities that were supposed to be carried out were not executed or were subject to inordinate delays. Another appropriate explanation may be that aspirations were set too high. Instead of asking why the process of implementation was faulty, we ask why too much was expected of it. Studying the process of implementation therefore, includes the setting of goals (policy, according to its earlier meaning) toward which implementation is directed"(xxiv-xxv).

Dengan demikian, implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah tindakan (*action*) agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah, yaitu mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Riant Nugroho, 2004:158). Implementasi kebijakan yang efektif dapat dipahami dan dianalisa dengan berbagai model implementasi kebijakan. Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi kebijakan seperti model implementasi kebijakan publik Mazmanian dan Sabatier (1983), Grindle (1980), Edwards III

(1980), Van Meter dan Van Horn (1975) dan sebagainya. Masing-masing model implementasi kebijakan tersebut, ada yang relatif abstrak dan ada juga yang relatif operasional. Penggunaan suatu model tertentu didasarkan pada keperluan analisis semata, tergantung pada kompleksitas permasalahan kebijakan yang dikaji dan tujuan dari analisis itu sendiri. Teori model implementasi kebijakan publik yang relatif operasional diperlukan untuk mengkaji permasalahan yang semakin kompleks dan analisis kebijakan yang semakin mendalam. Teori model ini mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis.

Penelitian ini merujuk pada model implementasi Edwards III. Menurut Edwards III (1980) keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor yang krusial antara lain: 1) Komunikasi (*communication*), 2) Sumber daya (*resources*), 3) Disposisi (*Disposition*), yaitu kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementor*) untuk melaksanakan kebijakan dan 4) Struktur Birokrasi (*Bureauratic Structure*). Keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Model implementasi ini tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat, tetapi menjelaskan hubungan antara variabel bebas itu sendiri. Namun keempat faktor tersebut tidak dapat diukur secara langsung namun diukur dengan melalui indikator-indikator yang dapat dibentuk serta data-data yang dikumpulkan.

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan teori Edwards III yang akan disesuaikan dengan kepentingan penelitian ini. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KTSP SD antara lain:

1. Komunikasi, yang meliputi sejauh mana penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan terkait KTSP dengan menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya;
2. Sumber Daya, yang meliputi Sumber Daya Manusia dalam hal pemahaman, kecakapan, dukungan sarana dan prasarana atau fasilitas, kewenangan, informasi serta pembiayaan;
3. Sikap para pelaksana (*implementor*) dalam melaksanakan KTSP; serta

4. Struktur Birokrasi, yang meliputi struktur organisasi, pembagian kewenangan, serta hubungan antar unit organisasi. Berikut ini adalah gambaran dari variabel-variabel tersebut.

2.1.3.1 Komunikasi

Agar implementasi KTSP sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan penyampaian informasi yang jelas diantara pemerintah pusat dengan daerah. Untuk itu diperlukan komunikasi dua arah mulai dari rencana, proses, sampai evaluasi implementasi KTSP.

Komunikasi merupakan suatu persyaratan yang pertama dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, karena dalam mengimplementasikan suatu kebijakan/keputusan para implementor mengetahui cara yang mereka harus kerjakan. Suatu keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum dapat diikuti. Jadi komunikasi ini secara alamiah membutuhkan keakuratan dan dapat diterima oleh para implementor.

Menurut Anwar Arifin (2000), pengertian komunikasi berkaitan dengan “penyampaian informasi, ide, ketrampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan dengan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya” (P.5). Biasanya sarana yang digunakan dalam menyampaikan informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain adalah melalui sosialisasi, workshop, seminar, dan sebagainya. Menurut Quirk (1978), sosialisasi adalah “*to socialize is to bring something into public ownership*”.(p.1061) Maksudnya adalah sosialisasi merupakan memasyarakatkan sesuatu, kaitannya dengan kebijakan KTSP ini adalah masyarakat yang dalam hal ini adalah para *stakeholders* pendidikan diperkenalkan dengan kebijakan KTSP. Dengan kata lain sosialisasi merupakan proses pemasyarakatan peraturan/kebijakan tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya sehingga diserap ke dalam kesadaran individu dan akhirnya mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku setiap individu dalam menjalankan kebijakan tersebut. Sosialisasi kebijakan adalah suatu upaya untuk menyebarluaskan informasi kebijakan yang tengah atau telah dibuat. Artinya sebelum kebijakan tersebut diputuskan atau dikeluarkan secara resmi, masyarakat

perlu tahu sehingga bisa memberikan tanggapan atau reaksi yang bisa digunakan sebagai umpan balik atau masukan bagi proses pembuatan kebijakan yang lebih transparan dan partisipatif. Memang tidak semua orang bisa dipuaskan dengan kebijakan dan pasti ada pihak yang menerima dan ada yang keberatan tetapi yang paling utama adalah bahwa kepentingan publik umum diakomodasi dalam kebijakan. Dengan demikian pada hakekatnya sosialisasi kebijakan KTSP merupakan suatu mekanisme penyampaian informasi kebijakan KTSP kepada masyarakat dalam hal ini para *stakeholders* pendidikan yang merupakan bagian dari proses komunikasi melalui berbagai pola dan bentuk kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan para pelaksana kebijakan yaitu kepala sekolah dan guru. Lebih lanjut, Duggan dan Banwel (2004) menyatakan bahwa efektifitas suatu penyebaran informasi dapat diukur dari 3 (tiga) hal yaitu:

1. Peningkatan pengetahuan spesifik audiens berkaitan dengan informasi yang disampaikan, dalam hal ini tingkat pemahaman atas pengembangan KTSP.
2. Perubahan dalam sikap mental audiens terhadap suatu hal tertentu, misalnya mulai diterimanya kebijakan KTSP ini.
3. Perubahan sikap perilaku audiens, dalam hal ini sikap perilaku para pelaksana kebijakan yaitu kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan kebijakan KTSP. Keberhasilan pelaksanaan KTSP di sekolah, dituntut kepala sekolah untuk memiliki komitmen yang besar untuk menentukan dan menggerakkan berbagai komponen dan dimensi sekolah. Guru dituntut untuk memiliki kualitas yang baik dengan membuktikan profesionalismenya dalam merancang interaksi yang harmonis antar komponen sistem pembelajaran sehingga pembelajaran berlangsung dalam suasana menyenangkan dan demokratis.

Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, maka mereka yang tanggung jawabnya adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan, harus tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat dan kebijaksanaan ini harus jelas, akurat dan konsisten. Jika para pembuat keputusan kebijakan ini melihat yang diimplementasikan tidak jelas sebagaimana

rinciannya, maka kemungkinan akan timbul kesalahpahaman diantara pembuat kebijakan dan implementornya. Jelasnya, kebingungan oleh para implementor mengenai apa yang harus dikerjakan dapat menimbulkan kesempatan dimana mereka tidak akan mengimplementasikan sebuah kebijakan sebagaimana pemberi kebijakan menetapkan atau memerintahkannya. Menurut Edward (dikutip oleh Tangkilisan 2003: 19-20), dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam proses komunikasi kebijakan perlu diperhatikan tiga hal penting yaitu penyaluran/transmisi, kejelasan dan konsisten.

a. Transmisi Komunikasi

Seperti telah disebutkan diatas bahwa setiap keputusan/kebijakan yang sudah ditetapkan oleh para pembuat keputusan dalam mengimplementasikannya tidak selalu berjalan secara langsung seperti yang diharapkan, kemungkinan keputusan tersebut diabaikan dan terjadi kesalahpahaman. Hal ini terjadi karena adanya hambatan-hambatan dalam mentransmisikan komunikasi terhadap keputusan/kebijakan yang dibuat. Winarno (2002) menyatakan bahwa hambatan-hambatan yang dimaksud dapat berupa pertentangan pendapat antara para pelaksana perintah yang dikeluarkan oleh pengambilan kebijakan sehingga menimbulkan distorsi terhadap komunikasi kebijakan; adanya hierarki birokrasi yang berbelit-belit dan struktur birokrasi yang ketat sehingga mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan; sarana komunikasi yang tidak langsung dan tidak adanya saluran-saluran komunikasi yang ditentukan dapat mendistorsi perintah-perintah pelaksanaan penangkapan komunikasi yang dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmampuan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan dan kadang-kadang ada juga para pelaksana mengabaikan apa yang sudah jelas dan coba-coba menduga-duga makna komunikasi yang sebenarnya, dan dalam hal ini, para pelaksana berusaha untuk mengeksploitasi ketidakjelasan dalam komunikasi dengan tujuan membantu kebijakan-kebijakan kepentingan para pelaksana itu sendiri.

Transmisi komunikasi dalam suatu struktur birokrasi, menurut Muhammad (1988) terdiri dari:

1. *Downward Communication* atau komunikasi ke bawah yang menunjukkan arus pesan yang mengalir dari para atasan atau para pimpinan kepada bawahannya. Kebanyakan komunikasi ke bawah digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkenaan dengan tugas-tugas dan pemeliharaan. Pesan tersebut biasanya berhubungan dengan pengarahan, tujuan, disiplin, perintah, pertanyaan dan kebijaksanaan umum. Sedang menurut Lewis (1987) "komunikasi ke bawah adalah untuk menyampaikan tujuan, untuk merubah sikap, membentuk pendapat, mengurangi ketakutan dan kecurigaan yang timbul karena karena salah informasi, mencegah kesalahpahaman karena kurang informasi dan mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan"(dalam Muhammad, 1988:109).
2. *Upward Communication* atau komunikasi kepada atasan yang merupakan pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan atau dari tingkat yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk memberikan balikan, memberikan saran dan mengajukan pertanyaan. Komunikasi ini mempunyai efek pada penyempurnaan moral dan sikap karyawan.
3. *Horizontal Communication* atau komunikasi horisontal yang merupakan pertukaran pesan diantara orang yang sama tingkatan otoritasnya didalam organisasi. Pesan yang mengalir menurut fungsi dalam organisasi diarahkan secara horisontal. Pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas atau tujuan kemanusiaan, seperti kordinasi, pemecahan masalah, penyelesaian konflik dan saling memberikan informasi.

b. Kejelasan Komunikasi

Suatu kebijakan yang sudah ditetapkan haruslah diinformasikan secara jelas kepada para pelaksana dan pihak-pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga pihak-pihak tersebut mengetahui maksud dari isi/konsep, maksud dan tujuan, pelaksanaan serta waktu pelaksanaan dari kebijakan publik. Pelaksanaan suatu

kebijakan dapat terjadi kebingungan atau kabur, jika tidak diinformasikan secara tidak jelas kepada aparat pelaksana kebijakan. Petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami tetapi juga harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada para pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan atau bagaimana suatu program dilaksanakan. Jika tidak jelas, para pelaksana kebijakan tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ketidakjelasan pelaksanaan tersebut terjadi karena mungkin tidak menyetujui atau kurang menyenangi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan, adanya kekhawatiran akan merugikan atau mengecewakan salah satu pihak dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Edwards (1980) mengidentifikasi bahwa "enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan, yaitu (1) kompleksitas kebijakan publik, (2) keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, (3) kurangnya konsensus terhadap tujuan kebijakan, (4) masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, (5) menghindari pertanggungjawaban kebijakan dan (6) sifat pembuatan kebijakan pengadilan. Ketidakjelasan pesan komunikasi tidak selalu menghalangi implementasi karena pada tataran tertentu para pelaksana dapat bersifat fleksibel dalam melaksanakan kebijakan." (p.26)

c. Konsistensi Komunikasi

Konsistensi dalam mengkomunikasikan kebijakan ini terkait dengan sikap, persepsi maupun respon para pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar petunjuk pelaksanaannya. Jika suatu kebijakan yang disampaikan kepada para implementor mempunyai unsur kejelasan, tetapi kebijakan tersebut bertentangan maka kebijakan itu tidak memudahkan para pelaksana menjalankan tugasnya dengan baik. Jika kebijakannya tidak konsisten akan mendorong para pelaksana untuk mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Dengan demikian bila hal ini terjadi, akan mengakibatkan ketidakefektifan implementasi kebijakan karena kemungkinan besar tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan kebijakan.

2.1.3.2 Sumber Daya

Suatu kebijakan yang jelas, akurat dan konsisten namun jika ketersediaan sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan tersebut kurang, maka kebijakan itu tidak akan efektif. Dalam mengimplementasikan kebijakan perlu didukung sumber daya-sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, kewenangan serta informasi.

Sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan harus memiliki jumlah yang cukup memadai dan memenuhi kualifikasi untuk dapat mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya manusia yang memadai dan memenuhi kualifikasi merupakan jumlah para implementor yang mencukupi dengan persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, sumber daya manusia juga harus memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia dapat melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Menurut Soekijo Notoatmojo (1992), "pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia terutama untuk pengembangan aspek kemampuan intelektual dan kepribadian manusia".(p.4-5).

Definisi yang sedikit lebih terinci diungkapkan oleh James. W.Walker (1992) sebagai berikut : "*Training and education is the principle vehicle for developing skills and abilities of employees. It is also important as away to implement strategy because it influences employee value, attitudes, and practice: it is a primary communications vehicle controlled by management*".(p.112) Dari pengertian Diklat yang diartikan oleh Walker tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan sarana untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan para pegawai untuk menyelesaikan tugasnya. Diklat ini juga penting sebagai cara untuk melaksanakan strategi karena diklat ini akan mempengaruhi nilai pegawai, sikap dan praktek. Diklat dapat dikatakan berhasil jika diklat tersebut sudah memenuhi 3 komponen yaitu: masukan (*input*), proses (*throughput*), dan keluaran (*output*). Secara teoritis komponen masukan (*input*) terdiri atas sumber daya manusia yaitu: pimpinan, panitia penyelenggara, widyaiswara, peserta diklat, kurikulum, sarana

dan prasarana serta biaya. Komponen proses (*throughput*) terdiri atas kegiatan pengelolaan administratif dan pengelolaan proses belajar mengajar. Sedangkan komponen keluaran (*output*) terdiri atas kinerja individu dan organisasional.

Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap, relevan dan memadai juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Ketersediaan Sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan.

Adanya faktor pembiayaan yang mencukupi dapat mendukung secara langsung dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut secara lebih efektif dan efisien. Pembiayaan ini meliputi sumber dana yang di dapat, anggaran yang direncanakan, dan penggunaan dana dalam mengimplementasikan kebijakan.

Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang dimiliki oleh para sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Kewenangan diperlukan untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang dikehendaki oleh pengambil keputusan.

Informasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan definisi informasi itu sendiri menurut Shannon dan Weaver adalah "*Information is pattern matter energy that affects the probabilities of alternatives available to an individual making decision*" (informasi merupakan energi yang terpolakan dan mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan dari kemungkinan-kemungkinan yang ada). Untuk menguji atau melakukan pengukuran pada tahap awal perlu dipahami terlebih dahulu tentang konsep informasi dan kekuatan yang dimiliki atas informasi yang disampaikan agar dapat disikapi secara bijaksana dan efektif. Aubrey Fisher (1986) memberikan 3 (tiga) konsep informasi sebagai berikut :

1. Informasi menunjukkan fakta atau data yang diperoleh selama proses komunikasi. Informasi dikonseptualisasikan sebagai kuantitas fisik yang dapat dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain, individu satu kepada individu yang lain, atau medium yang satu ke medium yang lainnya. Semakin

banyak memperoleh fakta atau data, secara kuantitas seseorang juga memiliki banyak informasi.

2. Informasi menunjukkan makna data. Informasi merupakan arti, maksud atau makna yang terkandung dalam data. Peranan seseorang sangat dominan di dalam memberikan makna data. Suatu data akan mempunyai nilai informasi bila

bermakna bagi seseorang yang menafsirkannya. Kemampuan seseorang untuk memberikan makna pada data akan menentukan kepemilikan informasi. Penafsiran terhadap data atau stimulus yang diterima otak akan menentukan kualitas informasi. Sebagai produk sebuah "pabrik" (otak), kualitas informasi sangat ditentukan oleh berbagai unsur yang digunakan untuk mengolah setiap stimulus yang masuk ke dalam diri seseorang melalui panca indera, kemudian diteruskan ke otak untuk diolah berdasarkan pengetahuan (*frame of reference*), pengalaman (*field of experience*), selera (*frame of interest*), dan keimanan (*spiritual*) seseorang. Semakin luas pengetahuan, pengalaman, dan semakin baik selera dan moralitas, maka informasi yang dihasilkan semakin berkualitas. Proses di dalam otak manusia tersebut dikenal dengan proses intelektual (*intellectual process*).

3. Informasi sebagai jumlah ketidakpastian yang diukur dengan cara mereduksi sejumlah alternatif yang ada. Informasi berkaitan erat dengan situasi ketidakpastian. Keadaan yang semakin tidak menentu akan menimbulkan banyak alternatif informasi, yang dapat digunakan untuk mereduksi ketidakpastian.

Informasi yang dimaksud disini adalah semua keterangan baik yang berbentuk penjelasan tertulis atau lisan, petunjuk dan tata cara pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan agar para pelaksana tidak melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan atau melaksanakan kebijakan. Informasi ini penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut agar mau melaksanakan dan mematuhi tugas dan kewajibannya.

2.1.3.3 Sikap

Dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif, tidak hanya didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, sarana dan prasarana yang tersedia lengkap, pembagian kewenangan maupun informasi yang jelas, sikap juga sangat mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Sikap yang dimaksud adalah sikap para pelaksana dalam kesediaannya menerima dan melaksanakan kebijakan secara baik. Dalam arti bahwa setiap pelaksana memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa adanya paksaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan tersebut. Sikap ini akan muncul diantara para pelaku kebijakan, manakala akan mengunutkan organisasi dan dirinya.

Jika para pelaksana memiliki sikap mendukung dalam menjalankan implementasi maka kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh para pembuat keputusan awal. Namun sebaliknya, bila sikap atau perspektif-perspektif para pelaksana tidak sejalan dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan kebijakan akan terhambat. Sikap para pelaksana itu kemungkinan akan menghalangi implementasi kebijakan jika para pelaksana tidak memiliki kesepakatan dengan isi dari kebijakan tersebut. Sikap yang tinggi juga berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Intensitas sikap yang terbatas akan menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan.

2.1.3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif. Max Weber (dalam Azhar Kasim, 1993) mengatakan bahwa konsep birokrasi yang rasional sangat mengandalkan pada peraturan-peraturan (*rules*) dan prosedur yang kesemuanya dimaksudkan untuk membantu tercapainya tujuan dan terlaksananya nilai-nilai atau norma-norma yang diinginkan. Disamping itu weber juga menekankan bahwa wewenang dalam birokrasi berdasarkan pada keahlian (*expertise*) daripada pejabat (birokrat) yang bekerja atas dasar peraturan dan prosedur tersebut (Albrow, 1970). Menurut Weber,

birokrasi dalam bentuknya yang paling rasional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Para pegawai atau pejabat dalam birokrasi adalah pribadi yang merdeka dan hanya tunduk pada tugas jabatannya yang impersonal. Dengan perkataan lain, seorang birokrat sejati hanya tunduk kepada peraturan dan prosedur resmi, ia tidak tunduk kepada orang lain karena semata-mata hubungan pribadi, atau karena orang tersebut mempunyai status yang lebih tinggi dan sebagainya.
2. Adanya kejelasan hierarki antara jabatan-jabatan atau antara satuan organisasi. Diketahui dengan jelas siapa atasan dan siapa bawahan dalam organisasi yang bersangkutan.
3. Hubungan-hubungan fungsional diantara jabatan-jabatan dalam organisasi juga harus jelas. Misalnya, hubungan antara Divisi Keuangan dengan unit pelaksana.
4. Para pejabat diangkat atas dasar kontrak, misalnya berdasarkan Surat Keputusan yang memerinci tugas wewenang dan tanggung jawab dari jabatan.
5. Para pejabat tersebut dipilih atas dasar kualifikasi profesional seperti berdasarkan ijazah, diploma atau sertifikat yang diperoleh melalui ujian (seperti ujian masuk dan ujian jabatan).
6. Para pegawai/pejabat diberi gaji dan biasanya termasuk hak pensiun. Gaji tersebut digolongkan berdasarkan jabatan-jabatan dalam hierarki. Pegawai tersebut berhak untuk berhenti dan dalam keadaan tertentu kontrak kerja tersebut bisa dibatalkan. Atau dengan perkataan lain, pegawai tersebut bisa diberhentikan.
7. Jabatan yang dipangkunya adalah satu-satunya jabatan atau merupakan jabatan utamanya.
8. Adanya struktur karier dan promosi dimungkinkan baik berdasarkan senioritas maupun berdasarkan merit serta atas dasar pertimbangan (*judgement*) daripada atasan langsung
9. Para pejabat tidak boleh memanfaatkan jabatan dan sumber daya yang melekat dengan jabatan tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Ciri-ciri diatas merupakan ciri-ciri dari birokrasi yang ideal, murni atau bentuk yang rasional. (p.9-10)

Menurut Edwards III (1980) "implementasi kebijakan masih belum efektif karena ada ketidakefisienan struktur birokrasi (*deficiencies in bureaucratic structure*)".(P.125) Sedangkan Edwards (dalam Tangkilisan, 2003) struktur birokrasi yang dimaksud ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu prosedur pengoperasian standar (*Standard Operating Procedures/ SOP*) dan fragmentasi. Maksud dari bagian yang pertama berkembang sebagai tanggapan-tanggapan internal pada waktu dan sumber implementasi yang terbatas serta keinginan atas adanya keseragaman dalam menjalankan operasi organisasi-organisasi kompleks dan yang tersebar secara luas. Sedangkan yang kedua yaitu fragmentasi yang merupakan pembagian pusat kordinasi dan pertanggungjawaban. Fragmentasi juga bisa dikatakan adalah terpecah-pecahnya pelaksanaan kebijakan karena banyaknya organisasi atau badan yang terlibat di dalamnya. Pada dasarnya fragmentasi terjadi tekanan di luar unit-unit birokrasi sebagai komite legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat dari kebijakan luas yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik.

Fragmentasi membawa konsekuensi yang besar bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin banyak pihak yang terlibat, pelaksanaan kegiatan akan cenderung kurang fokus. Tetapi di sisi lain, jika suatu kegiatan memiliki skala besar sementara kordinasi serta pertanggungjawaban tidak dibagi-bagi, akan terjadi penumpukkan kordinasi serta pertanggungjawaban yang pada akhirnya mengakibatkan tersendatnya pelaksanaan kegiatan.

SOP memungkinkan untuk menghalangi implementasi kebijakan yang baru yang dituntut cara-cara kerja baru atau tipe personil baru dalam melaksanakan kebijakan. Selain itu juga semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula peluang SOP menghambat implementasi. Namun begitu, SOP juga memiliki manfaat. Organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan control yang besar mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi. Adanya penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas yang dilaksanakan tanpa tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh.

2.1.4 Teori tentang Kurikulum

Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) bagi siswa. Berdasarkan program pendidikan tersebut siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Smith (1996) mendefinisikan kurikulum *“as all the learning which is planned and guided by the school, whether it is carried on in groups and individually, inside or outside the school”* yang artinya kurikulum sebagai seluruh kegiatan belajar yang direncanakan dan dipedomani oleh sekolah untuk dilaksanakan secara berkelompok atau secara individu, baik didalam kelas maupun di luar sekolah. Sedangkan Winarno Surachmad (dalam Muhaimin, 1993: 11) kurikulum didefinisikan sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan dalam bukunya Kunandar (2007:123) memberikan beberapa pengertian tentang kurikulum dari beberapa pakar pendidikan seperti yang diungkapkan oleh Alice Miel (1946) bahwa kurikulum adalah segala pengalaman dan pengaruh yang bercorak pendidikan yang diperoleh anak di sekolah. Kurikulum mencakup pengetahuan, kecakapan, kebiasaan-kebiasaan, sikap, apresiasi, cita-cita, norma-norma, pribadi guru, kepala sekolah, dan seluruh pegawai sekolah. Sedangkan J.Galen Saylor dan William M.Alexander (1956) mengartikan kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk memengaruhi anak belajar, apakah dalam ruangan kelas, di halaman sekolah atau di luar sekolah, termasuk kurikulum.

Menurut Harold B. Alertyes (1965) mengartikan kurikulum adalah semua kegiatan baik di dalam kelas maupun di luar kelas yang berada di bawah tanggung jawab sekolah. William B. Ragan (1966) menyatakan bahwa kurikulum meliputi seluruh program dan kehidupan dalam sekolah, yakni segala pengalaman anak di bawah tanggung jawab sekolah. Yang mana kurikulum tidak hanya meliputi bahan pelajaran, tetapi juga meliputi seluruh kehidupan dalam kelas, termasuk di dalamnya hubungan sosial antara guru dan murid, metode mengajar, dan cara mengevaluasi. Sedangkan Mac Donald (dalam Joko Susilo, 2007) menyatakan bahwa kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar dan mengajar.

Menurut Nasution (1999), kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan itu meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Sedangkan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Menurut Hamalik (2005) rumusan ini lebih spesifik yang mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Kurikulum merupakan suatu rencana/perencanaan.
2. Kurikulum merupakan pengaturan, berarti mempunyai sistematika dan struktur tertentu.
3. Kurikulum memuat/berisikan isi dan bahan pelajaran, menunjuk kepada perangkat mata ajaran atau bidang pengajaran tertentu.
4. Kurikulum mengandung cara, metode atau strategi penyampaian pengajaran.
5. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
6. Kendatipun tidak tertulis, namun telah tersirat di dalam kurikulum, yakni kurikulum dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan.
7. Berdasarkan butir 6 maka kurikulum sebenarnya adalah suatu alat pendidikan. (P.65-66).

Kurikulum menurut Soetopo dan Soemanto dalam Muhammad Joko Susilo (2007) memiliki lima definisi yaitu:

- a. Kurikulum dipandang sebagai suatu bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu sekolah yang harus dilaksanakan dari tahun ke tahun.

- b. Kurikulum dilukiskan sebagai bahan tertulis yang dimaksudkan untuk digunakan oleh para guru didalam melaksanakan pelajaran untuk murid-muridnya.
- c. Kurikulum adalah suatu usaha untuk menyampaikan asas-asas dan ciri-ciri yang penting dari suatu rencana pendidikan dalam bentuk yang sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh guru di sekolah.
- d. Kurikulum diartikan sebagai tujuan pengajaran, pengalaman-pengalaman belajar, alat-alat pelajaran dan cara-cara penilaian yang direncanakan dan digunakan dalam pendidikan.
- e. Kurikulum dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. (P.79)

Dengan demikian dari berbagai pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang direncanakan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. David Pratt menyatakan bahwa sebagai suatu sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling mendukung.

Menurut Muhaimin (1993: 11-12) beberapa komponen kurikulum dapat dikategorikan ke dalam empat klaster (kelompok), yaitu :

1. Klaster komponen-komponen dasar, mencakup konsep dasar dan tujuan pendidikan, prinsip-prinsip kurikulum yang dianut, pola organisasi kurikulum, kriteria keberhasilan pendidikan, orientasi pendidikan, dan sistem evaluasi.
2. Klaster komponen-komponen pelaksanaan, mencakup materi pendidikan, sistem penjenjangan, sistem penyampaian (*delivery system*), proses pelaksanaan (belajar mengajar), dan pemanfaatan lingkungan (sebagai sumber belajar).
3. Klaster komponen-komponen pelaksana dan pendukung kurikulum, mencakup pendidik, peserta didik, bimbingan dan konseling, administrasi pendidikan, sarana dan prasarana, dan biaya pendidikan.
4. Klaster komponen usaha-usaha pengembangan, yakni usaha-usaha pengembangan terhadap ketiga klaster tersebut dengan berbagai komponen yang tercakup di dalamnya.

Untuk mencapai tujuan yang baik harus dipandu dengan kurikulum yang baik, *adaptif*, dan mampu menghasilkan *output* yang siap menghadapi tantangan internal dan eksternal globalisasi. Sukmadinata (dalam Susilo, 2007) mengatakan bahwa " kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam sejumlah proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Dengan kata lain, bahwa kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu pembentukan manusia yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa, memegang peranan penting dalam suatu sistem pendidikan." (P.9)

Menurut Hendyat Soetopo dan Soemanto dalam Muhammad Joko Susilo (2007) fungsi kurikulum terdiri dari tujuh bagian yaitu:

- a. Fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Maksudnya bahwa kurikulum merupakan suatu alat atau usaha untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah yang dianggap cukup tepat dan penting untuk dicapai. Dengan kata lain bila tujuan yang diinginkan tidak tercapai maka orang cenderung untuk meninjau kembali alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Fungsi kurikulum bagi anak. Maksudnya kurikulum sebagai organisasi belajar tersusun yang disiapkan untuk siswa sebagai salah satu konsumsi bagi pendidikan mereka. Dengan begitu diharapkan akan mendapat sejumlah pengalaman baru yang kelak kemudian hari dapat dikembangkan seirama dengan perkembangan anak.
- c. Fungsi kurikulum bagi guru. Ada tiga macam, yaitu: a). Sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar bagi anak didik. b). Sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. c). Sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan dan pengajaran.
- d. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pembina sekolah. Dalam arti: a). Sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi yaitu memperbaiki situasi belajar, b). Sebagai pedoman dalam

melaksanakan fungsi supervisi dalam menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar anak ke arah yang lebih baik, c). Sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam memberikan bantuan kepada guru untuk memperbaiki situasi mengajar. d). Sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum lebih lanjut, dan e). Sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi kemajuan belajar mengajar.

- e. Fungsi kurikulum bagi orang tua murid. Maksudnya orang tua dapat turut serta membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. Bantuan orang tua ini dapat melalui konsultasi langsung dengan sekolah/ guru, dana, dan sebagainya.
- f. Fungsi kurikulum bagi sekolah pada tingkatan di atasnya. Ada dua jenis berkaitan dengan fungsi ini yaitu pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan dan penyiapan tenaga guru.
- g. Fungsi kurikulum bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang bisa dilakukan dalam fungsi ini yaitu pemakai lulusan ikut memberikan bantuan guna memperlancar pelaksanaan program pendidikan yang membutuhkan kerjasama dengan pihak orang tua/ masyarakat. Dan ikut memberikan kritik/ saran yang membangun dalam rangka menyempurnakan program pendidikan di sekolah agar bisa lebih serasi dengan kebutuhan masyarakat dan lapangan kerja.

Jadi fungsi kurikulum adalah sebagai pedoman pelaksanaan program pendidikan untuk memberi kemudahan dalam proses belajar mengajar, sehingga mempermudah pencapaian tujuan pendidikan.(P.86)

2.1.5 Teori Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Mulyasa (2006:20-21) menyatakan bahwa KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran yakni sekolah dan satuan pendidikan. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum, yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan, dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah

memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Hal ini didukung oleh pendapat Jazadi (2008) yang menerangkan bahwa, "*decentralization of curriculum decision making refers to the recognition and devolution of curricular decision making to teachers individually or as a group within a school system or at district level*"(p.84). Maksudnya bahwa kebijakan desentralisasi pembuatan kurikulum mengacu pada pengakuan dan pelimpahan wewenang kepada para guru baik secara individu maupun secara berkelompok untuk membuat kurikulum dalam suatu system sekolah atau pada tingkat daerah.

Sedangkan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus (BSNP 2006:5). Menurut Sutrisno (2008) menyatakan KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dalam hal ini merujuk pada undang-undang satuan pendidikan adalah sekolah. KTSP merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2004 (KBK), yang mana pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mengharapkan paling lambat tahun 2009/2010, semua sekolah telah melaksanakan KTSP. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang esensial antara KBK dan KTSP. Keduanya sama-sama seperangkat rencana pendidikan yang berorientasi pada kompetensi dan hasil belajar peserta didik. Perbedaannya menampak pada teknis pelaksanaan. Jika KBK disusun oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Depdiknas (c.q. Puskur); KTSP disusun oleh Tingkat Satuan Pendidikan masing-masing, dalam hal ini sekolah yang bersangkutan, walaupun masih mengacu pada rambu-rambu nasional Panduan Penyusunan KTSP yang disusun oleh badan independen yang disebut Badan Standar Nasional Pendidikan. Dalam mengembangkan KTSP dilakukan oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan/kantor Depag Kab/Kota untuk Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Konsep KTSP ini menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) dan tugas-tugas dengan standar performansi tertentu

sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh siswa yang berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Perangkat standar program pendidikan ini hendaknya dapat mengantarkan siswa untuk memiliki kompetensi pengetahuan, dan nilai-nilai yang digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. KTSP merupakan kurikulum yang merefleksi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang merujuk kepada konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Bloom, yang pada gilirannya dapat meningkatkan potensi peserta didik secara optimal. Oleh karenanya, kurikulum yang disusun dapat menumbuhkan proses pembelajaran di sekolah berorientasi pada penguasaan kompetensi-kompetensi yang telah ditentukan secara integratif. Prinsip pengembangannya adalah mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan (berisi prinsip-prinsip pokok, bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman) dan pengembangannya melalui proses akreditasi yang memungkinkan mata pelajaran dapat dimodifikasi sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan demikian, kurikulum ini merupakan pengembangan dari pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat, untuk melakukan suatu keterampilan atau tugas dalam bentuk kemahiran dan rasa tanggung jawab. Lebih jauh lagi, kurikulum ini merupakan suatu desain kurikulum yang dikembangkan berdasarkan sejumlah kompetensi tertentu, sehingga setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, siswa diharapkan mampu menguasai serangkaian kompetensi dan menerapkannya dalam kehidupan kelak.

Beane (1986) menyatakan bahwa pemberlakuan KTSP dalam dunia pendidikan berimplikasi cukup luas dan kompleks yang berkaitan dengan pembelajaran, pengalaman belajar, dan sistem penilaian. Bentuk-bentuk pembelajaran yang disarankan dari KTSP meliputi pembelajaran autentik (*authentic instruction*), pembelajaran berbasis inquiri (*inquiry based learning*), pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*), pembelajaran layanan (*service learning*), pembelajaran berbasis kerja (*work based learning*), dan pembelajaran berbasis portofolio (*fortopolio based learning*).

Merujuk pada BNSP (2006) dalam mengembangkan KTSP berlandaskan kepada aspek akademis atau filosofis KTSP adalah sebagai berikut: John Dewey: Peran pendidikan adalah mengajar siswa cara menjalin hubungan antara sejumlah pengalaman - pengalaman baru melalui pengalaman lama menjadi pengetahuan.

Vygotsky: pengalaman di luar kelas dibawa ke dalam kelas dan pengalaman belajar siswa sangat penting. Ausubel: Informasi diorganisasikan dalam pikiran dan dalam struktur kognitif yang berhubungan dengan standar kompetensi, bila siswa diberi informasi baru, informasi tersebut akan masuk kedalam susunan kognitif dan melekat pada informasi baru tersebut mempunyai makna bagi siswa. dan struktur kognitif yang ada bertindak sebagai *advanced organizer*.

2.1.6 Landasan Hukum Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pemberlakuan KTSP sejak bulan Mei tahun 2006 memiliki dasar hukum antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ketentuan dalam UU 20/2003 yang mengatur KTSP adalah Pasal 1 ayat (19); Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 32 ayat (1), (2), (3); Pasal 35 ayat (2); Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3); Pasal 38 ayat (1), (2).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, ketentuan di dalam PP 19/2005 yang mengatur KTSP adalah Pasal 1 ayat (5), (13), (14), (15); Pasal 5 ayat (1), (2); Pasal 6 ayat (6); Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); Pasal 8 ayat (1), (2), (3); Pasal 10 ayat (1), (2), (3); Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 14 ayat (1), (2), (3); Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasal 17 ayat (1), (2); Pasal 18 ayat (1), (2), (3); Pasal 20.
3. Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dalam Standar Isi termasuk: kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. SI ditetapkan dengan Kepmendiknas No.22 tahun 2006.

4. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang ditetapkan dengan Keppmendiknas No.23 tahun 2006.

2.1.7 Tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memiliki tujuan umum dan khusus. Tujuan umum implementasi KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan dengan memberikan kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan. Sedangkan tujuan khususnya antara lain:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada.
- b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama.
- c. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang dicapai.

Menurut E.Mulyasa (2007) tujuan KTSP adalah sebagai berikut:

1. Pemberian informasi dan penghargaan semakin beragam, khususnya dalam lingkup interaksi guru dengan siswa di ruang kelas.
 2. Pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penugasan ilmiah dan konsep pengetahuan, tetapi juga penugasan kemampuan praktek.
 3. Untuk memberdayakan dan mempercayakan guru sekaligus mengembangkan hak-hak profesional yang melekat dalam jabatannya, termasuk hak otoritas dalam setiap kegiatan pengembangan kurikulum.
 4. Meningkatkan peran serta penyelenggaraan pendidikan dan masyarakat dalam hal ini diwakili oleh dewan sekolah dalam proses belajar mengajar.
 5. Upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih dekat dengan guru.
- (P.222)

2.1.8 Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Seperti telah kita ketahui implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak. baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Sedangkan yang dimaksud dengan implementasi KTSP adalah suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan kurikulum dalam suatu aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu, sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Implementasi kurikulum dapat juga sebagai diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis (*written curriculum*) dalam bentuk pembelajaran. Implementasi KTSP juga merupakan bagaimana menyampaikan pesan-pesan kurikulum kepada peserta didik untuk membentuk kompetensi mereka sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing. Lebih lanjut Miller dan Seller (dalam E. Mulyasa, 2003) mengatakan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktek pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Lebih lanjut dikatakan bahwa implemementasi kurikulum adalah proses interaksi antara fasilitator sebagai pengembang kurikulum, dan peserta didik sebagai subjek belajar.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa implementasi kurikulum adalah operasionalisasi konsep kurikulum yang bersifat potensial (tertulis) menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Dalam pandangan Hasan (dalam Mulyasa, 2003) implementasi kurikulum adalah hasil terjemahan guru terhadap kurikulum sebagai rencana tertulis.

Implementasi kurikulum dipengaruhi oleh tiga faktor, antara lain: (1) karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan. (2) strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi, seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. (3) karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuan untuk merealisasikan kurikulum (*curriculum planning*) dalam pembelajaran (Mulyasa, 2003). Menurut Mars, faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum adalah :

1. Dukungan kepala sekolah, dukungan kepala sekolah sangat diperlukan sepenuhnya dalam rangka mengimplementasikan KTSP, karena Kepsek merupakan pemimpin yang mengelola kurikulum disekolah. Kepemimpinan kepek dalam mengelola kurikulum sangat menentukan keberhasilan proses belajar disekolah.
2. Dukungan rekan sejawat dalam hal ini staf adminisrasi sekolah, tugas utama staf administrasi adalah membantu guru dan kepala sekolah tentang keadministrasian sekolah. Antara guru dan karyawan tidak bisa berdiri sendiri melainkan saling mengisi satu dengan yang lain terutama dalam mengimplementasikan KTSP, dimana guru juga memerlukan bantuan staf administasi sekolah dalam menyusun dokumen KTSP.
3. Dukungan internal yang datang dari dalam guru sendiri, dalam mengimplementasikan KTSP sangat ditentukan oleh guru karena bagaimanapun baiknya sarana pendidikan apabila guru tidak melaksanakan kurikulum dengan baik, maka hasil kurikulum (pembelajaran) tidak akan memuaskan.

Dari ketiga faktor tersebut, guru merupakan faktor penentu yang paling memberikan kontribusi dalam keberhasilan implementasi kurikulum di sekolah karena bagaimanapun baiknya sarana pendidikan apabila guru tidak melaksanakan tugas dengan baik, maka hasil implementasi kurikulum (pembelajaran) tidak akan maksimal (Mars dalam Mulyasa, 2003. Tugas guru dalam implementasi KTSP adalah bagaimana memberikan kemudahan belajar (*facilitate of learning*) kepada peserta didik, agar mereka mampu berinteraksi dengan lingkungan eksternal sehingga terjadi perubahan perilaku sesuai dengan yang dikemukakan dalam standar isi (SI) dan standar kompetensi lulusan (SKL). Selain guru, kepala sekolah juga merupakan seorang figur yang menjadi salah satu kunci yang menentukan serta menggerakkan berbagai komponen dan dimensi sekolah yang lain. Dalam posisi tersebut, baik buruknya komponen sekolah yang lain sangat ditentukan oleh kualitas guru dan kepala sekolah, tanpa mengurangi arti penting tenaga kependidikan lainnya. Dalam mengimplementasikan KTSP ini diperlukan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berfungsi sebagai pengikat KTSP yang dikembangkan oleh setiap sekolah dan satuan pendidikan di berbagai wilayah dan daerah. Dengan demikian, implementasi KTSP di setiap sekolah dan satuan pendidikan akan memiliki warna

yang berbeda satu sama lain, sesuai dengan kebutuhan wilayah dan daerah masing-masing ; sesuai dengan karakteristik masing-masing sekolah dan satuan pendidikan; serta sesuai pula dengan kondisi, karakteristik, dan kemampuan peserta didik. Namun demikian, semua sKTSP yang dikembangkan oleh masing-masing sekolah dan daerah itu, akan memiliki warna yang sama, yakni warna yang digariskan oleh Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal demikian sejalan dengan falsafah Bhineka Tunggal Ika sehingga pendidikan yang diimplementasikan secara beragam tetap dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa, untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Uraian diatas perlu ditekankan, karena akhir-akhir ini nampak adanya berbagai penyimpangan terhadap kewenangan dalam desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang menghambat mutu dan tidak memihak kepada rakyat. Jika hal ini dibiarkan maka lambat laun Indonesia akan mengalami kehancuran, bahkan tidak menutup kemungkinan terpecahbelahnya NKRI; dan ini harus menjadi kesadaran bersama seluruh anak bangsa, terutama bagi para penyelenggara negara dari hulu sampai hilir. Dengan demikian selayaknyalah setiap perubahan kurikulum diantisipasi dan dipahami oleh berbagai pihak. Hal ini dikarenakan dalam implementasinya kurikulum sebagai rancangan pembelajaran memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran, yang akan menentukan proses dan hasil belajar peserta didik ; bahkan hasil pendidikan secara keseluruhan. Sekolah sebagai pelaksana pendidikan , baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan.

Seperti yang telah dijabarkan diatas bahwa pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi(SI), standar proses, standar kompetensi lulusan(SKL), standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Berikut ini adalah sekilas dari masing-masing standar yang dimaksud.

1. Standar Isi, adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi

bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

2. Standar Proses, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran dikembangkan oleh BSNP, dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
3. Standar Kompetensi Lulusan, adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar Sarana dan Prasarana, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat rekreasi, tempat berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar sarana dan prasarana dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
6. Standar Pengelolaan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar Pembiayaan, adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
8. Standar Penilaian Pendidikan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Agar kurikulum dapat diimplementasikan™ secara efektif serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, guru perlu :

1. menguasai dan memahami kompetensi dasar dan hubungan dengan kompetensi lain dengan baik.
2. menyukai apa yang diajarkannya dan menyukai mengajar sebagai profesi
3. memahami peserta didik
4. menggunakan metode yang bervariasi dalam mengajar
5. mengikuti perkembangan mutakhir
6. menyiapkan proses pembelajaran
7. menghubungkan pengalaman yang lalu dengan kompetensi yang akan dikembangkan (Mulyasa, 2005)

Dalam KTSP peran guru hanyalah sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar. Sebagai fasilitator guru dituntut mempunyai 7 sikap yaitu :

1. Tidak berlebihan mempertahankan pendapat dan keyakinannya
2. Dapat lebih mendengarkan peserta didik
3. Mau dan mampu menerima ide peserta didik yang inovatif dan kreatif
4. Lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan peserta didik
5. Dapat menerima balikan (*feedback*) baik yang positif maupun negatif
6. Toleransi terhadap kesalahan yang diperbuat peserta didik
7. Menghargai prestasi peserta didik.

Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap pendidikan menggunakan prinsip-prinsip :

1. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.
2. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu : (1) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) belajar untuk memahami dan menghayati, (3) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (4) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (5) belajar untuk

membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.™

3. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.
4. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani, in madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada* (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan).
5. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan prinsip multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip *alam takambang jadi guru* (semua yang terjadi, tergelar, dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar dan lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).
6. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
7. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

Selain itu, KTSP disusun dengan memperhatikan acuan operasional sebagai berikut :

1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia.
Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun yang memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia.

2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik.
3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan
Kurikulum harus memuat keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan karakteristik lingkungan daerah sehingga menghasilkan lulusan yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan daerah.
4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
Pengembangan kurikulum harus memperhatikan keseimbangan tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
5. Tuntutan dunia kerja
Kurikulum harus mampu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja sesuai tingkat perkembangan peserta didik dan kebutuhan dunia kerja, khususnya bagi mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Agama
Kurikulum harus dikembangkan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama.
8. Dinamika perkembangan global
Kurikulum harus dikembangkan agar peserta didik mampu bersaing secara global dan dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain.
9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
Kurikulum harus mendorong wawasan dan sikap kebangsaan dan persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat
Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya.

11. Kesetaraan gender

Kurikulum harus diarahkan kepada pendidikan yang berkeadilan dan mendorong tumbuh kembangnya kesetaraan gender.

12. Karakteristik satuan pendidikan

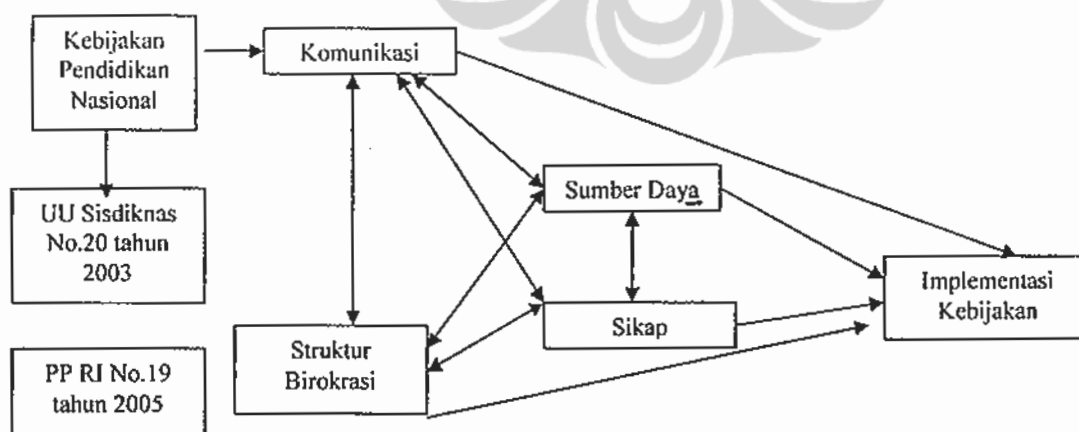
Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi dan ciri khas satuan pendidikan.

2.2 Model Analisis

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan model implementasi kebijakan Edwards III bahwa Implementasi kebijakan KTSP SD di SDN Kali Baru 01 dan SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara dipengaruhi empat variabel yang saling berinteraksi secara simultan. Variabel yang mendukung tersebut antara lain: komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), sikap para pelaksana (*implementor*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Implementasi kebijakan KTSP ini juga menimbulkan keluaran dan dampak terhadap kepala sekolah dan guru. Model analisis dapat dilihat pada gambar di berikut ini.

Gambar 2.2

Model Analisis Penelitian Implementasi Kebijakan KTSP SD di SDN Kali Baru 01 dan SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara



Sumber: Adaptasi dari model proses implementasi kebijakan Edwards III (1980:148)

2.3 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Komunikasi mempunyai pengaruh terhadap implementasi kebijakan KTSP di SDN Kalibaru 05 Pagi dan Semper Timur 05 Pagi Jakarta Utara.
2. Sumber-sumber daya mempunyai pengaruh terhadap implementasi kebijakan KTSP SDN Kalibaru 05 Pagi dan Semper Timur 05 Pagi Jakarta Utara.
3. Kecenderungan-kecenderungan/Sikap pelaksana mempunyai pengaruh terhadap implementasi kebijakan KTSP di SDN Kalibaru 05 Pagi dan Semper Timur 05 Pagi Jakarta Utara.
4. Struktur birokrasi mempunyai pengaruh terhadap implementasi kebijakan KTSP di SDN Kalibaru 05 Pagi dan Semper Timur 05 Pagi Jakarta Utara.

2.4. Operasionalisasi Konsep

2.4.1 Definisi Konsep

- a. Implementasi kebijakan kTSP SD di SDN Kalibaru 01 Pagi dan SDN Semper Timur 05 Pagi adalah proses pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh berbagai variabel. Variabel yang dimaksud antara lain komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.
- b. Pengaruh kebijakan KTSP terhadap nilai UASBN siswa kelas VI adalah dampak yang terjadi pada siswa sebagai akibat implementasi kebijakan KTSP.

2.4.2 Definisi Operasional

- a. Implementasi kebijakan pendidikan nasional tentang KTSP dilihat dari berbagai variabel, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap/penerimaan para implementor kebijakan dan struktur birokrasi.
- b. Pengaruh kebijakan terhadap siswa diukur dari hasil UASBN siswa kelas VI.

Tabel 2.2

Konsep, Variabel dan Indikator Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan KTSP	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian informasi mengenai KTSP 2. Kejelasan informasi mengenai KTSP 3. Konsistensi penyampaian informasi KTSP
	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pemahaman para pelaksana terhadap KTSP 2. Dukungan kompetensi para pelaksana dalam melaksanakan KTSP 3. Dukungan sarana dan prasarana dalam

		<p>melaksanakan KTSP</p> <p>4. Dukungan pembiayaan dalam melaksanakan KTSP</p> <p>5. Dukungan kewenangan dalam melaksanakan KTSP</p> <p>6. Dukungan informasi dalam melaksanakan KTSP</p>
	Sikap	<p>Kesediaan menerima dan melaksanakan tugas</p>
	Struktur Birokrasi	<p>1. Dukungan petunjuk pelaksanaan KTSP</p> <p>2. Dukungan penyebaran tanggung jawab</p>
	Dampak Kebijakan	<p>1. Peningkatan evaluasi belajar siswa setelah dilaksanakannya kebijakan KTSP sebagai tolak ukur peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut.</p>

Sumber: Diolah dari konsep proses implementasi kebijakan Edward III

2.5. Metode Penelitian

2.5.1 Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah masalah implementasi kebijakan pendidikan tentang KTSP di SDN Kalibaru 01 Pagi dan SDN Semper Timur 05 Pagi yang mana keduanya berlokasi di kotamadya Jakarta Utara. SDN Kalibaru 01 Pagi merupakan sekolah dasar mandiri dengan kategori standar nasional yang artinya sekolah dasar yang telah memenuhi persyaratan delapan standar nasional yaitu; standar isi, proses, kompetensi kelulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. SDN Semper Timur 05 Pagi merupakan sekolah dengan kategori sekolah reguler.

2.5.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian implementasi kebijakan pendidikan tentang KTSP ini mempergunakan pendekatan positivis dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan positivis memandang ilmu sosial sebagai suatu metode kombinasi berpikir deduktif dengan melakukan observasi mengenai tingkah laku individu dan kemudian mengkonfirmasinya dalam ketentuan hukum atau teori yang bersifat kausal sehingga dapat diprediksi pola aktivitas manusia secara umum. Seperti yang dinyatakan oleh Lawrence Neuman (2003) bahwa "*Positivism sees social science as an organized method for combining deductive logic with precise empirical observations of individual behaviour in order to discover and confirm a set of probabilistic causal laws that can be used to predict general patterns of human activity*" (p.66).

Metode kualitatif diambil karena penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, kemudian memahami mengenai keberadaan kebijakan pendidikan tentang KTSP. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan konteks yang relevan melalui gambaran holistik dan

memperbanyak pemahaman mendalam. Sedangkan menurut Kirk dan miller dalam Moleong (1989) mengatakan “Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya”(p:3).

Berdasarkan konsep tersebut diatas, selanjutnya kegiatan penelitian ini merupakan suatu upaya untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan pendidikan tentang KTSP di SDN Kalibaru 01 dan SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara.

2.5.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data tentang implementasi kebijakan pendidikan tentang KTSP di SDN Kalibaru 01 dan SDN Semper Timur 05 Jakarta Utara. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga peneliti menggambarkan kondisi dan situasi dalam bentuk kata-kata dan bahasa sesuai dengan kenyataan yang ada berdasarkan keadaan dan hasil temuan dilapangan.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data utama yang digunakan untuk analisis data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui penelitian lapangan berupa pencatatan/rekaman wawancara.
2. Data sekunder merupakan data pendukung untuk melengkapi analisis utama yang bukan merupakan dari hasil *interview* maupun pengamatan langsung. Data tersebut meliputi dokumen dan laporan-laporan tertulis yang berkaitan dengan penelitian yang dikumpulkan dengan cara mencatat dan mempelajari data tersebut.

Dengan demikian untuk mendapatkan data-data tersebut maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (*in depth interview*), menurut Sugiyono (2006) wawancara “adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu "(p.317). Sedangkan menurut Hadi (2004) mengemukakan bahwa "wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan suaranya dengan telinga. Wawancara merupakan alat pengumpul informasi langsung untuk berbagai jenis data sosial, baik yang terpendam (*latent*) maupun yang memanifes" (p.217). Dengan demikian metode wawancara merupakan suatu metode untuk mendapatkan informasi secara langsung dari respondennya (*key-informant*). Metode wawancara ini menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data.

2. Studi kepustakaan, merupakan suatu metode untuk memperoleh berbagai data sekunder dari berbagai buku, dokumen-dokumen yang relevan sesuai dengan masalah penelitian.
3. Observasi, merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengamati langsung ke lokasi penelitian terhadap objek-objek penelitian dan juga mengadakan interaksi sosial dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberi dukungan dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

2.5.4 Informan atau Narasumber

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pendidikan tentang KTSP ini mengambil informan atau narasumber dari beberapa pihak seperti:

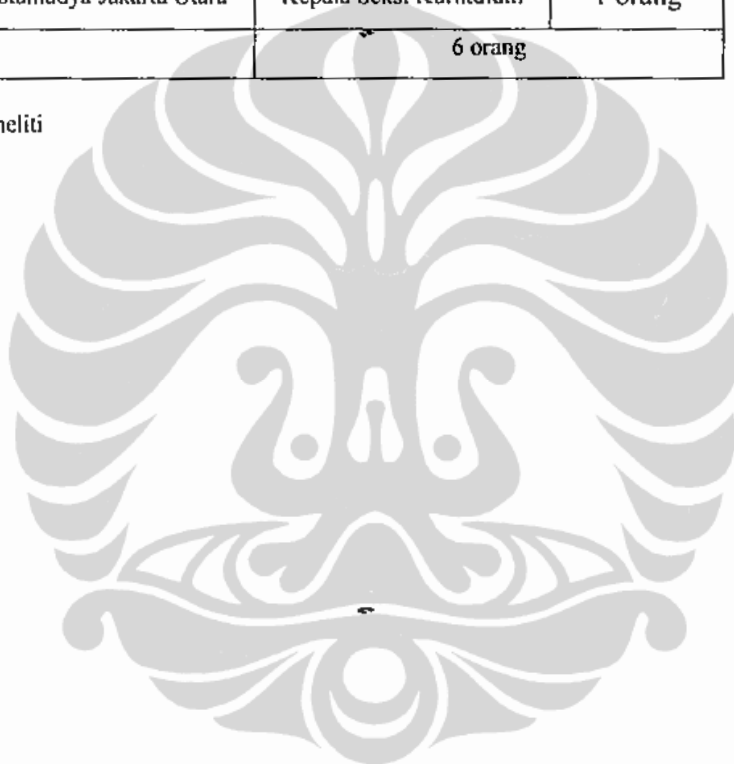
1. Pejabat Dinas Pendidikan provinsi DKI Jakarta dalam hal ini adalah Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi.
2. Pejabat Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta Utara yaitu Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kotamadya.
3. Kepala Sekolah SDN Kalibaru 01 sebagai sekolah dasar standar nasional dan SDN Sempur Timur 05 Jakarta Utara sebagai sekolah dasar reguler.
4. Guru kelas VI. Lebih jelasnya hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini

:

Tabel 2.3
Jumlah Informan

Asal Informan	Informan/ Nara sumber	Jumlah
SDN Kalibaru 01 Pagi (SDSN)	Kepala Sekolah	1 orang
	Guru	1 orang
SDN Semper Timur 05 Pagi (Reguler)	Kepala Sekolah	1 orang
	Guru	1 orang
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Kepala Seksi Kurikulum	1 orang
Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta Utara	Kepala Seksi Kurikulum	1 orang
TOTAL		6 orang

Sumber : hasil olahan peneliti



BAB 3 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1. SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara

3.1.1 Sejarah Singkat SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara

SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara berdiri pada tahun 1975 di atas tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 2.888,1 m². SDN ini terletak di jalan Kalibaru Timur IV B No.1, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara. Lokasi sekolah ini berada di tengah daerah pemukiman penduduk dan mudah dijangkau oleh alat transportasi. Sekolah ini mulai beroperasi pada tahun 1977 dan mengalami rehab besar-besaran pada tahun 2000.

Dari tahun ke tahun sekolah ini mulai berkembang maju dengan pesat yang mana pada tahun ajaran 2008/2009 sekolah ini menjadi sekolah dasar berstandar nasional. Sekolah dasar berstandar nasional adalah sekolah dasar yang memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan penilaian. Salah satu faktor majunya perkembangan sekolah ini adalah disebabkan oleh kepemimpinan kepala sekolah yang memimpin sekolah. Dari delapan kali pergantian pemimpin di SDN 01 Kalibaru ini, semuanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan kelebihan masing-masing. Berikut ini adalah daftar nama-nama kepala sekolah yang pernah memimpin SDN Kalibaru 01, yaitu :

Tabel 3.1
Daftar Nama-Nama Kepala Sekolah yang Pernah Menjabat di SDN Kalibaru
01 Jakarta Utara

No.	Nama	Tahun
1	Amisau	1978 s.d 1988
2	Madiyono	1988 s.d 1996
3	Pl.H. Sri Suharti	1996 s.d 1997
4	Hj. Nurhayati	1997 s.d 2000
5	Pl.H Subandi	2000 s.d 2001
6	Dra.Hj. Lilis Sukartini, MM	2001 s.d 2006
7	Pl.H Drs. Sugeng Riyanto	2006 s.d 2007
8	Dra. Risnamurti, M.Pd	2007 s.d sekarang

Sumber : Profil Sekolah SDN Kalibaru 01

3.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Sekolah

Setiap sekolah dituntut untuk mempunyai visi dan misi yang jelas, karena dengan adanya visi dan misi tersebut, sekolah akan memiliki arah yang jelas mau dibawa kemana. Maksudnya dalam kondisi seperti apa dan bagaimana cita-cita dan tujuan sekolah yang ingin dicapai, dengan demikian sekolah dapat mengambil skala prioritas yang akan dilakukan untuk mencapai cita-cita maupun tujuan yang telah dirumuskan bersama-sama baik oleh kepala sekolah, guru maupun tenaga kependidikan lainnya. Visi sekolah adalah segala sesuatu yang ada dan terpikir oleh sekolah, seperti dalam bentuk ide berupa rencana, harapan serta keinginan yang ingin dicapai dimasa mendatang untuk dapat mencapai tujuan-tujuan sehingga menciptakan sekolah berprestasi dan didalamnya terdapat manusia-manusia yang memiliki intelektual tinggi dan berkualitas. SDN Kalibaru 01 memiliki visi yaitu "Bersatu meningkatkan mutu melalui nilai, keterampilan, kreativitas dan kepedulian sosial".

Misi sekolah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai visi sekolah yang telah dirumuskan bersama tadi dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya (*stakeholders*). Dengan arti lain misi sekolah merupakan penjabaran dan upaya menjalankan apa yang telah direncanakan dalam visi sekolah, dan pelaksanaannya agar tercapai tujuan sekolah. Misi dari SDN Kalibaru 01 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
2. Menanamkan semangat kebersamaan dan rasa percaya diri secara intensif kepada warga sekolah.
3. Menumbuhkan penghayatan terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya, sehingga arif dalam bersikap dan bijak dalam bertindak.
4. Menerapkan manajemen partisipatif.

Pendidikan di SDN Kalibaru 01 ini diarahkan untuk mencapai tujuan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas kepribadian siswa yang berakar pada budaya lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Meningkatkan prestasi akademik dengan peningkatan rata-rata prestasi belajar setiap tahun minimal 0,25.
4. Meningkatkan prestasi non akademik dengan peningkatan kegiatan/ partisipasi dalam bidang keagamaan, olah raga, kesenian, dan lain-lain.
5. Meningkatkan mutu kesejahteraan pegawai dalam arti luas.
6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia/profesionalisme tenaga kependidikan.
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan tata usaha sekolah.
8. Terbangunnya hubungan masyarakat yang sehat.

3.1.3 Tenaga Kependidikan

SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara ini memiliki personil antara lain 1 orang kepala sekolah, 15 orang guru, 1 orang tenaga administrasi, 1 orang penjaga sekolah, dan 1 orang petugas kebersihan. Total keseluruhan personil adalah 19 orang dengan 12 orang perempuan, 6 orang laki-laki. Personil dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 13 orang dan yang berstatus honorer berjumlah 5 orang. Personil dengan jenjang pendidikan S2 berjumlah 1 orang, pendidikan S1 berjumlah 11 orang, pendidikan D3 berjumlah 4 orang, dan pendidikan SD berjumlah 2 orang. Berikut ini diagram yang menggambarkan jenjang pendidikan tenaga kependidikan SDN Kalibaru 01 Jakarta.

Gambar 3.1.
Diagram Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan
SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara



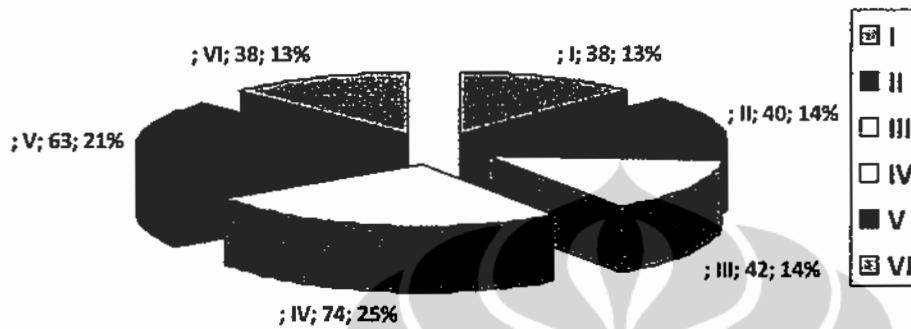
Sumber : Profil Sekolah SDN Kalibaru 01

3.1.4 Kondisi Siswa

Pada tahun ajaran 2008/2009, SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara memiliki 6 kelas, dengan jumlah siswa seluruhnya sebanyak 285 siswa. Berikut ini adalah rincian dari masing-masing kelas, antara lain:

- Kelas I = 38 siswa, 2 rombongan belajar
- Kelas II = 40 siswa, 1 rombongan belajar
- Kelas III = 42 siswa, 1 rombongan belajar
- Kelas IV = 74 siswa, 2 rombongan belajar
- Kelas V = 63 siswa, 2 rombongan belajar
- Kelas VI = 38 siswa, 1 rombongan belajar

Gambar 3.2.
Diagram Kondisi Siswa
SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara Tahun Ajaran 2008/2009



Sumber: Profil Sekolah SDN Kalibaru 01

Begitupun kondisi orang tua murid SDN Kalibaru 01, mereka memiliki pekerjaan yang beranekaragam, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Data Pekerjaan Orang Tua Siswa
SDN Kalibaru 01 tahun Ajaran 2008/2009

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasi
1	Buruh	40	13,79
2	Wiraswasta/pedagang	125	43,10
3	Karyawan swasta	60	20,68
4	Pegawai Negeri Sipil	30	10,34
5	TNI/Polri	5	1,72
6	Nelayan	30	10,34

Sumber: Profil Sekolah SDN Kalibaru 01

Berdasarkan tabel diatas, pekerjaan orang tua siswa di dominasi oleh wiraswasta/pedagang sebesar 43,10%, kemudian diurutan kedua karyawan swasta

sebesar 20,68%, buruh sebesar 13,79%, sisanya PNS, nelayan dan TNI/polri. Jika dilihat dari jenis pekerjaan, siswa-siswa SDN Kalibaru 01 berasal dari masyarakat kalangan menengah bawah, sehingga sulit diharapkan perhatian orang tua yang baik bagi pendidikan anak-anak mereka. Apalagi untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Walaupun berada pada kondisi yang demikian dalam mengupayakan timbulnya semangat belajar para siswa adalah komitmen para guru SDN Kalibaru 01.

3.1.5 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana SDN Kalibaru 01 cukup lengkap dan dalam keadaan baik. Keadaan fisik sekolah seperti luas tanah keseluruhan adalah 2.888,1 m² dengan luas bangunan 1.143,6 m². Data sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Data Sarana dan Prasarana
SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara

No	Ruang	Jumlah	Luas	Data Sarana
1	Kantor	1	56 m ²	1. Keadaan personalia/statistik 2. Data inventaris barang 3. Rencana kerja tahunan 4. Proses peningkatan mutu 5. Data pendidikan 6. Jadwal kegiatan kepala sekolah 7. Grafik-grafik 8. Struktur organisasi 9. Kalender pendidikan 10. Meja kursi tamu 11. Photo presiden 12. Lemari, offset, buku, piala 13. Komputer
2	Kelas	6	56 m ²	1. Meja dan kursi siswa 2. Meja, kursi serta lemari guru

				<ul style="list-style-type: none"> 3. Papan absen dan papan tulis 4. Lemari buku 5. Garuda, gambar presiden dan wakil presiden
3	Labolatorium	1	56 m ²	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meja praktek 2. Papan tulis 3. KIT IPA/IPS 4. Lemari 5. 1 set angklung 6. Organ 7. Bas 8. Bongo 9. Papan jadwal pemakaian 10. Recorder 11. Pianika 12. Alat peraga sains 13. Meja demo 14. Meja dan kursi petugas
4	Perpustakaan	1	56 m ²	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meja baca 2. Rak buku 3. Meja dan kursi baca 4. Buku-buku bacaan 5. Komputer
5	Ruang UKS	1	7,5 m ²	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi petugas 2. Papan data 3. Meja periksa 4. Kotak obat 5. Timbangan 6. Skala tubuh 7. Meja tulis
6	Ruang Komputer	1	28 m	<ul style="list-style-type: none"> 1. 12 unit komputer 2. Kursi siswa 3. Printer

				4. Papan tulis
7	Lab. Bahasa	1	56 m	1. 40 unit komputer 2. Papan tulis 3. TV dan alat audio
8	Gudang	1	21 m	1. Tenda kemah 2. Alat-alat olahraga 3. Kursi lipat
9	WC	4	60 m	1. Alat pembersih 2. Ember plastik 3. air bersih 4. Gayung
10	Koperasi	1	7,5 m	1. Kursi 2. Lemari/rak 3. Dispenser 4. Perlengkapan memasak 5. Lemari pendingin 6. Lemari dagangan

Sumber: Profil Sekolah SDN Kalibaru 01

Sarana dan prasarana di SDN Kalibaru 01 pada umumnya hampir semuanya dalam kondisi baik dan layak pakai. Seperti kita ketahui bahwa dengan tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap dan layak pakai memudahkan dalam melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan sekolah. Oleh karena itu sarana dan prasarana tersebut haruslah dirawat dan dijaga agar tahan lama dan tidak cepat rusak. Sarana dan prasarana diperoleh dari dana yang diberikan oleh pemerintah dan orang-orang yang peduli dengan pendidikan.

3.1.6 Program Sekolah

Seperti kita ketahui bahwa program sekolah merupakan bentuk dari penjabaran visi dan misi sekolah untuk mencapai tujuan sekolah dan juga dijadikan acuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan sekolah. Program sekolah ini dibuat setiap awal tahun pelajaran yang disusun dalam sebuah rencana kerja tahunan. Sekolah dasar Negeri Kalibaru 01 ini menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan

fungsi dan tugas dari masing-masing tenaga kependidikan. Dibawah ini merupakan tabel rencana kerja SDN Kalibaru 01 berupa kegiatan kesiswaan antara lain:

Tabel 3.4
Data Kegiatan Siswa SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara

No	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
1	Upacara Bendera	Siswa kelas IV s/d VI	Pimpinan upacara, paduan suara, pengibar bendera, pembawa acara, pembaca UUD 1945, janji siswa, pembaca doa.
2	Kebersihan Sekolah	Siswa kelas I s/d VI	Dilaksanakan oleh siswa melalui regu piket dan regu kerja dimotori oleh guru kelas masing-maing
3	Kepramukaan	Pembina Pramuka	Dilakukan oleh siswa dibawah bimbingan guru yang menangani bidang kepramukaan sesuai dengan SK penugasan dari kepala sekolah
4	Keagamaan	Guru Agama	Untuk menambah pendidikan keagamaan diadakan pelajaran tambahan di luar jam sekolah dan sholat Dhuha bersama setiap hari Jum'at
5	UKS	Guru UKS	Dipandu oleh Dokter Kecil dan di bina oleh guru UKS serta petugas dari puskesmas
6	Koperasi	Pengurus Koperasi	Dikordinir oleh guru yang ditugasi untuk mengelolanya
7	Kelompok Kerja Guru	Pengurus KKG	Kepengurusan KKG dibentuk oleh dewan guru, untuk menangani permasalahan pendidikan dan peningkatan mutu

			pengajaran dan pendidikan
8	Warung Sekolah	Pengurus Sekolah	Kegiatan warung sekolah dibina oleh guru yang tinggal disekolah
9	Perpustakaan	Petugas perpustakaan	Pengelolaan perpustakaan sekolah di lakukan oleh guru dan dibantu siswa
10	Laboratorium	Pengelola Laboratorium	Pengelolaan laboratorium dilakukan seorang guru dibantu siswa kelas IV s/d VI berdasarkan jadwal praktikum yang ada
11	Senam Massal	Senam Massal kelas I-VI	Diikuti oleh seluruh siswa SDSN Kalibaru 01 Pagi, dipandu oleh guru olahraga
12	Marching Band	Siswa kelas IV,V, VI	Dibimbing oleh Pembina (Guru dan Pelatih) dan diikuti oleh siswa kelas IV,V, VI

Sumber: Profil Sekolah SDN Kalibaru 01

3.1.7 Prestasi Sekolah

Dari tahun ke tahun SDN Kalibaru 01 Pagi telah banyak meraih prestasi baik secara akademik maupun non akademik sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2009. Berikut ini adalah daftar prestasi yang telah diraih oleh SDN Kalibaru 01 Pagi lima tahun terakhir :

Tabel 3.5
Data Prestasi SDN Kalibaru 01 Pagi Tahun 2005-2009

No	Nama Lomba	Peringkat	Tingkat	Tahun
1	Pidato Putri	I	Provinsi DKI Jakarta	2005
2	Qosidah	I	Kecamatan	2005
3	Cerdas Cermat Dokter Kecil	II	Kecamatan	2005
4	Puisi	I	Kotamadya	2005
5	Melukis	II	Kecamatan	2005
6	Mata Pelajaran Bahasa Indonesia	III	Kecamatan	2005
7	Pidato Putri	I	Kecamatan	2005
8	Puisi	I	Kotamadya	2005
9	Pidato Putra	III	Kecamatan	2005
10	Menganyam	III	Gugus I	2005
11	Kolase	III	Gugus	2005
12	MP. Bahasa Indonesia	I	Kecamatan	2005
13	Ansambel Recorder	III	Kecamatan	2005
14	Puisi	III	Kecamatan	2006
15	Memainkan alat musik	II	Kecamatan	2006
16	Dalam Pembelajaran	II	Kecamatan	2006
17	Seni Lukis	III	Kecamatan	2006
18	MP. Bahasa Indonesia	I	Kecamatan	2006
19	Kim Cium	I	Kwarcab Jakut	2007
20	Bulu Tangkis/Tunggal/ Ganda Putri	I	Kecamatan	2007
21	Bulu Tangkis Putra	III	Kecamatan	2007
22	Puisi	III	Kwarcab Jakut	2007
23	Gebyar Pramuka	II	Kelurahan	2007
24	MTQ SD/MI	I	Kelurahan	2008
25	Binaussholah	II	Kecamatan	2008
26	Pidato	II	Kecamatan	2008
27	Olimpiade MIPA Jalur B	Harapan II	Kotamadya	2008
28	Pramuka Puteri	Prestasi Baik	Kotamadya	2008
29	Pramuka Putera	Prestasi Baik	Kotamadya	2008
30	Pramuka Puteri	Prestasi I	Provinsi	2008
31	Pramuka Putera	Harapan I	Provinsi	2008

32	Bulu Tangkis	I	Kecamatan	2008
33	Bulu Tangkis	III	Kecamatan	2008
34	Ayat Pilihan	Harapan I	Kotamadya	2009
35	Puitisasi	I	Kotamadya	2009
36	Puitisasi	II	Kotamadya	2009
37	Puitisasi	Harapan I	Kotamadya	2009
38	Mendongeng	III	Kotamadya	2009
39	MIPA Jalur B	Harapan III	Kotamadya	2009
40	Edu Games	III	Jabodetabek	2009

Sumber: Profil Sekolah SDN Kalibaru 01

3.1.8 Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar SDN Kalibaru 01 Pagi hanya pada waktu pagi hari hingga siang hari dari pukul 07.00WIB-12.00WIB. Untuk anak kelas I karena terdiri dari dua kelas, maka KBM dilakukan secara paralel yang mana setiap seminggu sekali akan bergiliran untuk masuk pagi yaitu jam 07.00 WIB-09.30 WIB, kemudian jam selanjutnya pukul 09.30WIB-12.00WIB . Untuk anak kelas VI ada pendalaman materi setelah pulang sekolah untuk mempersiapkan Ujian Akhir Nasional .

Berikut ini adalah materi pelajaran yang diajarkan di SDN Kalibaru 01 Pagi:

1. Pendidikan agama Islam
2. Pendidikan Kewarganegaraan
3. Bahasa Indonesia
4. Matematika
5. Ilmu pengetahuan Alam
6. Ilmu Pengetahuan Sosial
7. SBK
8. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
9. Pendidikan Lingkungan Belajar Jakarta
10. Bahasa Inggris

Pendidikan Lingkungan Belajar Jakarta dan Bahasa Inggris merupakan pelajaran muatan lokal. Seluruh kelas di SDN Kalibaru 01 Pagi ini sudah melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang disusun oleh para

guru di bantu oleh kepala sekolah sebagai pengelola kurikulum dan konsultan pendidikan serta berpedoman pada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler SDN Kalibaru 01 Pagi antara lain : pramuka, komputer, menari, drumband dan olahraga. Untuk pramuka merupakan ekstrakurikuler yang wajib harus diikuti oleh seluruh siswa, sedangkan yang lainnya merupakan pilihan.

3.2. SDN Semper Timur 05 Pagi.

3.2.1 Sejarah Singkat SDN Semper Timur 05 Pagi

SDN Semper Timur 05 Pagi merupakan salah satu SDN reguler di Jakarta Utara, berdiri pada tahun 1976 dan baru beroperasi 2 tahun kemudian. dibangun diatas tanah seluas 2650 m² dengan luas bangunan hanya 690 m². Sekolah ini berlokasi di jalan Kebantenan IV No.19 RT 009/04, kelurahan Semper Timur, kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan baru mengalami rehab pada tahun 2006. Letak sekolah ini berada di tengah permukiman penduduk padat yang mana untuk menuju sekolah tersebut agak sulit dijangkau dengan alat transportasi beroda empat karena letaknya berada di jalan yang sempit.

SDN Semper Timur 05 Pagi adalah salah satu dari beberapa sekolah imbas yang tidak menitikberatkan pada kualitas IQ dalam menerima siswa untuk dapat memperoleh pendidikan, artinya siapapun berhak memperoleh pendidikan dengan tanpa tes apapun. Tujuan terpenting dari sekolah ini adalah dapat memberikan informasi, pengetahuan serta membentuk sikap dan perilaku anak didik menjadi lebih baik. SDN Semper Timur 05 pagi merupakan sekolah yang beberapa bagian sudah rusak disana-sini, ini disebabkan karena kondisi sekolah yang hampir tiap tahun selalu banjir yang mengakibatkan lapuknya beberapa tiang-tiang kayu penyangga. Kondisi sekolah yang selalu banjir tiap musim hujan datang, juga mengakibatkan pembelajaran tidak dapat dilakukan secara maksimal, karena sekolah terpaksa harus meliburkan siswa. Namun untuk mengejar ketertinggalan pelajaran, guru-guru memberikan waktu lebih (setelah pulang sekolah) untuk mengajarkan pelajaran-pelajaran yang belum sempat diberikan siswa-siswa.

3.2.2 Visi, Misi dan Tujuan Sekolah.

Dengan statusnya sebagai sekolah imbas dan tidak menitik beratkan pada unsur kependaian dalam menerima siswa bersekolah disini, maka SDN Semper Timur

05 Pagi terpacu untuk dapat mendidik siswa menjadi sama baiknya dengan siswa sekolah-sekolah lain, oleh sebab itu sekolah ini memperluas jangkauan dalam mendidik siswa-siswi di sekolah ini menjadi :

1. Siswa yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai moral.
2. Siswa yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan.
3. Siswa yang dapat menciptakan suasana sekolah yang bersih dan nyaman bagi kelancaran prosés pembelajaran
4. Siswa yang inovatif dalam pembaharuan di segi pengetahuan.
5. Siswa yang kreatif dalam bidang kesenian.
6. Siswa yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan.
7. Siswa yang mampu berinteraksi dengan baik di lingkungan setempat.

Untuk mencapai tujuan sekolah, maka SDN Semper Timur 05 Pagi dalam melaksanakan proses pendidikan mengacu kepada visi, misi dan strategi yang ada. SDN Semper timur 05 Pagi memiliki visi yaitu terwujudnya potensi dan prestasi anak didik handal dalam kepribadian, tanggungjawab, imtak dan iptek. Sedangkan misinya antara lain:

1. Semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu.
2. Etos kerja yang tinggi dalam proses belajar mengajar.
3. Membentuk siswa yang cerdas, kreatif dan berbudi pekerti yang luhur.
4. Percaya diri dalam memenangkan persaingan di era globalisasi.
5. Edukasi mendidik anak belajar berpikir dan belajar untuk hidup.
6. Rasa memiliki lingkungan, ikut serta menjaga dan melestarikannya.
7. Terciptanya kerjasama antar unsur yang berkepentingan dalam pendidikan.
8. Ilmu yang didapat bermanfaat untuk di dunia dan akherat.
9. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah.
10. Rasa persatuan dan kesatuan dengan semangat patriotisme yang terpatri dalam sikap dan perilaku pendidik dan anak didik.

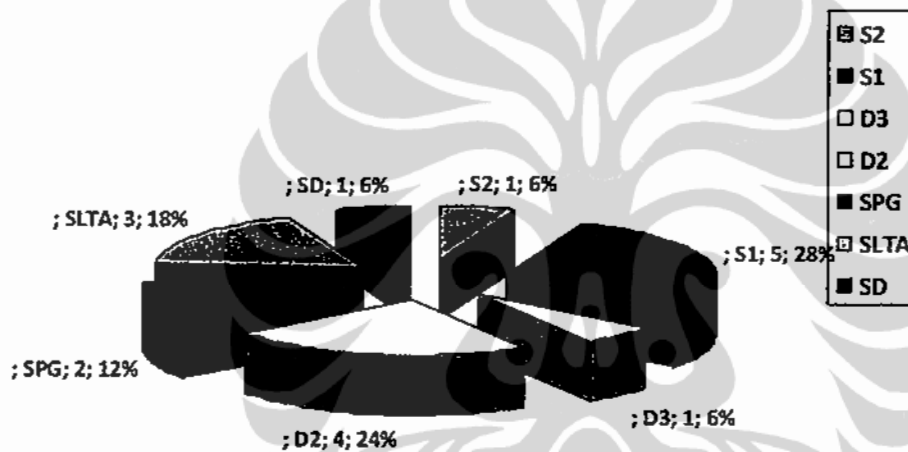
3.2.3 Tenaga Kependidikan

SDN Semper timur 05 Pagi Jakarta Utara ini memiliki personil antara lain 1 orang kepala sekolah, 14 orang guru, 1 orang pembina pramuka, 1 orang penjaga sekolah, dan 1 orang petugas kebersihan. Total keseluruhan personil adalah 18 orang dengan 10 orang perempuan, 8 orang laki-laki. Personil dengan status Pegawai

Negeri Sipil (PNS) berjumlah 11 orang dan yang berstatus honorer berjumlah 7 orang. Personil dengan jenjang pendidikan S2 berjumlah 1 orang, pendidikan S1 berjumlah 5 orang, pendidikan D3 berjumlah 1 orang, pendidikan D2 berjumlah 4 orang, pendidikan SLTA berjumlah 3 orang, pendidikan SPG berjumlah 2 orang, dan pendidikan SD berjumlah 1 orang. Berikut ini diagram yang menggambarkan jenjang pendidikan tenaga kependidikan SDN Semper Timur 05 Pagi.

Gambar 3.3.

Diagram Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan
SDN Semper Timur 05 Pagi



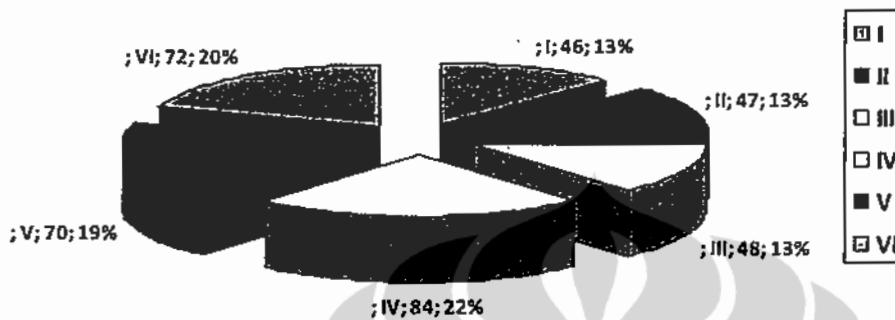
Sumber: Profil Sekolah SDN Semper Timur 05

3.2.4 Kondisi Siswa

Pada tahun ajaran 2008/2009, SDN Semper Timur 05 Pagi Jakarta Utara memiliki 6 kelas, dengan jumlah siswa seluruhnya sebanyak 368 siswa. Berikut ini adalah rincian dari masing-masing kelas, antara lain:

- Kelas I = 46 siswa, 1 rombongan belajar
- Kelas II = 47 siswa, 1 rombongan belajar
- Kelas III = 48 siswa, 1 rombongan belajar
- Kelas IV = 84 siswa, 2 rombongan belajar
- Kelas V = 70 siswa, 2 rombongan belajar
- Kelas VI = 71 siswa, 2 rombongan belajar

Gambar 3. 4.
Diagram Kondisi Siswa
SDN Semper Timur 05 Pagi Jakarta Utara Tahun Ajaran 2008/2009



Sumber: Profil Sekolah SDN Semper Timur 05

Kondisi orang tua murid SDN Semper Timur 05 Pagi memiliki pekerjaan yang beranekaragam, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Data Pekerjaan Orang Tua Siswa
SDN Semper Timur 05 Pagi Tahun Ajaran 2008/2009

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasi
1	Buruh	100	30%
2	Wiraswasta/pedagang	28	8%
3	Karyawan swasta	124	38%
4	Pegawai Negeri Sipil	10	3%
5	TNI/Polri	8	2%
6	Lain-lain	63	19%

Sumber: Profil Sekolah SDN Semper Timur

Berdasarkan tabel diatas, pekerjaan orang tua siswa di dominasi oleh karyawan swasta sebesar 38%, kemudian diurutan kedua buruh sebesar 30%, sisanya

PNS, wiraswasta/pedagang, TNI/polri dan lain-lain. Jika dilihat dari jenis pekerjaan, siswa-siswa SDN Semper Timur 05 pagi sama halnya dengan SDN Kalibaru 01 berasal dari masyarakat kalangan menengah bawah, sehingga permasalahannya pun hampir sama dengan SDN Kalibaru 01 sulit juga mengharapkan perhatian orang tua yang baik bagi pendidikan anak-anak mereka, begitu juga untuk meningkatkan motivasi belajarnya.

3.2.5 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana SDN Semper Timur 05 setiap tahunnya selalu mengalami perubahan. Semuanya itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: faktor lingkungan (rusak karena siswa atau dipinjam masyarakat setempat), faktor alam (rusak karena banjir), donasi (sumbangan dari Dinas Pendidikan, LSM, perusahaan, dll). Data sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7
Data Sarana dan Prasarana
SDN Semper Timur 05

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Gedung	1	Baik
2	Meja tamu	1 set	Baik
3	Meja pimpinan	1 set	Baik
4	Meja guru	9 buah	Baik
5	Kursi guru	10 buah	Baik
6	Lemari piala	1 buah	Baik
7	Filling kabinet	1 buah	Baik
8	Lemari guru	12 buah	Baik
9	Loker	1 buah	Baik
10	Papan kohrt	2 buah	Baik
11	Papan statistik data guru	1 buah	Baik
12	Papan statistik data siswa	1 buah	Baik
13	Papan alat peraga matematika	8 buah	Baik
14	TV	1 buah	Baik

15	VCD player	1 buah	Rusak
16	Komputer kepala sekolah	1 buah	Baik
17	Komputer IPA siswa	1 buah	Rusak
18	Komputer <i>kids smart Little Takes</i>	1 buah	Baik
19	Mesin tik	1 buah	Rusak
20	KIT IPA	4 buah	Tidak lengkap
21	Gitar	1 buah	Rusak
22	Keyboard	1 buah	Baik
23	Angklung	1 set	Rusak
24	Meja siswa	350 buah	Kurang layak
25	Kursi siswa	350 buah	Kurang layak
26	Gambar peraga IPA	34 buah	Kurang layak
27	Atlas	40 buah	Rusak
28	Peta propinsi	12 buah	Rusak
29	Peta wawasan nusantara	2 buah	Rusak
30	Peta dunia	2 buah	Rusak
31	Globe	2 buah	1 Rusak
32	Papan berpaku peraga Matematika	2 buah	Rusak
33	Penampang peraga jam	4 buah	Baik
34	Timbangan badan	1 buah	Rusak
35	Lemari UKS	1 buah	Rusak
36	Kotak obat	1 buah	Baik
37	Baskom pencuci tangan	2 buah	Tidak ada
38	Tempat sampah kelas	12 buah	Baik
39	Tempat sampah besar	8 buah	2 Rusak
40	Bola volly	12 buah	Baik
41	Boal basket	12 buah	Baik
42	Raket buku tangkis	4 buah	Baik
43	Raket mini tenis lapangan	4 buah	baik
44	Bet tenis meja	2 buah	baik
45	Net volly ball	1 buah	baik
46	Net bulu tangkis	1 buah	baik
47	Lemari katalog	1 buah	baik

48	Lemari perpustakaan	4 buah	Rusak
49	Rak majalah	2 buah	Rusak
50	Lemari buku referensi	1 buah	Rusak
51	Buku perpustakaan	720 buah	Rusak
52	Buku tamu perpustakaan/inventaris buku	2 buah	Rusak
53	Buku kunjungan anggota perpustakaan	1 buah	Rusak
54	Buku peminjaman/pengambilan perpustakaan	1 buah	Rusak
55	Bendera merah putih	1 buah	Rusak
56	Perlengkapan upacara	1 set	Baik
57	Alat peraga baca tulis Al-Qur'an	1 set	Baik
58	Sound system	1 set	Baik
59	Recorder	80 buah	Baik
60	Pianika	20 buah	Baik
61	Tanaman	-	Baik
62	Telepon	2 set	1 Rusak
63	Meteran PAM	1 set	Baik
64	Meteran PLN	1 set	Baik

Sumber: Profil Sekolah SDN Semper Timur 05

Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap, dapat memudahkan kepala sekolah dan guru dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Oleh karena itu sarana dan prasarana yang ada haruslah dijaga dan dipelihara agar tahan lama dan tidak mudah rusak. Sarana dan prasarana diperoleh dari dana yang diberikan oleh pemerintah dan orang-orang yang peduli pendidikan di sekitar sekolah. Namun sejauh ini sarana dan prasarana di SDN Semper Timur 05 Pagi sebagian besar sudah dalam keadaan yang kurang layak dikarenakan faktor cuaca yaitu adanya banjir. Sehingga pihak sekolah berusaha untuk mengajukan sarana dan prasarana baru kepada pemerintah terutama media pembelajaran.

3.2.6 Program Sekolah

Program SDN Semper timur 05 pagi direncanakan setiap 1 tahun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing personel sekolah. Program kerja SDN Semer timur 05 Pagi dikategorikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Harian

- Memeriksa daftar hadir guru.
- Memeriksa program pengajaran dan persiapan harian guru.
- Menyelesaikan surat-menyurat dan pekerjaan kantor lainnya.
- Menyelesaikan kasus sekolah.
- Melakukan supervisi harian.

2. Kegiatan Mingguan

- Monitoring pelaksanaan upacara bendera pada hari senen.
- Monitoring pelaksanaan sholat dhuha setiap jumat.
- Monitoring pelaksanaan SKJ setiap sabtu
- Melaksanakan senam sehat "Aku Segar" setiap jumat bersama Kepala Sekolah dan Guru.
- Memeriksa keuangan sekolah.
- Memeriksa kondisi lingkungan sekolah.

3. Kegiatan Bulanan

- Membuat laporan bulanan.
- Membuat laporan TPP.
- Memeriksa administrasi guru.
- Memeriksa pencapaian target kurikulum dan daya serap bulanan.
- Menyelesaikan administrasi Kepala Sekolah.
- Rapat evaluasi bulanan.

4. Kegiatan Semesteran

- Melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- Melaksanakan persiapan ulangan semesteran.
- Memantau hasil ulangan semester.
- Membuat pencapaian target dan daya serap akhir semester.
- Membuat laporan hasil ulangan semester.
- Menyelesaikan buku induksiswa.
- Menyiapkan buku laporan.
- Pembagian raport dan pengarahan kepada orang tua murid.
- Rapat semesteran (evaluasi dan rencana kegiatan semester berikutnya)

5. Kegiatan Awal Tahun Pelajaran

- Menyiapkan formulir pendaftaran siswa baru.
- Pendataan ulang murid-murid di tiap-tiap kelas.
- Pembagian buku administrasi kelas dan keperluan kelas lainnya.
- Membuat SK pembagian tugas mengajar.
- Menyusun program pengajaran.
- Melakukan rapat dinas awal tahun.
- Memantau kegiatan awal bagi kelas I.
- Menyiapkan keperluan sarana kelengkapan.

6. Kegiatan Akhir Tahun

- Penutupan buku keuangan dan administrasi lainnya.
- Menyiapkan keperluan Ujian Sekolah.
- Monitoring pelaksanaan Ujian Sekolah.
- Melaporkan Hasil Ujian Sekolah.
- Menyiapkan pembagian Raport dan Ijazah.
- Mengurus Administrasi Pendaftaran ke SLTP.
- Monitoring pelaksanaan seleksi di SLTP.
- Rapat akhir tahun dengan wali murid kelas VI.
- Rapat Dinas Evaluasi dan rencana akhir tahun pelajaran berikutnya.
- Pelaporan akhir tahun.

3.2.7 Prestasi Sekolah

Prestasi yang telah diraih SDN Semper Timur 05 Pagi dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Data Prestasi SDN Semper Timur 05 Tahun 2003-2007

No.	Prestasi Yang Diraih	Tingkat	Tahun	Keterangan
1	Pekan Seni SD "World Vision"	Kecamatan	2003	Juara Harapan I Seni Lukis
2	Pekan Seni SD	Wilayah	2003	Juara I Solo Vokal
3	Pekan Seni SD	Kecamatan	2004	Juara Harapan I Paduan Suara
4	Pekan Seni SD	Kecamatan	2005	Jura Harapan I Paduan Suara
5	Pekan Seni SD	Kecamatan	2006	Juara II Ansemble Musik
6	Pekan Seni SD	Wilayah	2007	Juara II seni Lukis
7	Pekan Seni SD	Wilayah	2007	Juara II Keterampilan Tangan

Sumber: Profil Sekolah SDN Semper Timur 05

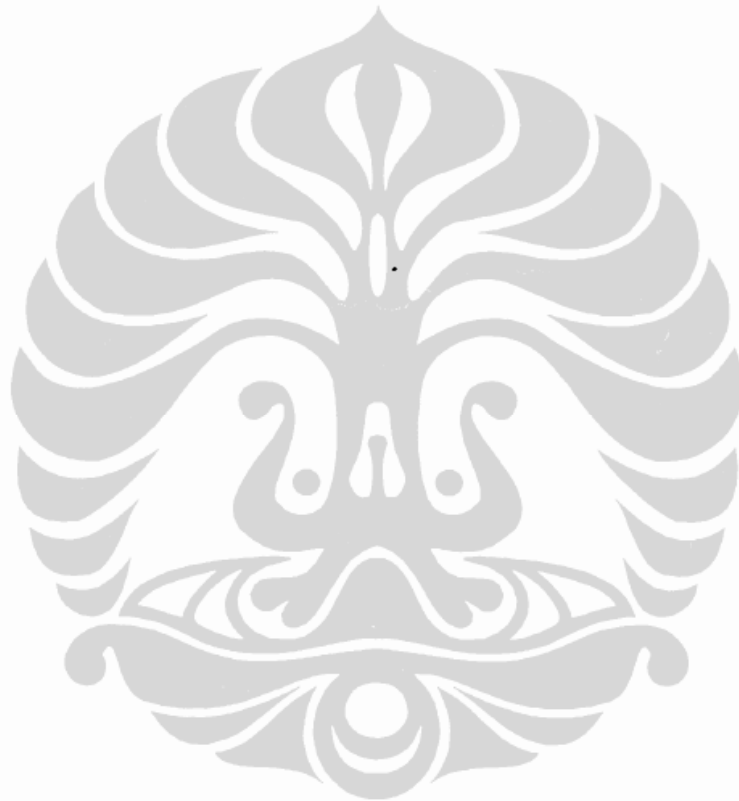
3.2.8 Kegiatan Belajar Mengajar

Sama halnya dengan SDN Kalibaru 01 Pagi, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar SDN Semper Timur 05 Pagi hanya pada waktu pagi hari hingga siang hari dari pukul 07.00WIB-12.00WIB. Untuk anak kelas II karena terdiri dari dua kelas, maka KBM dilakukan secara paralel yang mana setiap seminggu sekali akan bergiliran untuk masuk pagi yaitu jam 07.00 WIB-09.30 WIB, kemudian jam selanjutnya pukul 09.30WIB-12.00WIB .Sedangkan untuk anak kelas VI ada pendalaman materi setelah pulang sekolah untuk mempersiapkan Ujian Akhir Nasional .

Berikut ini adalah materi pelajaran yang diajarkan di SDN Semper Timur 05 Pagi:

1. Pendidikan agama Islam
2. Pendidikan Kewarganegaraan
3. Bahasa Indonesia
4. Matematika
5. Ilmu pengetahuan Alam
6. Ilmu Pengetahuan Sosial
7. SBK
8. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
9. Pendidikan Lingkungan Belajar Jakarta
10. Bahasa Inggris

Pendidikan Lingkungan Belajar Jakarta dan Bahasa Inggris juga merupakan pelajaran muatan lokal. Seluruh kelas di SDN Semper Timur 05 Pagi ini juga sudah melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang disusun oleh para guru di bantu oleh kepala sekolah sebagai pengelola kurikulum serta berpedoman pada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler SDN semper Timur 05 Pagi antara lain : pramuka, menari, dan olahraga. Pada hari Sabtu pelaksanaan KBM hanya di khususkan untuk pelaksanaan ekstrakurikuler dari pukul 07.00-09.30 WIB.



Universitas Indonesia

BAB 4

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Seperti yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini karakteristik informannya adalah Kepala Sekolah dan Guru berasal dari SDN Kalibaru 01 Pagi dan SDN Semper timur 05 Pagi Jakart Utara. Yang menjadi informan berjumlah 8 orang yang terdiri dari Kepala Seksi Kurikulum Dinas pendidikan provinsi, Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta Utara, serta masing-masing sekolah yang diwakili oleh kepala sekolah dan dua orang guru perwakilan dari kelas rendah dan kelas tinggi. Kemudian dilihat dari segi usia mayoritas informan berusia dibawah 50 tahun.

Pengambilan sampel ini di lakukan secara purposif, mendadak dan atas rekomendasi kepala sekolah yang bersangkutan, dalam mengumpulkan datanya peneliti melakukan wawancara secara bergantian dengan informan. Sementara untuk informan dari dinas pendidikan provinsi dan kotamadya masing-masing diwakili oleh Kepala seksi kurikulum. Latar belakang pendidikan informan rata-rata dari perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Status Pendidikan Informan

Nama Sekolah	Informan/ Nara sumber	Pendidikan
SDN Kalibaru 01 Pagi (SDSN)	Kepala Sekolah	S2
	Guru Kelas Rendah	S1
	Guru Kelas Tinggi	S1
SDN Semper Timur 05 Pagi (Reguler)	Kepala Sekolah	S1
	Guru Kelas Rendah	D2
	Guru Kelas Tinggi	D2
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Kepala Seksi Kurikulum	S2
Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta Utara	Kepala Seksi Kurikulum	S2

Sumber: Hasil olahan Peneliti

Pada umumnya kepala sekolah dan guru berpendidikan mulai dari SPG, D2, Sarjana Muda (D3), sarjana (S1) bahkan sampai dengan master (S2), dan status mereka rata-rata pegawai negeri sipil (PNS) hingga pada guru honorer maupun PTT. Berdasarkan hasil penelitian, informan yang diteliti, tingkat pendidikannya adalah sarjana dan master untuk SDN Kalibaru 01 Pagi sebagai SDN Standar Nasional, kecuali untuk sekolah reguler dalam hal ini SDN Semper Timur 05 Pagi yang mana tingkat pendidikan kepala sekolah dan gurunya adalah sarjana dan D2. Sedangkan untuk perwakilan dari Dinas Pendidikan tingkat provinsi dan kotamadya berlatar belakang pendidikan master (S2). Hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil wawancara.

Penelitian ini menjelaskan mengenai analisis implementasi kebijakan pendidikan nasional tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada SDN Kalibaru 01 Pagi dan SDN semper Timur 05 Pagi, keduanya berada di wilayah Jakarta Utara. Analisis disusun berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi maupun observasi langsung kepada informan. Analisis implementasi kebijakan KTSP ini dilakukan dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C Edward III. Adapun dalam hal ini yang akan dianalisis adalah implementasi kebijakan KTSP pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) di kota Jakarta Utara dengan dua karakteristik sekolah yang berbeda, yaitu SDN Kalibaru 01 pagi (SDSN) dan SDN Semper timur 05 pagi (Reguler). Dengan penelitian ini diharapkan yang ingin diwujudkan dalam analisa ini adalah mengetahui apakah implementasi kebijakan KTSP di SDN Kalibaru 01 Pagi dan SDN Semper Timur 05 Pagi memiliki kesesuaian dengan konsep implementasi yang dikemukakan Edward III, berusaha membangun kritik demi mencapai implementasi kebijakan publik yang lebih baik.

Sebelum menganalisis hasil penelitian terlebih dahulu diuraikan tahapan penelitian kualitatifnya pada tahap pertama peneliti telah mengumpulkan data mentah melalui wawancara ,studi dokumentasi terkait kebijakan KTSP, dan observasi langsung, kemudian dirubah dalam bentuk transkrip yaitu bentuk tulisan kemudian dibuat koding setelah dikoding, dibuat kategorisasi data kemudian disimpulkan.

4.1 Implementasi Kebijakan KTSP di SDN Kalibaru 01 pagi Jakarta Utara

4.1.1 Persiapan Implementasi KTSP

Seperti kita ketahui sekolah merupakan suatu lembaga formal yang menciptakan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas. Dengan adanya kebijakan KTSP ini maka sekolah diberikan kesempatan untuk mengatur dan mengelola kurikulum sekolah sesuai dengan potensi peserta didik dan kondisi sekolah itu sendiri serta membutuhkan kreatifitas guru dalam menerapkannya pada pembelajaran. Seperti informasi dari :

- Guru kelas VI

“KTSP merupakan panduan guru untuk pembelajaran di kelas, dimana dalam mengembangkan kurikulum membutuhkan kreatifitas. Di dalam kurikulum tersebut, terdapat standar isi seperti kompetensi dasar dan standar kompetensinya yang harus dicapai oleh siswa”.

Berdasarkan informasi diatas, konsep dari KTSP adalah panduan guru untuk pembelajaran di kelas, yang menuntut guru untuk kreatif dalam mengembangkan Standart Isi dan dan Standar Kelulusan yang sudah ditetapkan pemerintah (Badan Standar Nasional Pendidikan) yang harus dicapai siswa sesuai kondisi siswa dan potensi sekolah.

Persiapan guru dalam melaksanakan KTSP di sekolah dijelaskan oleh informan berikut ini :

- Kepala Sekolah

“Selama saya menjabat Kepala Sekolah di SD ini, baru ada sekali sosialisasi KTSP dari Dinas Kotamadya dan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan). Pembinaan secara khusus juga pernah dilakukan Koordinator Pengawas ditingkat kecamatan. Dengan inisiatif saya sendiri selaku Kepala Sekolah, kami pernah juga mengadakan pembinaan kepada guru-guru dengan mendatangkan nara sumber dari instansi luar seperti : LPMP dan Dinas Propinsi. Sekolah kami pun menggunakan konsultan kurikulum untuk mengembangkan KTSP”.

- Guru Kelas VI

“Sekolah kami pernah ada sosialisasi dari LPMP. Tetapi untuk pembinaan KTSP, pernah dilakukan oleh pengawas sekolah di tingkat kecamatan dan

kami pun pernah mengadakan sendiri dengan mendatangkan nara sumber yang berkompeten. Dalam pelatihan tersebut kami dibina bagaimana cara mengembangkan KTSP, menyusun dokumen-dokumen KTSP, metode-metode pengajaran yang bervariasi maupun penerapannya di kelas”.

Berdasarkan informasi diatas disimpulkan bahwa Kepala Sekolah dan guru-guru telah disiapkan untuk melaksanakan KTSP melalui sosialisasi yang hanya dilakukan sekali saja oleh Dinas Kotamadya dan LPMP sebelum dilaksanakannya KTSP di sekolah. Namun pembinaan dilakukan oleh pengawas sekolah dengan mendatangkan nara sumber yang berkompeten dibidangnya baik dari LPMP maupun pusat kurikulum, bahkan kepala sekolah dengan inisiatifnya terus melakukan pelatihan-pelatihan di sekolah untuk para guru dengan menggunakan jasa konsultan KTSP. Dalam pelatihan-pelatihan tersebut para guru dilatih untuk mengembangkan dokumen KTSP dan mengaplikasikannya di dalam kelas, membahas bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi para guru baik dalam penyusunan administrasi KTSP maupun prakteknya di kelas.

Terkait dengan dokumen-dokumen yang digunakan guru dalam melaksanakan KBM di sekolah dapat diuraikan seperti pernyataan kepala sekolah, guru kelas VI sebagai berikut :

- Kepala Sekolah

“Sebagai kepala sekolah selain memotivasi guru, saya juga ikut mengembangkan dokumen-dokumen KTSP bersama-sama guru-guru saya dibantu dengan jasa konsultan KTSP yang telah kami undang. Sekolah kami memiliki dokumen KTSP lengkap untuk semua kelas seperti silabus, RPP, progress report, analisis soal, KKM, portofolio, progress report, hasil evaluasi siswa ”.

- Guru kelas VI

“Saya sebagai guru kelas VI mempunyai dokumen KTSP yang lengkap dan dikembangkan bersama-sama guru lain. Sedangkan untuk RPP saya selalu buat setiap hari”.

Berdasarkan dari pernyataan diatas, maka dapat diketahui bahwa guru dan kepala sekolah secara bersama-sama mempersiapkan sekaligus mengembangkan dokumen KTSP yang akan digunakan untuk dilaksanakan di kelas agar kegiatan

belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan potensi sekolah. Berdasarkan dari hasil analisis studi dokumentasi terhadap dokumen KTSP yang telah disusun oleh sekolah, akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Dokumen I KTSP

Dokumen I Kurikulum SDN Kalibaru 01 Pagi Jakarta Utara yang telah disusun telah meliputi komponen-komponen KTSP. Komponen-komponen tersebut antara lain: tujuan Pendidikan SDN Kalibaru 01, struktur dan muatan KTSP (meliputi mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global), kalender pendidikan.

o Komponen Tujuan Pendidikan SDN Kalibaru 01 Pagi Jakarta Utara

Berdasarkan hasil analisis studi dokumentasi, tujuan pendidikan SDN Kalibaru 01 Pagi Jakarta Utara yang telah dirumuskan sudah sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan dasar yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan SDN Kalibaru 01 disosialisasikan kepada warga sekolah dan pihak yang berkepentingan.

Visi sekolah yang dirumuskan merupakan cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Visi sekolah memberikan inspirasi dan motivasi pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan, serta dirumuskan dengan bahasa yang mudah diingat, serta disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah.

Misi SDN Kalibaru 01 Pagi memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Misi sekolah merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, menjadi dasar program sekolah, dirumuskan dengan bahasa yang mudah diingat.

- o Struktur dan Muatan Kurikulum SDN Kalibaru 01 Pagi Jakarta Utara.

Struktur kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan sekolah yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah serta mengacu pada Standar Isi, terdapat alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yaitu 35 menit. Kurikulum SDN Kalibaru 01 memuat 8 mata pelajaran (Agama, Matematik, Bahasa Indonesia, SBK, Pendidikan Jasmani, IPA, IPS, Pendidikan Kewarganegaraan) 2 muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah/sekolah serta merupakan muatan lokal yang wajib diambil siswa (Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta, Bahasa Inggris). Pengembangan diri yang terdiri dari ekstrakurikuler wajib (pramuka) dan pilihan (komputer, menari, drumband, olahraga). Pada program pengembangan diri terdapat juga kegiatan pelayanan konseling dan program pembiasaan baik kegiatan rutin, spontan, terprogram, keteladanan. Pengembangan diri dipilih siswa sesuai dengan potensi, minat, dan bakat dan kondisi sekolah.

Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran sudah sesuai dengan Standar Isi yaitu 35 menit. Jumlah jam pembelajaran per minggu 30-32 JP untuk kelas I sampai dengan kelas III dan 36 JP untuk kelas IV sampai dengan kelas VI (berdasarkan Standar Isi 26-28 JP untuk kelas I sampai dengan kelas III dan 32 JP untuk kelas IV sampai dengan kelas VI). Minggu efektif per tahun ajaran 34-36 minggu.

Skor ketuntasan belajar tercantum untuk setiap mata pelajaran. Penentuan ketuntasan belajar diperoleh melalui suatu kajian dengan mempertimbangkan kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas bahan ajar, dan dukungan SDM yang tersedia.

Pada dokumen I kurikulum SDN Kalibaru 01 ini terdapat kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulusan. Kriteria kenaikan kelas SDN Kalibaru 01 antara lain:

- Siswa dinyatakan naik kelas setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada dua semester di kelas yang diikuti.
- Kehadiran dalam tatap muka minimum 85 % (delapan puluh lima persen) dari jumlah Hari Belajar Efektif selama I (satu) tahun pelajaran berjalan.
- Memperoleh nilai minimum baik pada aspek kepribadian.
- Memperoleh nilai minimum sesuai kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) mata pelajaran pada kelas yang diikuti.
- Mata pelajaran yang mendapat nilai di bawah KKM tidak boleh lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah mata pelajaran yang diikuti.
- Nilai rapor diambil dari nilai pengamatan, nilai harian, nilai tugas/PR, nilai tengah semester dan nilai tes akhir semester dijumlahkan untuk mencari nilai rata-rata setiap siswa dalam satu mata pelajaran. Hal ini sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) di SDN Kalibaru 01 Pagi.
- Memiliki rapor di kelasnya masing-masing

Berdasarkan ketentuan PP. 19/2005 Pasal 72 Ayat (1), peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah :

- Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
- Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Lulus Ujian Nasional.

Kriteria kelulusan SDN Kalibaru 01 antara lain:

- Memiliki rapor kelas VI.
- Telah mengikuti ujian sekolah dan memiliki nilai untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, minimal nilai masing-masing mata pelajaran 6,00.

Pendidikan kecakapan hidup SDN Kalibaru 01 terdapat kompetensi pendidikan kecakapan hidup yang diintegrasikan ke mata pelajaran yang ada adalah komputer. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global SDN Kalibaru 01 adalah membuat kerajinan dari lokan (kerang) yang diintegrasikan ke mata pelajaran SBK.

Kalender pendidikan dikeluarkan oleh dinas pendidikan yang telah ditetapkan pada Standar Isi namun disusun oleh masing-masing sekolah. Kalender disusun berdasarkan kebutuhan dan karakteristik sekolah dan masyarakat. Kalender pendidikan di suatu Kabupaten/Kota biasanya berlaku untuk semua Sekolah Dasar yang berada di Kabupaten/Kota tersebut. Berikut ini penetapan kalender pendidikan berdasarkan Standar Isi:

- Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.

Universitas Indonesia

- Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan /atau Menteri Agama dalam hal terkait dengan hari raya keagamaan, Kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus.
- Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan.
- Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen Standar isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah.

b. Dokumen II KTSP

Dokumen II Kurikulum SDN Kalibaru 01 meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Seperti kita ketahui silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran /tema tertentu yang didalamnya mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus haruslah dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan evaluasi hasil belajar, evaluasi proses (pelaksanaan pembelajaran), dan evaluasi rencana pembelajaran. Sedangkan RPP merupakan merupakan penjabaran dari silabus yang akan diimplementasikan di kelas dan dibuat oleh masing-masing guru setiap hari sebelum Kegiatan Belajar Mengajar dimulai. Pada penelitian ini dokumen II KTSP yang diteliti adalah silabus dan RPP pada kelas VI dengan mata pelajaran Matematika.

Berikut ini akan dijabarkan hasil studi analisis studi dokumentasi pada dokumen II KTSP kelas VI:

Silabus kelas I dan kelas VI disusun oleh guru yang mengajar dibantu konsultan Kurikulum. Didalam silabus tersebut telah meliputi identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. SK dan KD sudah sesuai dengan rumusan yang ada di Standar isi. Antara SK dan KD ada saling keterkaitan. Ada kesesuaian antara KD dengan komponen silabus lainnya (materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar).

Materi pembelajaran dalam silabus selaras dengan KD/ mendukung pencapaian KD dan bermanfaat bagi peserta didik. Materi pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik daerah.

Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan dalam silabus sudah memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran memuat aktivitas belajar yang berpusat pada siswa. Urutan kegiatan pembelajaran sesuai dengan hirarki konsep materi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran juga mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa.

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dalam silabus telah sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Indikator dirumuskan menggunakan kata-kata operasional yang dapat diukur dan diamati. Setiap KD dikembangkan menjadi lebih dari satu indikator. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisa, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar

Universitas Indonesia

siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. yang digunakan menggunakan berbagai teknik penilaian. Pada silabus kelas I dan kelas VI di SDN Kalibaru 01 ini teknik penilaian yang digunakan bervariasi seperti tes baik lisan maupun tulisan, observasi, penugasan perorangan yang diberikan hampir setiap hari maupun penugasan kelompok. Teknik-teknik penilaian tersebut tentu saja dipilih sesuai dengan tuntutan indikator.

Alokasi waktu sesuai dengan cakupan kompetensi dan program semester yang telah disusun. Sumber belajar yang digunakan bervariasi dan berdasarkan pada materi ajar dan kegiatan pembelajaran.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dianalisis di kelas VI disusun oleh masing-masing guru setiap hari sebelum mengajar yang sebelumnya ditandatangani kepala sekolah. RPP yang disusun untuk setiap KD dapat dilaksanakan dalam satu kali atau lebih pertemuan. Dalam RPP memuat komponen RPP seperti identitas mata pelajaran, SK, KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran (meliputi pendahuluan, inti, penutup), penilaian hasil belajar dan sumber belajar. Identitas mata pelajaran telah mencakup satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran (kelas I), dan jumlah pertemuan. SK, KD dan indikator dikutip dari silabus. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Alokasi waktu sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Metode pembelajaran yang

digunakan cukup bervariasi sesuai dengan kondisi peserta didik. Untuk kelas I dan kelas III SD metode yang digunakan melalui pendekatan pembelajaran tematik. Kegiatan pembelajaran telah meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar telah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Sumber belajar ditentukan berdasarkan pada SK, KD, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

4.1.2 Implementasi KTSP dalam Pembelajaran

Setelah sekolah melakukan kegiatan persiapan terhadap KTSP, maka kegiatan selanjutnya adalah penerapan KTSP dalam pembelajaran dikelas oleh guru. Seperti diuraikan dari pernyataan kepala sekolah, guru kelas VI berikut ini:

- Kepala sekolah
“Menurut saya guru-guru telah mampu mengaplikasikan RPP ke dalam KBM. Gur-guru sudah dapat melaksanakan pembelajaran yang PAKEM (Pembelajaran Aktif Kreatif dan menyenangkan). Metode pembelajarannya bervariasi seperti diskusi, kerja kelompok, tatap mukapun masih digunakan oleh para guru, penggunaan LCD. Dengan kegiatan pembelajaran yang bervariasi itu membuat siswa antusias dan senang mengingat KTSP ini benar-benar memperhatikan potensi siswa dan para gurunya menjadi lebih kreatif dan variatif dalam mengajar”.
- Guru Kelas VI
“Menurut saya kegiatan pembelajaran di kelas saya sudah sesuai dengan KTSP bahkan saking keasikannya mengajar, sampai lupa waktu kalau sudah waktunya jam pulang. Dengan adanya KTSP ini saya kan dituntut untuk kreatif dalam mengajar sehingga siswa lebih antusias dalam belajar. Saya juga media pembelajaran yang bervariasi seperti laptop, gambar, kliping koran, majalah, buku pelajaran bahkan internet.

Selain itu saya juga menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi, demonstrasi, wawancara, ceramah, unjuk kerja disesuaikan dengan SK dan KD. Peranan saya didalam kelas juga sebagai motivator dan fasilitator siswa”.

Berdasarkan dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan sementara bahwa di SDN Kalibaru 01 telah menerapkan KTSP dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Silabus dan RPP yang telah dibuat diaplikasikan dalam KBM. Dengan adanya KTSP ini juga membuat siswa makin asik di kelas dan terlihat antusias dalam belajar.

Guna melengkapi data yang ada, peneliti melakukan observasi kelas, observasi ini berguna untuk mengetahui secara langsung mengenai pelaksanaan KTSP di kelas. Secara sampel peneliti mengobservasi kelas VI. Penjabaran dari hasil observasi dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Siswa kelas VI berjumlah 57 murid dengan jumlah guru 1 orang dalam satu kelas.
- b. Pengaturan posisi duduk diatur secara tatap muka menghadap ke papan tulis. Diatur menjadi empat baris. Namun juga kadang-kadang diatur dalam bentuk berkelompok sewaktu-waktu. Dinding-dinding kelas dipajang display-display hasil kerja siswa dan map-map berisi portofolio siswa.
- c. Kegiatan pembelajaran berlangsung dengan tertib. Pelajaran pertama adalah Matematika. Pembelajaran diawali dengan penjelasan guru yang mengingatkan kembali pelajaran yang lalu. Kemudian guru memberikan penjelasan tentang pecahan dengan menggunakan media berupa gambar dan kit Matematika. Sumber belajar yang digunakan adalah buku pelajaran. Gurupun menggunakan laptop dalam mengajarkan materi. Siswa terlihat begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Lalu guru memberikan sebuah kasus soal cerita dengan mencongak (lisan) siswa pun mendengarkannya dengan seksama, kemudian guru melemparkan pertanyaan kepada siswa. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menjelaskannya didepan kelas. Bagi siswa yang berhasil menjawab mendapatkan pujian dari sang guru. Lalu guru memberikan tugas berupa soal cerita. Seluruh siswa pun

dengan begitu tenangnya mengerjakan tugas perorangan. Dan bagi siswa yang telah selesai mengerjakannya ditawarkan guru untuk menjelaskannya di depan kelas. Ternyata siswa begitu bersemangat untuk menjawab soal-soal tersebut, siswa begitu antusias untuk mengacungkan tangan agar mendapatkan kesempatan untuk menjawab soal di depan kelas. Meskipun demikian tetap saja ada beberapa siswa yang tertinggal dalam mengerjakan soal karena kesulitan menerima pelajaran. Gurupun memberikan remedial pada siswa-siswa yang tertinggal atau yang mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran setelah pulang sekolah. Khusus untuk siswa kelas VI, karena untuk mempersiapkan UASBN, setiap harinya setelah pulang sekolah siswa mendapatkan pelajaran tambahan.

- d. Dalam kegiatan KBM, guru memang pada saat itu lebih dominan menggunakan metode mengajar ceramah, namun demikian, metode lain yang digunakan adalah demonstrasi.

4.1.3 Hambatan dalam Implementasi KTSP

Seperti kita ketahui sebelumnya SDN Kalibaru 01 merupakan sekolah dasar yang telah memenuhi standar nasional, dalam arti manajemen dan ketersediaan sarana dan prasarannya maupun tenaga kependidikannya telah berstandar nasional. Namun demikian bukan berarti sekolah ini tidak mendapatkan hambatan dalam mengimplementasikan KTSP ini.

Hambatan yang dihadapi oleh SDN Kalibaru 01 seperti masih kurangnya dana untuk mengimplementasikan KTSP ini, terutama dana untuk terus melakukan pelatihan-pelatihan KTSP untuk para guru, dana untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Guru terkadang masih sulit mendapatkan bahan-bahan pembelajaran yang setiap waktu harus berubah dan disesuaikan dengan pelajaran, sehingga untuk mencari bahan pembelajaran saja membutuhkan waktu. Hambatan lainnya adalah pada saat guru yang menghadapi kemampuan siswa yang lambat maupun kurang dalam menerima pelajaran. Hal tersebut membuat guru harus benar-benar mencari cara yang tepat untuk menangani siswa-siswa

tersebut. Namun demikian pihak sekolah sendiri terus berupaya meminimalisasi hambatan yang dihadapi tersebut agar pelaksanaan KTSP dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan tujuan pendidikan.

4.2 Implementasi Kebijakan KTSP di SDN Semper Timur 05 Pagi Jakarta Utara

4.2.1 Persiapan Implementasi KTSP

SDN Semper Timur 05 Pagi Jakarta Utara berkategori sekolah reguler atau sekolah biasa yang memiliki segala keterbatasan seperti sarana dan prasarannya. Berikut ini penjabaran dari guru kelas VI terkait tentang konsep KTSP dari :

- Guru kelas VI

“KTSP merupakan batasan-batasan guru untuk mengajar yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing sekolah yang memerlukan kreatifitas guru untuk mengajar. KTSP ini dalam satu semester per mata pelajaran terdiri dari kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa”.

Jika dibandingkan dengan konsep KTSP berdasarkan panduan dari BSNP dan beberapa ahli, konsep yang diberikan oleh guru kelas VI tidak berbeda jauh dari yang telah yang dijabarkan pada panduan penyusunan KTSP. Seperti yang telah diuraikan pada bab II KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing tingkat satuan pendidikan. Konsep yang diberikan oleh guru kelas VI lebih kepada hal teknisnya dilapangan yang menuntut guru untuk lebih berkreaitif dan inovatif dalam pelaksanaan KTSP pada pembelajaran.

Persiapan guru dalam melaksanakan KTSP di sekolah dijelaskan oleh informan berikut ini :

- Kepala Sekolah

“Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah di SD ini belum ada yang memberikan sosialisasi secara khusus dan langsung baik untuk

kepala sekolah maupun guru. Bahkan dari Dinas Kotamadya secara langsung belum juga. Tapi saya tidak tahu saat kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya. Yang pasti pada saat ini belum ada. Baru hanya suku dinas saja yaitu melalui pengawas saja informasinya”.

- Guru Kelas VI

“Saya sih secara pribadi belum pernah mengikuti sosialisasi. Hanya beberapa guru saja yang pernah mengikuti sosialisasi tersebut. Paling saya hanya mencari-cari sendiri dan bertanya kepada teman-teman yang pernah mengikuti sosialisasi sebelumnya. Pelatihan KTSP juga saya belum pernah sekalipun mengikutinya”.

Berdasarkan informasi di atas disimpulkan bahwa Kepala Sekolah dan guru-guru belum disiapkan untuk melaksanakan KTSP melalui sosialisasi maupun pelatihan KTSP secara merata. Pengawas sekolah hanya sekali saja melakukan sosialisasi KTSP itupun tidak semua guru yang mengikutinya.

Terkait dengan dokumen-dokumen yang digunakan guru dalam melaksanakan KBM di sekolah dapat diuraikan seperti pernyataan kepala sekolah, guru kelas VI sebagai berikut :

- Kepala Sekolah

“Sebagai kepala sekolah saya juga ikut terjun langsung dalam mengembangkan dokumen-dokumen KTSP bersama-sama guru-guru saya”.

- Guru Kelas VI

“Saya sebagai guru kelas VI mempunyai dokumen KTSP tapi tidak terlalu lengkap seperti silabus, RPP sih kita punya. Itupun kita harus usaha sendiri untuk mendapatkannya . RPP kita cari sendiri dari penerbit. Silabus dari sekolah itupun dari penerbit juga kita beli. Itupun komponen-komponen KTSP yang ada hanya Indikator, kompetensi dasar, materi, evaluasi, sumber belajar.”

Berdasarkan dari pernyataan diatas, maka dapat diketahui bahwa para guru dan kepala sekolah dengan segala keterbatasan pengetahuan tentang KTSP secara bersama-sama mempersiapkan sekaligus mengembangkan dokumen KTSP yang akan digunakan untuk dilaksanakan di kelas. Berdasarkan dari hasil analisis studi

dokumentasi terhadap dokumen KTSP yang telah disusun oleh sekolah, akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Dokumen I KTSP

Dokumen I Kurikulum SDN Semper Timur 05 Pagi Jakarta Utara yang telah disusun telah meliputi komponen-komponen KTSP antara lain: tujuan Pendidikan SDN Semper Timur 05 Pagi, struktur dan muatan KTSP (meliputi mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global), kalender pendidikan. Peneliti menemukan bahwa dokumen KTSP yang ada belum mengalami revisi. Dokumen yang ada merupakan dokumen KTSP untuk tahun ajaran 2006.

o Komponen Tujuan Pendidikan SDN Semper timur 05 Pagi Jakarta Utara

Berdasarkan hasil analisis studi dokumentasi, tujuan pendidikan SDN Semper Timur 05 Pagi Jakarta Utara yang telah dirumuskan sudah sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan dasar yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan SDN Semper Timur 05 ini juga disosialisasikan kepada warga sekolah dan pihak yang berkepentingan.

Visi sekolah yang dirumuskan sudah merupakan cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Visi sekolah juga memberikan inspirasi dan motivasi pada warga sekolah dan segenap pihak yang

berkepentingan, dirumuskan dengan bahasa yang mudah diingat, serta disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah.

Misi SDN Semper Timur 05 ini juga memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, Misi sekolah merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, menjadi dasar program sekolah, dirumuskan dengan bahasa yang mudah diingat.

o Struktur dan Muatan Kurikulum SDN Semper timur 05

Meskipun dokumen KTSP yang digunakan belum mengalami revisi untuk tahun ajaran 2008/2009 namun Struktur kurikulum yang disusun tidak mengalami perubahan yaitu berdasarkan kebutuhan sekolah yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah serta mengacu pada Standar Isi. Struktur kurikulum terdapat alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yaitu 35 menit, kurikulum SDN Semper Timur 05 memuat 8 mata pelajaran (Agama, Matematik, Bahasa Indonesia, SBK, Pendidikan Jasmani, IPA, IPS, Pendidikan Kewarganegaraan) 2 muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah/sekolah serta merupakan muatan lokal yang wajib diambil siswa (Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta, Bahasa Inggris), pengembangan diri yang terdiri dari ekstrakurikuler wajib (pramuka) dan pilihan (pencak silat dan menari). Pengembangan diri dipilih siswa sesuai dengan potensi, minat, dan bakat dan kondisi sekolah.

Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran sudah sesuai dengan Standar Isi yaitu 35 menit. Jumlah jam pembelajaran per minggu 30-32 JP untuk kelas I sampai dengan kelas III dan 36 JP untuk kelas IV sampai dengan kelas VI (berdasarkan Standar Isi 26-28 JP untuk kelas I sampai dengan kelas III dan 32 JP untuk kelas IV sampai dengan kelas VI). Minggu efektif per tahun ajaran 34-36 minggu.

Skor ketuntasan belajar tidak tercantum dalam dokumen I KTSP. Berdasarkan informasi yang diperoleh skor ketuntasan belajar dipegang oleh masing-masing guru kelas yang diperoleh diperoleh melalui suatu kajian dengan mempertimbangkan kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas bahan ajar, dan dukungan SDM yang tersedia. Pada dokumen I kurikulum SDN Semper timur 05 ini juga tidak terdapat kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulusan.

SDN Semper Timur 05 tidak ada pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global ada namun diintegrasikan kedalam mata pelajaran muatan lokal seperti Bahasa Inggris dan Kesenian Jakarta.

Kalender pendidikan yang terdapat dalam dokumen I KTSP belum mengalami revisi. Namun demikian pada prinsipnya sama dengan SDN Kalibaru 01 yang memang berada pada wilayah kota yang sama yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan yang telah ditetapkan pada Standar Isi namun disusun oleh masing-masing sekolah.

b. Dokumen II KTSP

Dokumen II Kurikulum SDN Semper Timur 05 meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Berikut ini akan dijabarkan hasil studi analisis studi dokumentasi pada dokumen II KTSP di kelas VI:

Berdasarkan hasil studi dokumentasi silabus kelas VI, silabus yang ada merupakan silabus yang sudah jadi dari penerbit. Guru tinggal menyesuaikan saja dengan materi pelajaran yang akan disampaikan di kelas. Hal tersebut membuat guru tidak kreatif dalam pembelajaran karena guru tidak menyusun sendiri silabus yang ada.

Didalam silabus kelas VI dari penerbit ini telah meliputi identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), materi pembelajaran, pengalaman belajar, penilaian yang kosong, alokasi waktu, sumber belajar yang kosong, dan indikator pencapaian kompetensi. SK dan KD sudah sesuai dengan rumusan yang ada di Standar isi. Antara SK dan KD ada saling keterkaitan. Ada kesesuaian antara KD dengan komponen silabus lainnya (materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, alokasi waktu). Kesesuaian dengan penilaian dan sumber belajar tidak dapat di analisis oleh peneliti karena tidak tertulis dalam silabus. Namun berdasarkan informasi dari sang guru teknik penilaian yang digunakan lebih banyak menggunakan tes tertulis dan tugas perorangan saja, sumber belajarnya pun lebih banyak menggunakan buku pelajaran dan LKS karena ketidakterediaan sumber belajar yang lengkap.

Materi pembelajaran dalam silabus selaras dengan KD/mendukung pencapaian KD dan bermanfaat bagi peserta didik. Materi pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik daerah.

Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan dalam silabus sudah memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran memuat aktivitas belajar yang berpusat pada siswa. Urutan kegiatan pembelajaran sesuai dengan hirarki konsep materi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran juga mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa.

Indikator dirumuskan menggunakan kata-kata operasional yang dapat diukur dan diamati. Setiap KD dikembangkan menjadi lebih dari satu indikator. Alokasi waktu sesuai dengan cakupan kompetensi dan program semester yang telah disusun.

Sama halnya dengan silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dianalisis di kelas VI juga berasal dari penerbit. Sehingga guru

tinggal menggunakannya untuk mengajar. RPP yang disusun oleh penerbit sudah sesuai untuk setiap KD dapat dilaksanakan dalam satu kali atau lebih pertemuan. Dalam RPP memuat komponen RPP seperti identitas mata pelajaran, SK, KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran (meliputi pendahuluan, inti, penutup), penilaian hasil belajar dan sumber belajar. Untuk identitas mata pelajaran telah mencakup satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. SK, KD dan indikator dikutip dari silabus. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Alokasi waktu sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Metode pembelajaran yang digunakan di kelas VI pun cenderung ke metode ceramah. Untuk kelas VI SD metode yang digunakan melalui pendekatan pembelajaran mata pelajaran. Kegiatan pembelajaran telah meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar telah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Sumber belajar ditentukan berdasarkan pada SK, KD, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

4.2.2. Implementasi KTSP dalam Pembelajaran

Setelah sekolah melakukan kegiatan persiapan terhadap KTSP, maka kegiatan selanjutnya adalah penerapan KTSP dalam pembelajaran dikelas oleh guru. Seperti diuraikan dari pernyataan kepala sekolah, guru kelas VI berikut ini:

- Kepala Sekolah

“Menurut saya guru-guru saya bisa mengaplikasikan RPP ke dalam KBM meskipun tidak sempurna. Ada juga beberapa guru yang menggunakan metode pembelajaran yang variatif, ya meskipun tidak semua sih. Dan itu membuat anak lebih antusias dalam belajar”

- Guru Kelas VI

“ Menurut saya kegiatan pembelajaran di kelas saya Ya sudah sesuai dengan KTSP, tapi namanya manusia kan ga luput dari kekurangan, jadi menurut saya sih masih jauh dari sempurna, kita hanya bisa mencari-cari melalui penerbit mana yang buku pelajarannya sudah sesuai atau yang mendekati dengan KTSP. Keterbatasan media pembelajaran membuat saya kesulitan untuk menerapkan KTSP di kelas. Metode ceramah pun lebih sering saya pergunakan untuk mengajar. Peranan saya di kelas ya sebagai guru kelas VI yang membidangi 6 bidang studi”.

Berdasarkan dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan sementara bahwa meskipun dengan segala keterbatasan yang ada, karena sudah merupakan kebijakan pemerintah maka di SDN Semper Timur 05 telah menerapkan KTSP dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Silabus dan RPP yang telah ada diaplikasikan dalam KBM. Dengan adanya KTSP ini juga membuat siswa terlihat antusias dalam belajar.

Guna melengkapi data yang ada, peneliti melakukan observasi kelas, observasi ini berguna untuk mengetahui secara langsung mengenai pelaksanaan KTSP di kelas. Peneliti mengobservasi kelas VI. Penjabaran dari hasil observasi dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Siswa kelas VI berjumlah 72 dibagi menjadi 2 rombongan belajar dengan masing-masing kelas di bimbing oleh 1 orang guru.
- b. Pengaturan posisi duduk diatur secara tatap muka menghadap ke papan tulis. Diatur menjadi empat baris.
- c. Kegiatan pembelajaran berlangsung dengan tertib. Diawali dengan salam, doa dan absen. Pelajaran pertama adalah Matematika

dengan materi pelajaran operasi hitung bilangan bulat. Kegiatan pembuka dilakukan guru dengan memberikan kuis untuk mengamati beberapa operasi hitung bilangan. Kemudian guru memberikan penjelasan tentang operasi bilangan hitung. Sumber belajar yang digunakan adalah buku pelajaran. Lalu guru memberikan soal kepada siswa secara perorangan. Sambil menunggu siswa yang selesai gurupun berkeliling ke siswa untuk mengecek sejauh mana siswa dapat menyelesaikannya. Setelah waktu habis, guru pun menawarkan bagi siswa yang telah selesai untuk menjawab soal dengan menuliskannya ke papan tulis. Bagi siswa yang berhasil menjawab mendapatkan pujian dari sang guru. Seluruh siswapun dengan begitu tenangnya mengerjakan tugas perorangan. Dari hasil soal yang telah dikerjakan ternyata masih banyak siswa yang belum memahami betul tentang materi tersebut. Lalu guru pun menjelaskan untuk yang kedua kalinya. Dalam KBM tampak siswa kurang begitu antusias. KBM ditutup dengan memberikan tugas rumah kepada siswa. Di SDN Semper Timur 05 ini pun untuk menghadapi persiapan UASBN. Kelas VI diberi pelajaran tambahan setelah pulang sekolah.

- d. Dalam kegiatan KBM, guru lebih dominan menggunakan metode mengajar ceramah, tanya jawab, tugas perorangan.

4.2.2 Hambatan dalam Implementasi KTSP

Di SDN Semper Timur 05 yang merupakan sekolah kategori reguler ini memiliki hambatan-hambatan yang cukup banyak dalam mengimplementasikan KTSP. Hambatan-hambatan tersebut antara lain: pemahaman guru tentang KTSP yang minim, keterbatasan sarana dan prasarana, media pembelajaran yang minim, kurangnya dukungan dana, kurangnya bimbingan dan motivasi kepala sekolah kepada guru dalam mengimplementasikan KTSP, kurangnya kreatifitas dan keinginan guru dalam melakukan perubahan dalam hal cara mengajar dan

penerapan dokumen KTSP ke dalam kegiatan KBM, kurangnya pengembangan kurikulum, dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Namun demikian dengan segala potensi yang ada harus terus berupaya untuk mengimplementasikan KTSP meskipun masih jauh dari sempurna.

4.3 Variabel Komunikasi

Implementasi suatu kebijakan yang efektif ditentukan oleh kejelasan, ketepatan, dan konsistensi dalam mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada pelaksana kebijakan. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya secara teori komunikasi kebijakan mempunyai tiga dimensi, antara lain dimensi transmisi, dimensi kejelasan dan dimensi konsistensi. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan yang telah dibuat tidak hanya disampaikan kepada para pelaksana kebijakan saja, melainkan harus disampaikan juga kepada pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*) baik langsung maupun tidak langsung. Para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang akan dilakukan agar implementasi kebijakan menjadi efektif. Segala keputusan dari kebijakan harus diteruskan kepada personel yang tepat sebelum keputusan tersebut dapat dilaksanakan. Komunikasi haruslah dilakukan secara akurat dan dapat dimengerti dengan baik oleh para pelaksana.

Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana dan pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga pihak-pihak tersebut dapat mengetahui dan memahami maksud dari isi/konsep, maksud dan tujuan, pelaksanaan serta waktu pelaksanaan dari kebijakan publik. Petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami tetapi juga harus jelas. Perintah-perintah yang diteruskan kepada para pelaksana harus jelas dan menentukan kapan atau bagaimana program dilaksanakan sehingga tujuan kebijakan tercapai secara lebih efektif.

Pada dimensi yang ketiga yaitu adanya konsistensi. Suatu kebijakan akan berjalan efektif jika perintah implementasinya konsisten. Konsistensi dalam

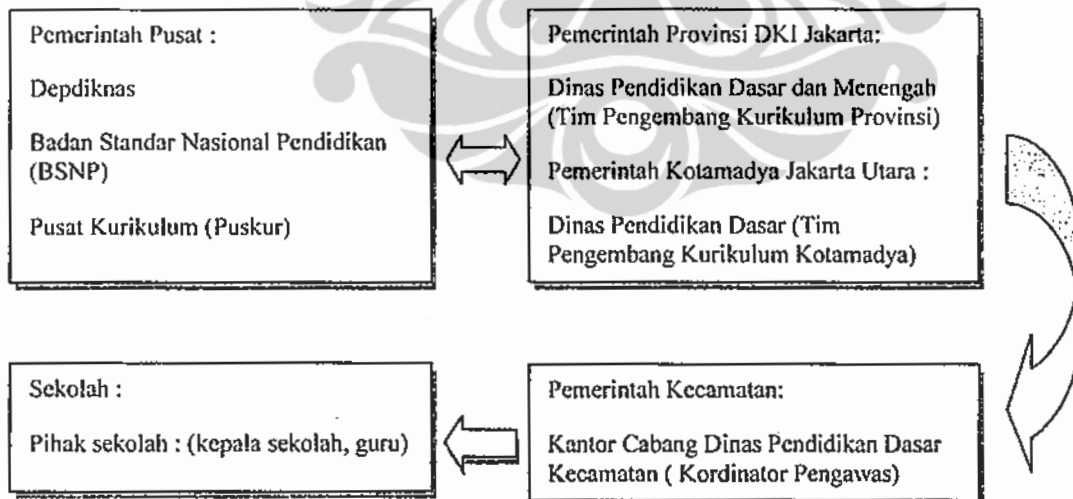
mengkomunikasikan kebijakan ini terkait dengan sikap, persepsi maupun respon para pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar petunjuk pelaksanaannya. Jika suatu kebijakan yang disampaikan kepada para implementor mempunyai unsur kejelasan, tetapi kebijakan tersebut bertentangan maka kebijakan itu tidak memudahkan para pelaksana menjalankan tugasnya dengan baik.

Implementasi kebijakan KTSP ini di buat oleh pemerintah, yaitu Departemen Pendidikan Nasional dalam hal ini Badan Standar Nasional Pendidikan dan Pusat Kurikulum. Dengan bantuan jajaran dibawahnya termasuk dinas pendidikan dasar dan menengah tingkat propinsi, dinas pendidikan dasar kota Jakarta Utara serta kantor cabang dinas pendidikan kecamatan yang menyampaikan langsung ke sekolah sebagai pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan adalah kepala sekolah dan guru di SDN Kalibaru 01 dan SDN Semper Timur 05. Sedangkan obyek sasarannya adalah siswa.

Dalam penelitian ini ditemukan alur komunikasi antara beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan KTSP ini adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1

Alur Komunikasi Kebijakan KTSP



Sumber : Olahan peneliti

Berdasarkan bagan diatas menunjukan bahwa komunikasi antara pembuat kebijakan KTSP ini yakni Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Pusat

Kurikulum dengan pelaksana kebijakan KTSP yaitu pihak sekolah antara lain kepala sekolah dan guru tidak terjadi komunikasi secara langsung. Pemerintah Pusat melakukan komunikasi pertama dengan jajaran dibawahnya yaitu Dinas Pendidikan dasar Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota Jakarta Utara secara dua arah (timbang balik). Komunikasi yang dilakukan berupa sosialisasi maupun workshop/pembinaan yang biasa dilakukan pada awal tahun ajaran baru. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi bersama Dinas Pendidikan Kotamadya membuat suatu sistem regulasi dengan membentuk tim pengembang kurikulum tingkat provinsi dan tingkat kotamadya Jakarta Utara. Kemudian tim pengembang kurikulum provinsi yang tentu saja dibantu oleh tim pengembang kurikulum kotamadya melakukan komunikasi kedua dengan kantor cabang Dinas Pendidikan Kecamatan yaitu para kordinator pengawas. Yang mana para kordinator pengawas ini membawahi para pengawas dari berbagai kecamatan. Kemudian selanjutnya para kordinator pengawas itulah yang mengkomunikasikan kepada para pengawas di kecamatan-kecamatan dan mengkomunikasikan langsung ke sekolah-sekolah berdasarkan masing-masing gugus wilayah yang menjadi wewenang mereka. Pembuat kebijakan dalam mengkomunikasikan kebijakan yang dibuatnya kepada pelaksana kebijakan dilakukan secara tidak langsung, sehingga kemungkinan dapat terjadi distorsi pesan. Karena ketika para pembuat kebijakan ini dalam mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada jajaran dibawahnya antara lain dinas pendidikan provinsi maupun dinas pendidikan kotamadya, kemungkinan terjadi persepsi atau respon jajaran dibawahnya itu dalam memahami petunjuk pelaksanaannya terjadi ketidakjelasan. Dengan demikian penerimaan para pelaksana kebijakannya pun dalam menerjemah kebijakan tersebut akan mengalami ketidakjelasan juga maupun ketidakpahaman. Oleh karena itu komunikasi yang ketiga ini antara pengawas dengan pihak sekolah yaitu kepala sekolah dan guru selaku pelaksana kebijakan berpotensi mengalami kegagalan yang cukup besar dalam menyampaikan kebijakan tersebut. Sehingga dilapanganpun terjadi bias dan mengalami hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan KTSP ini. Jika demikian implementasi kebijakan tersebut tidak efektif.

Dilihat dari dimensi transmisi 'penyampaian', dalam menyampaikan pesan kebijakan, pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan tidak secara langsung memberikan sosialisasi maupun pembinaan kepada pihak sekolah sebagai pelaksana kebijakan. Sosialisasi kebijakan diberikan kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kota/kabupaten. Kemudian mereka saling mengkoordinasikan dan bekerjasama untuk mentransformasikannya kepada dinas pendidikan kecamatan, yang selanjutnya oleh dinas kecamatan ditransformasikan langsung kepada pihak sekolah. Pemerintah pusat hanya mengkomunikasikan ke sekolah melalui surat edaran maupun petunjuk teknis penyusunan KTSP ini. Penyampaian informasi tentang kebijakan KTSP-ini melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi, dengan demikian birokrasi dan struktur yang ketat dan cenderung hirarki akan mempengaruhi tingkat efektifitas komunikasi yang dijalankan.

Dilihat dari dimensi kejelasan, komunikasi yang telah dilakukan baik oleh pihak pembuat kebijakan kepada jajaran aparat dibawahnya sudah cukup jelas, dinas pendidikan provinsi dan kotamadya yang telah mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan KTSP ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang kemudian meneruskan kepada para pengawas lalu para pengawas mengkomunikasikan langsung kepada pihak pelaksana kebijakan (pihak sekolah). Instruksi-instruksi dari pemerintah pusat tentang kapan dan bagaimana implementasi KTSP ini dilaksanakan dikomunikasikan dengan baik oleh para pengawas kepada pihak sekolah, begitupun secara tidak langsung melalui surat edaran maupun Pedoman-pedoman penyusunan yang dibuat oleh BSNP sudah cukup jelas. Dengan demikian komunikasi antar organisasi berjalan dengan baik, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.

Dimensi yang ketiga yang mempengaruhi komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Penyampaian pesan kebijakan KTSP ini telah dilakukan secara konsisten tanpa mengalami perubahan apapun sesuai dengan pedoman yang telah dibuat oleh BSNP. Berkaitan dengan hubungan antara organisasi terdapat dua aktivitas implementasi yang bisa dibentuk, yaitu: nasihat dan bantuan teknis yang diberikan oleh pejabat tingkat atas, serta pemberian sanksi oleh pejabat tingkat atas. Pejabat tingkat atas juga memberikan nasihat untuk memperlancar

implementasi kebijakan KTSP, melalui aktivitas suatu rapat yang dilakukan sebulan sekali atau sesuai permasalahan yang terjadi dilapangan. Bagi para pelaksana kebijakan dalam hal ini kepala sekolah dan guru yang melanggar ketentuan atau peraturan implementasi akan mendapatkan sanksi yang dapat berupa surat peringatan, hingga mutasi.

4.4 Variabel Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya manusia maupun non-manusia meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila pelaksana kekurangan atau tidak didukung oleh sumber daya maka implementasi tidak akan efektif. Menurut Edward III yang dimaksud dengan sumber daya adalah hal-hal yang meliputi staf, informasi, kewenangan, pembiayaan dan sarana prasarana. Hinder Berdasarkan dari hasil wawancara dilapangan bahwa sumber daya pendukung bagi implementasi kebijakan KTSP ini secara umum masih kurang. Seperti yang dinyatakan oleh kepala seksi kurikulum tingkat provinsi bahwa baik terkait dengan staf pelaksana kebijakan KTSP ini, pembiayaan dan sarana prasarana masih minim. Hal inipun didukung dengan pernyataan kepala seksi kurikulum tingkat kotamadya Jakarta Utara bahwa sumber-sumber pendukung bagi implementasi kebijakan KTSP ini masih kurang.

Terkait dengan kemampuan staf (guru) dalam melaksanakan kebijakan KTSP ini masih terbatas. Setiap sekolah memiliki sumber daya manusia yang berbeda sehingga dalam menerjemahkan KTSPpun berbeda-beda. Untuk SDN Kalibaru 01 jumlah guru dalam menjalankan kebijakan ini cukup memadai, begitu juga kemampuan guru dalam menterjemahkan KTSP cukup memadai. Para guru di SDN Kalibaru 01 sebagian besar berlatar belakang pendidikan sarjana S1 sebesar 11 % yaitu 11 orang dari total jumlah guru sebanyak 15 orang, dilanjutkan dengan D3 sebanyak 4 orang hal tersebut juga yang mempengaruhi pemahaman para guru dalam menerjemahkan KTSP. Disamping itu kepala sekolah SDN Kalibaru 01 sangat *concern* terhadap kemampuan para guru dengan selalu mengadakan pelatihan-pelatihan KTSP untuk para gurunya di tingkat sekolah dengan mendatangkan nara sumber-nara sumber yang berkompeten dari

luar baik Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) maupun Pusat Kurikulum (Puskur).

Begitupun SDN Semper Timur 05, jumlah guru yang menjalankan KTSP ini sudah memadai, namun kemampuan para gurunya dalam mengimplementasikan KTSP masih kurang. Berdasarkan pernyataan kepala sekolah semper Timur 05 bahwa para guru kurang memahami dalam menterjemahkan KTSP. Hal itupun dipengaruhi latar belakang pendidikan guru yang mana dari jumlah total guru sebanyak 14 orang, 5 orang guru hanya lulusan S1, sisanya berlatar belakang D3 berjumlah 1 orang, D2 berjumlah 4 orang, dan SPG berjumlah 2 orang, SLTA 2 orang. Berdasarkan pernyataan kepala sekolah SDN Semper Timur 05 bahwa para guru Semper Timur 05 masih sangat kurang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan KTSP. Bahkan ada beberapa guru yang belum sama sekali mengikuti pelatihan KTSP yang pernah di adakan oleh pengawas sekoah di tingkat kecamatan. Selama ini mereka hanya belajar sendiri atau bertanya pada rekan guru lainnya yang pernah mengikuti pelatihan KTSP.

Terkait dengan informasi dalam implementasi kebijakan KTSP ini, seperti yang telah dipaparkan diatas dilakukan secara berjenjang antara dinas provinsi baik dikalangan pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan sampai dengan ke sekolah selaku pelaksana kebijakan. Penyampaian informasi yang ada berdasarkan peraturan seperti Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23 tahun 2006 maupun buku panduan BSNP yang didistribusikan secara berjenjang ke provinsi. Sekolah juga mendapatkan kemudahan untuk mengunduh informasi-informasi terkait KTSP ini melalui internet. Dinas provinsi bersama dinas kotamadya Jakarta Utara dan dinas kecamatan melalui para pengawas selalu menyampaikan informasi terkait tentang pengembangan KTSP yang baik dan dinamis, dimana para guru harus melakukan perubahan-perubahan sebagai bentuk inovasi dan pengembangan yang ada.

Media informasi yang digunakan ditingkat pemerintahan pusat dan daerah adalah melalui sosialisasi dan rapat-rapat, dilengkapi dengan surat edaran, bahkan sampai dengan media komunikasi tidak langsung seperti penggunaan telepon dan

faksimile. Sementara untuk tingkat sekolah melalui sosialisasi atau pertemuan yang dilakukan oleh para pengawas di masing-masing gugus sekolah.

Sumber daya lainnya bagi implementasi KTSP ini yang tak kalah penting adalah wewenang. Maksud dari wewenang disini adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan. Kebijakan KTSP ini memiliki struktur pelaksana bertingkat. Maksudnya terdapat beberapa jenjang instansi yang saling terkait, baik dalam hal pertanggungjawaban secara vertikal maupun hubungan koordinasi secara horisontal. Kebijakan tidak akan bisa diimplementasikan jika tidak disertai pemberian kewenangan kepada pelaksana. Setiap tahap kegiatan program KTSP ini yang dilakukan di wilayah Jaakrta Utara adalah sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan, yaitu meliputi persiapan peraturan, penyiapan standar nasional, dan persiapan anggaran. Kewenangan diberikan kepada Pusat (Badan Standar Nasional Pendidikan dan Pusat Kurikulum). Sedangkan pada tahap perencanaan tingkat provinsi meliputi penyesuaian buku teks dan penyusunan aturan-aturan diberikan kewenangannya kepada dinas pendidikan provinsi (dinas pendidikan provinsi sebagai regulator yang membuat sistem). Sedangkan pada tahap perencanaan tingkat kota meliputi pembentukan dewan pendidikan, pengalokasian anggaran dan memfasilitasi anggaran serta sebagai supervisor).
2. Pada tahap pelaksanaan, sekolah diberikan kewenangan sepenuhnya dalam mengimplementasikan KTSP yang meliputi perencanaan tingkat sekolah dan kelas sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Dalam tahap pelaksanaan KTSP sekolah dibantu oleh pengawas ditingkat kecamatan yang bewenang sebagai operator.
3. Tahap pemantauan diberikan kewenangannya kepada Pusat Kurikulum, dinas provinsi, dinas kota dan pengawas di tingkat kecamatan.
4. Tahap evaluasi diberikan kewenangan kepada pihak sekolah yang disebut evaluasi diri serta evaluasi yang dilakukan oleh pihak luar seperti pengawas, dinas kota, dinas provinsi maupun pemerintah pusat.

Dari uraian mengenai kewenangan yang dimiliki masing-masing pembuat dan pelaksana kebijakan terlihat adanya kesesuaian antara kewenangan dengan tugas yang dibebankan kepada pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaan sehari-hari pendelegasian wewenang tersebut berjalan dengan lancar. Tidak ditemui keluhan dari pelaksana kebijakan mengenai kurangnya kewenangan yang diberikan.

Terkait dengan pembiayaan dalam melaksanakan kebijakan ini. Untuk provinsi DKI Jakarta termasuk yang beruntung dibandingkan provinsi lainnya. Sumber biaya yang mendukung pelaksanaan KTSP ini selain dari pemerintah pusat yang berupa dana BOS (biaya operasional Sekolah), didukung pula oleh dana BOP (Biaya Operasional Pendidikan) yang berasal pemerintah daerah. Sejauh ini pembiayaan yang ada meskipun cukup tersedia untuk pelaksanaan KTSP di sekolah namun tetap saja masih kurang bagi sekolah-sekolah pelaksana terutama bagi sekolah yang para gurunya masih membutuhkan pelatihan-pelatihan dalam mengembangkan KTSP maupun untuk pengadaan jasa konsultan.

Sumber daya lainnya yaitu sarana dan prasarana yang termasuk penting dalam pelaksanaan kebijakan KTSP. Adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan KTSP, karena sarana dan prasarana tersebut dipergunakan oleh para pelaksana kebijakan secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan dinas provinsi maupun dinas kotamadya dukungan sarana dan prasarana pada umumnya masih kurang, karena masih banyak sekolah-sekolah di Jakarta Utara ini kurang memadai sarana dan prasarannya.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan kepala sekolah SDSN Kalibaru 01 sarana dan prasarana disekolah tersebut sudah memadai mengingat SDN Kalibaru 01 ini merupakan sekolah standar nasional yang mana sarana prasarana yang ada haruslah sesuai dengan kriteria minimal yang telah dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Sarana prasarana yang dimaksud meliputi ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, tempat berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Lain halnya dengan SDN Semper Timur 05 yang merupakan SD

reguler, sarana prasarana yang dimiliki masih sangat terbatas bahkan tidak memadai, seperti tidak adanya perpustakaan, laboratorium, bahkan tempat untuk berolahraga pun tidak ada sehingga tidak mendukung keterlaksanaan KTSP.

4.5. Variabel Sikap

Variabel ketiga yang dipandang berpengaruh dalam implementasi kebijakan adalah sikap. Maksud dari sikap ini adalah kecenderungan sikap, keinginan atau kesepakatan para pelaksana dalam kesediaannya menerima dan melaksanakan kebijakan secara baik. Sikap ini akan muncul diantara para pelaksana kebijakan, manakala akan menguntungkan organisasi dan dirinya. Namun sebaliknya, bila sikap atau perspektif-perspektif para pelaksana tidak sejalan dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan kebijakan akan terhambat. Sikap para pelaksana itu kemungkinan akan menghalangi implementasi kebijakan jika para pelaksana tidak memiliki kesepakatan dengan isi dari kebijakan tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Edwards III (1980):” *If implementors are well disposed toward a particular policy, they are more likely to carry it out as the original decisionmakers intended. But when implementors attitude or perspectives diver the decisionmakers, the process f implementing a policy becomes infinitely more complicated*”. (p.89)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi dinas provinsi dan dinas kota bahwa sikap para pelaksana kebijakan ini dalam hal ini kepala sekolah maupun guru yang memahami kebijakan ini pada umumnya menerima dan menyambut dengan baik karena adanya kebijakan KTSP ini yang mana sekolah telah diberi kewenangan di dalam penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya merupakan suatu kebanggaan bagi mereka. Namun ada juga sekolah yang memang terpaksa menerimanya karena kebijakan KTSP ini memang sudah merupakan peraturan yang mereka harus jalani meskipun mereka belum memahami benar isi dari kebijakan tersebut. Apalagi sekolah yang memang sudah terbiasa hanya menunggu instruksi dari atas dan hanya biasa diarahkan saja, tentu saja bagi mereka KTSP ini merupakan sesuatu yang sangat membebankan/memberatkan beban kerja mereka.

Sikap kepala sekolah dan para guru di SDN Kalibaru 01 ini sangat menerima dengan baik adanya kebijakan KTSP ini, sebagian besar sudah begitu memahami maksud dan tujuan dari isi kebijakan yang merupakan otonomi sekolah. bagi mereka dengan adanya KTSP ini memudahkan pekerjaan mereka karena memang disesuaikan dengan kondisi sekolah.mereka. Lain halnya dengan SDN Semper Timur 05 berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah dan gurunya, mereka merasakan kesulitan dalam menjalani kebijakan ini karena sebagian besar para guru masih belum memahami dengan baik maksud dan tujuan dari kebijakan KTSP ini. Yang mereka hanya bisa lakukan meraba-raba saja dan mencari tau sendiri bagaimana melaksanakan KTSP ini. Guru-guru di SDN Semper Timur 05 ini juga merasa tidak sepakat dengan adanya kebijakan KTSP ini karena dengan adanya kebijakan KTSP ini mereka merasa terlalu dibebankan dengan tugas-tugas administrasi kelas yang sudah menyita banyak waktu mereka sehingga waktu untuk mengajarpun menjadi berkurang. Tidak hanya itu saja yang membuat mereka kesulitan juga adalah kondisi dan fasilitas sekolah yang memang tidak lengkap/belum memadai menghambat pelaksanaan kebijakan KTSP ini.

4.6. Variabel Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (1980) struktur birokrasi yang dimaksud yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Maksud dari SOP sebagai tanggapan-tanggapan internal pada waktu dan sumber implementasi yang terbatas serta keinginan atas adanya keseragaman dalam menjalankan operasi organisasi-organisasi kompleks dan yang tersebar secara luas. Sedangkan fragmentasi merupakan pembagian pusat kordinasi dan pertanggungjawaban. Fragmentasi juga bisa dikatakan adalah terpecah-pecahnya pelaksanaan kebijakan karena banyaknya organisasi atau badan yang terlibat di dalamnya.

Secara resmi menurut Kepala seksi dinas pendidikan provinsi maupun dinas pendidikan kota dalam pelaksanaan kebijakan KTSP ini sekolah tidak memiliki SOP, paling yang menjadi acuannya yang dipakai adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 serta panduan-panduan yang

dibuat oleh BSNP, dan juga edaran-edaran yang dimaksudkan untuk memberikan penguatan dalam memperjelas persepsi agar dilapangan tidak terjadi pengertian yang multipercasi. Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa KTSP ini memang merupakan otonomi sekolah yang disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Sehingga tidak ada keseragaman antara sekolah satu dengan sekolah lainnya.

Terkait dengan konsep fragmentasi, pelaksanaan kebijakan KTSP tidak terjadi fragmentasi karena pelaksanaan kegiatan dilapangan hanya dilakukan oleh pihak sekolah saja yakni kepala sekolah dan guru, sedangkan dinas provinsi tugasnya hanya sebagai regulator dan yang membuat sistem dengan melibatkan tim pengembang kurikulum. Dinas pendidikan lebih kepada supervisi yang juga melibatkan tim pengembang tingkat kota dan di tingkat kecamatan sebagai operator yang menggerakkan kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan kebijakan KTSP. Sekolah hanya bertanggungjawab langsung pada pengawas ditingkat kecamatan. Pemantuan dan monitoring dilakukan langsung oleh pengawas yang kemudian dilaporkan ke tingkat kota dan dari tingkat kota akan dilanjutkan ke tingkat provinsi. Jika ditemukan suatu permasalahan maka akan diadakan pertemuan untuk mencari jalan keluar di tingkat kota dengan melibatkan tim pengembang kurikulum kota dan para pengawas.

4.7. Pengaruh Implementasi Kebijakan KTSP Terhadap Nilai UASBN Siswa

4.7.1. Pengaruh Implementasi KTSP terhadap Nilai UASBN Siswa SDN Kalibaru 01 Pagi

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SDN Kalibaru 01 mengenai KTSP ini sebenarnya merupakan kurikulum yang sudah baik, karena dengan adanya KTSP ini sekolah diberi otonomi penuh untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sekolah masing-masing sesuai dengan potensi sekolah yang ada serta menuntut guru untuk benar-benar melakukan inovasi-inovasi dalam mengajar. Penjelasannya Seperti yang dijabarkan berikut ini:

- Guru Kelas VI

“Menurut saya pribadi KTSP ini sudah merupakan kurikulum yang sangat baik, karena sekolah diberikan otonomi untuk menyusun kurikulum sekolahnya sesuai dengan potensi sekolah. Ditambah lagi mendorong guru untuk lebih variatif lagi dalam mengajar.”

Jika memang KTSP ini sudah merupakan kurikulum yang baik, lalu bagaimana pengaruhnya dengan nilai UASBN siswa SDN Kalibaru 01 ini? Berdasarkan informasi yang di dapat dari guru kelas VI bahwa pengaruhnya dengan nilai UASBN siswa setelah diterapkannya KTSP ini tidak terlalu mengalami peningkatan, karena nilai UASBN siswa sebagai salah satu bentuk prestasi siswa tetap saja tergantung kepada tingkat kecerdasan anak-anak itu sendiri. Anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi maka akan dengan mudah untuk menerima pelajaran, sedangkan anak dengan tingkat kecerdasan yang rendah akan sangat sulit untuk menerima pelajaran. Seperti yang dijabarkan berikut ini:

- Guru Kelas VI

“Menurut saya sih sebenarnya yang mempengaruhi prestasi siswa kan tergantung tingkat kecerdasan anak itu sendiri ya, dikelas itu kan ada anak yang mudah menerima pelajaran tapi ada juga yang sulit dalam menerima pelajaran. Secara rata-rata kelas sih lumayan ada sedikit peningkatan”.

Untuk memperkaya sumber data terkait tentang pengaruh kebijakan KTSP terhadap nilai UASBN siswa kelas VI, melalui hasil studi dokumentasi daftar nilai Ujian Sekolah dan UASBN satu tahun sebelum (tahun ajaran (2006/2007) dan sesudah dilaksanakannya KTSP (tahun ajaran 2007/2008-2008/2009) terutama untuk mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA. Dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Daftar Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah dan UASBN
Tahun Ajaran 2006/2007-2008/2009 SDN Kalibaru 01 Pagi Jakarta Utara

No	Mata Pelajaran	Sebelum	Sesudah	
		Implementasi KTSP	Implementasi KTSP	
		TA 2006/2007	TA 2007/2008	TA 2008/2009
1	Matematika	6,65	5,69	5,91
2	Bahasa Indonesia	6,79	7,89	7,28
3	IPA	6,58	5,76	6,63
	Rata-Rata	6,67	6,45	6,60

Sumber : Daftar Rekapitulasi Nilai Ujian SDN Kalibaru 01

Berdasarkan tabel diatas, menggambarkan bahwa nilai rata-rata Ujian Nasional dan UASBN untuk tahun ajaran 2006/2007 sebelum diberlakukannya KTSP nilai rata-rata sebesar 6,67 kemudian ditahun pertama (tahun ajaran 2007/2008) setelah diberlakukannya KTSP mengalami penurunan sekitar 0,22 menjadi sebesar 6,45. Pada tahun kedua (tahun ajaran 2008/2009) setelah diberlakukannya KTSP mengalami peningkatan sebesar 0,15 menjadi 6.60.

4.7.2. Pengaruh Implementasi KTSP terhadap Nilai UASBN Siswa SDN Semper Timur 05.

Senada dengan penjelasan guru kelas VI di SDN Kalibaru 01, guru kelas VI di SDN Semper Timur 05 pun menjelaskan bahwa pada dasarnya KTSP ini merupakan kurikulum yang sudah baik. Seperti yang dijabarkan berikut ini:

- Guru Kelas VI

“Iya memang sih KTSP itu kurikulum yang sudah baik, tapi itupun untuk sekolah yang sarana dan prasarananya sudah memadai dan guru-

guru yang sudah memahami benar tentang KTSP. Karena dengan KTSP ini kan sekolah diberi otonomi sepenuhnya untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sekolah sesuai dengan potensi sekolah. Dan juga KTSP ini menuntut guru untuk lebih kreatif dalam mengajar dan juga perlu didukung sarana dan prasarana sekolah yang memadai.”

Pengaruh dari implementasi KTSP terhadap nilai UASBN siswa kelas VI di SDN Semper Timur 05 ini sama halnya dengan SDN Kalibaru 01 tidak terlalu berpengaruh terhadap Nilai UASBN siswa. Seperti yang dijelaskan berikut ini:

- Guru Kelas VI

“Setelah diberlakukannya KTSP nilai lumayan mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu besar. Tetapi tetap saja hasil prestasi anak bergantung dari tingkat kecerdasan masing-masing anak dalam menerima pelajaran. Ada anak yang cepat menangkap ada juga anak sulit menerima pelajaran. Tetapi sejauh ini sih nilai anak ada peningkatan sedikit.”

Untuk lebih jelasnya mengenai dampak implementasi KTSP terhadap nilai UASBN siswa SDN Semper timur 05 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Daftar Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah dan UASBN
Tahun Ajaran 2006/2007-2008/2009 SDN Semper Timur 05 Pagi Jakarta
Utara

No	Mata Pelajaran	Sebelum	Sesudah Implementasi	
		Implementasi KTSP	KTSP	
		TA 2006/2007	TA 2007/2008	TA 2008/2009
1	Matematika	6,33	6,07	6,63
2	Bahasa Indonesia	6,79	7,71	7,37
3	IPA	6,71	6,04	6,34
	Rata-Rata	6,61	6,60	6,78

Sumber : Daftar Rekapitulasi Nilai Ujian SDN Semper Timur 05

Berdasarkan tabel diatas, menggambarkan bahwa nilai rata-rata Ujian Nasional dan UASBN untuk tahun ajaran 2006/2007 sebelum diberlakukannya KTSP nilai rata-rata sebesar 6,61 kemudian ditahun pertama (tahun ajaran 2007/2008) setelah diberlakukannya KTSP mengalami penurunan hanya sekitar 0,01 menjadi sebesar 6,60. Pada tahun kedua (tahun ajaran 2008/2009) setelah diberlakukannya KTSP mengalami peningkatan sebesar 0,18 menjadi 6.78.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dari hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi KTSP jika dinilai dari empat faktor Edward III secara umum telah dipenuhi oleh pemerintah kotamadya Jakarta Utara meskipun tidak cukup sempurna. Implementasi KTSP di SDN Kalibaru 01 dan SDN Semper timur 05 Jakarta Utara telah melaksanakan kegiatan persiapan kurikulum dengan menyusun dan mengembangkan dokumen KTSP 1 dan 2. Pengaplikasiannya di kelas diserahkan sepenuhnya oleh guru. Kegiatan KBM guru SDN Kalibaru 01 menggunakan metode yang bervariasi dan berpusat pada siswa dengan menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran serta mengacu pada silabus dan RPP yang telah dibuat guru, sedangkan di SDN Semper timur 05 Jakarta Utara lebih cenderung menggunakan metode ceramah tanpa memusatkan siswa dalam pembelajaran. Pada SDN Kalibaru 01 guru menggunakan media pembelajaran yang telah tersedia di sekolah, sedangkan pada SDN Semper Timur 05 guru hanya menggunakan media pembelajaran yang terbatas. Masing-masing sekolah memiliki beberapa hambatan dalam mengimplementasikan KTSP ini. Hambatan-hambatan yang ditemui seperti kurangnya dana untuk mengimplementasikan KTSP ini, terutama dana untuk terus melakukan pelatihan-pelatihan KTSP untuk para guru dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, kurangnya kreatifitas dan keinginan guru dalam melakukan perubahan dalam hal cara mengajar dan penerapan dokumen KTSP ke dalam kegiatan KBM, kurangnya pengembangan kurikulum, dan kemampuan siswa yang berbeda-beda, adanya kesulitan yang dihadapi guru untuk mendapatkan bahan-bahan pembelajaran yang setiap waktu harus berubah dan disesuaikan dengan

pelajaran, sehingga untuk mencari bahan pembelajaran saja membutuhkan waktu.

2. Dengan adanya implementasi kebijakan KTSP ini di SDN Kalibaru 01 dan Semper Timur 05 tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan nilai UASBN siswa kelas VI. Nilai UASBN siswa SDN Kalibaru 01 mengalami peningkatan pada tahun ajaran 2007/2008 dari 6,45 menjadi 6,65 pada tahun ajaran 2008/2009. Nilai UASBN siswa SDN Semper timur 05 mengalami peningkatan dari 6,60 pada tahun ajaran 2007/2008 menjadi 6,78 pada tahun ajaran 2008/2009. Hal tersebut dikarenakan implementasi KSTP bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, tetapi masih ada faktor lain yang mempengaruhi seperti salah satunya tingkat kecerdasan siswa yang berbeda-beda.

5.2. Saran-Saran

Merujuk pada kesimpulan diatas maka dapat dipertimbangkan beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan implementasi KTSP antara lain:

1. Sebaiknya pemerintah pusat perlu meninjau kembali implementasi kebijakan KTSP ini melalui sosialisasi secara merata sampai dengan tingkat sekolah.
2. Pemerintah pusat dan daerah disarankan untuk terus berkordinasi dalam melakukan pembekalan pengetahuan dan pemahaman yang cukup kepada kepala sekolah dan guru secara langsung dan merata tentang pengembangan KTSP secara lengkap sesuai dengan prinsip-prinsipnya.
3. Pemerintah pusat dan daerah terus memberikan subsidi pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung pelaksanaan KTSP secara merata terutama untuk sekolah-sekolah reguler yang belum tersentuh.
4. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan monitoring secara berkala tentang implementasi KTSP dalam kegiatan KBM di kelas.

5. KTSP yang telah dikembangkan sekolah perlu di validasi secara berkala oleh berbagai pakar.
6. Pemerintah daerah sebaiknya memberikan “layanan profesional” dalam mengembangkan KTSP kepada sekolah seperti pengadaan jasa konsultan kurikulum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, James E. *Public policy making*. Second Edition, Praeger Publishers, New York, 1978.
- Burn, Alvin C. & Bush, Ronald F., *Marketing Research*, Second ed., New Jersey :Prentice Hall, inc., 1998
- Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: BSNP, 2006
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Introduction*, Prentice Hall, New Jersey 1981.
- Dye, Thomas R., *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey, 1972.
- Easton, David. *The Political System*, Alfred A. Knopf, New York 1953.
- Edward, George E. dan Ira Sharkansky. *The Policy: Predicament*. W.H. Freeman, San Francisco, 1978.
- Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*, Congressional Quaterly Inc, Washington DC, 1980.
- Friedrich, Carl J. *Man and His Government*, McGraw Hill, New York, 1963.
- Gerston, L.N. *Public Policy making in a Democratic Society: A Guide to Civic Engagement*. M.E. Sharp, Inc., New York 1992.

- Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in Third World*. Princeton University Press, New Jersey, 1980.
- Hasan, Chalidjah. *Dimensi-Dimensi Psikologi Pendidikan*, Al Ikhlas, Surabaya 1994.
- Hewlett, Michael and M. Ramesh, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, Oxford University Press, New York, 1995.
- Idris, Zahara dan Lisma Jamal. *Pengantar Pendidikan*, PT Grasindo, Jakarta 1992.
- Jones, Charles O. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Joko Susilo, Muhammad. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta, 2007
- Lasswell, Harold D. and Abraham Kaplan. *Power and Society*. Yale University Press, New Haven, 1970.
- Mazmanian, Daniel L. and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*, Harper Collins, New York 1983.
- Miles, Matthew B. dan Michael A. Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku sumber tentang Metode-metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi.: Universitas Indonesia Press, Jakarta 1992.
- Mulyasa, E. 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Sebuah Panduan Praktis*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Muslich, Masnur. 2007. *KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) Dasar Pemahaman dan Pengembangan Pedoman Bagi Pengelola Lembaga Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Dewan Sekolah, dan Guru*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Mustopadidjaya, A.R. *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kerja*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2002.
- Nakamura, R.T. dan Smallowood F. *The Politics of policy Implementation*. St. Martin's Press, New York, 1980.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2003.
- Parker, R.S. *Policy and Administration dalam Public Policy and Administration in Australia: A Reade*. John Wiley and Sons, Sydney, 1975.
- Parsons, Wayne. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, terjemahan Triwibowo Budi Santoso, Prenada Media Group, Jakarta, 2006). Jones, Charles, O., *An Introduction to the Study of Public Policy*. Third Edition. Cole Publishing Company, Monterey, 1984).
- Pidarta, Made. *Landasan Kependidikan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997).
- Pressman, Jeffrey L. and Aaron Wildavsky. *Implementation How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland, Third Edition*. University of California Press, California, 1984.
- Zuhal, *Kekutan Daya Saing Indonesia Mempersiapkan Masyarakat Berbasis Pengetahuan*, (Jakarta: Kompas, 2008), hal. 45.

Salam, Burhanuddin. *Pengantar Pedagogik : Dasar-Dasar Ilmu Mendidik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 1997.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang MPR RI Periode 1999-2004. Buku II Persandingan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Hasil amandemen dan usul Komisi Konstitusi, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2003.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2003

Penelitian

Daruretno, Nurani, (2007). *Kesiapan Sekolah dalam Melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP, Studi Kasus SDN Dukuhan, Kerten, Surakarta Tahun ajaran 2006/2007, FAI UMS*

Hidayati, Krisdiana, (2008). *Perencanaan Pembelajaran Matematika KTSP SMA Muhammadiyah Surakarta (Studi Multi Kasus di SMA Muhammadiyah 1, 2, dan 3 Surakarta), UMS*

Imania, Katriza, (2008). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lebak Lebung Sungai dan Sumber Daya Perikanan (Studi Analisis di Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan), Tesis.FISIP Pasca sarjana Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi Kebijakan Publik.*

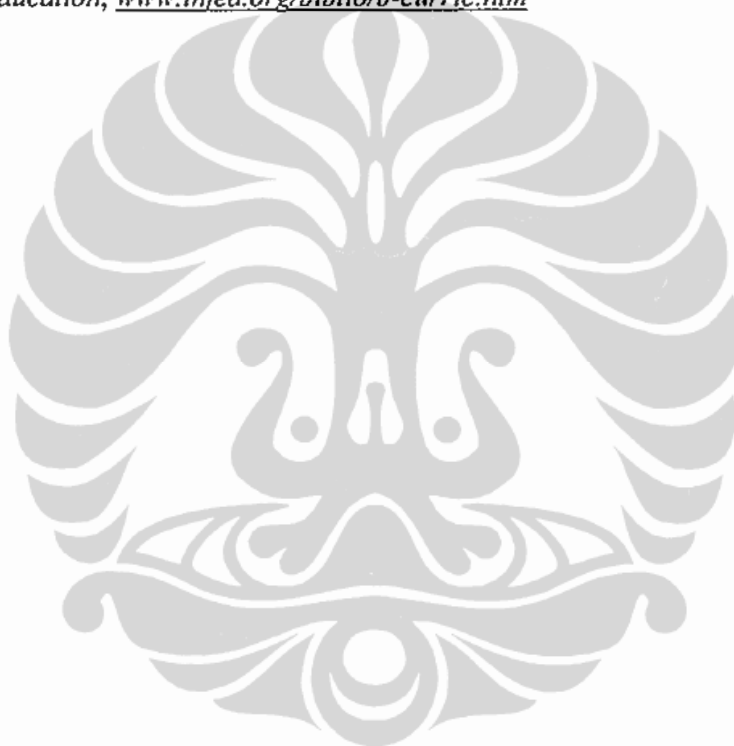
Sutrisno, (2008). *Profil Pelaksanaan KTSP di Provinsi Jambi (Studi Evaluatif Pelaksanaan KTSP SD, SMP, SMA)*. Universitas Jambi Kampus Pinang Masak

Dokumentasi Elektronik/Internet

Anonim. 2007. *Plus Minus KTSP*. Dunia Guru: <http://www.duniaguru.com>
(diakses 19 Juli 2009).

science performance, <http://www.oecd.org/> (diakses 20 Juli 2009)

Smith, M.K. (1996, 2000). 'Curriculum Theory and Practice' *The Encyclopedia of Informal Education*, www.infed.org/biblio/b-curric.htm





PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN MASTER

INFORMAN :

1. Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta Utara

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) DI SDN KALIBARU 01 DAN SDN SEMPER TIMUR 05 JAKARTA UTARA

LANNY ANGGRAINI
0806441390

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA

Komunikasi

1. Bagaimanakah Dinas Pendidikan Provinsi/Kotamadya melakukan proses sosialisasi dan pembinaan kebijakan KTSP ini kepada kepala sekolah dan guru?
2. Sejauh mana keterlibatan Dinas Pendidikan Provinsi/Kotamadya dalam pelaksanaan KTSP?
3. Hambatan apa saja yang dihadapi dinas pendidikan provinsi/kotamadya dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan tersebut?
4. Apakah Dinas Pendidikan Provinsi/Kotamadya dalam melaksanakan pembinaan sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan oleh BSNP?
5. Apakah sudah cukup jelas panduan penyusunan KTSP yang dibuat oleh BSNP?
6. Apakah Dinas Pendidikan Provinsi/Kotamadya mengawasi secara langsung pelaksanaan KTSP ini di sekolah?
7. Apakah pihak sekolah melaporkan hasil pelaksanaan KTSP ini secara berkala ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kotamadya?
8. Apakah Dinas Pendidikan Provinsi/Kotamadya memberikan tanggapan dengan cepat atas laporan yang disampaikan sekolah?
9. Apakah ada hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Provinsi/Kotamadya terkait dengan pelaksanaan KTSP di sekolah-sekolah ?
10. Apakah Dinas Pendidikan Provinsi/Kotamadya mengadakan pertemuan-pertemuan berkala untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan KTSP?

11. Apakah Dinas Pendidikan Provinsi/Kotamadya mendistribusikan pedoman penyusunan KTSP maupun Peraturan Perundangan terkait dengan KTSP ini ke sekolah-sekolah?

Sumber Daya

12. Dukungan apa saja yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kotamadya kepada sekolah-sekolah terkait dengan pelaksanaan KTSP ini?
13. Bagaimanakah dukungan sumber daya yang berupa guru, dana, kewenangan, informasi dan sarana prasarana dalam rangka mendukung implementasi KTSP ini?
14. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan sumber-sumber daya tersebut dalam rangka mendukung implementasi KTSP ini?

Sikap

15. Sejauh ini bagaimanakah sikap atau tanggapan para kepala sekolah maupun guru sebagai para pelaksana kebijakan KTSP ini dalam melaksanakan kebijakan?
16. Apakah dengan adanya pelaksanaan KTSP ini memudahkan para kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari?
17. Bagaimana komitmen atau kesepakatan para pelaksana kebijakan terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan KTSP?

Struktur Birokrasi

18. Bagaimanakah struktur birokrasi yang ada sekarang ini dalam pelaksanaan KTSP (sudahkah cukup efisien)?
19. Apakah struktur birokrasi yang ada pada saat ini membuat komunikasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota dengan sekolah berjalan dengan lancar?

20. Bagaimana pembagian fungsi, tugas dan wewenang diantara pihak/ instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan KTSP ini?
21. Apakah ada SOP dalam implementasi KTSP?
22. Bagaimana prosedur birokrasi dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan KTSP?





PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN MASTER

INFORMAN :

Kepala Sekolah

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
(KTSP) DI SDN KALIBARU 01 DAN SDN SEMPER TIMUR 05
JAKARTA UTARA**

LANNY ANGGRAINI
0806441390

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA

1. Apakah sekolah anda siap dalam melaksanakan KTSP?
2. Bagaimana pelaksanaan KTSP di sekolah anda sejauh ini?
3. Apakah sebelumnya ada sosialisasi dari pihak pemerintah dalam memberikan pembinaan kepada anda tentang bagaimana cara mengembangkan kurikulum tersebut?
4. Alat komunikasi apakah yang digunakan Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kotamadya dalam rangka menginformasikan KTSP?
5. Apakah sejauh ini cukup efektif alat komunikasi tersebut dalam menginformasikan KTSP?
6. Sejauhmanakah keterlibatan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kotamadya dalam pelaksanaan KTSP ini?
7. Apakah ada keterlibatan Dinas Pendidikan Kecamatan dalam pelaksanaan KTSP?(jika ya dalam hal apa keterlibatan tersebut)
8. Bagaimanakah dukungan sarana prasana di sekolah anda dalam pelaksanaan KTSP ini sudah cukup memadai?
9. Apakah potensi sekolah yang ada telah mendukung pelaksanaan kurikulum tersebut?
10. Bagaimanakah penerimaan/sikap para guru terhadap kebijakan pelaksanaan KTSP tersebut?
11. Bagaimanakah dukungan pembiayaan terhadap pelaksanaan KTSP di sekolah ini sudah cukup memadai?
12. Bagaimanakah struktur birokrasi yang ada sekarang ini dalam pelaksanaan KTSP (sudahkah cukup efisien)?
13. Bagaimanakah pemahaman para guru terhadap kebijakan KTSP ini?
14. Bagaimanakah pengaruh pelaksanaan KTSP ini terhadap prestasi peserta didik?
15. Apakah sekarang ada perubahan yang cukup signifikan dari hasil prestasi belajar mereka setelah diberlakukannya KTSP tersebut?
16. Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh sekolah dalam melaksanakan KTSP?

17. Upaya-upaya apa yang anda lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?
18. Apa manfaat yang didapat oleh sekolah dalam melaksanakan KTSP?
19. Apakah struktur birokrasi yang ada pada saat ini membuat komunikasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota dengan sekolah berjalan dengan lancar?
20. Menurut anda apakah para guru telah mampu mengaplikasikan RPP ke dalam KBM?
21. Bagaimana KBM berjalan sejak dijalankannya KTSP?
22. Sejauh mana peranan anda sebagai kepala sekolah dalam pelaksanaan KTSP?
23. Faktor apa saja yang diperhatikan dalam pengembangan KTSP dan silabusnya?
24. Metode pembelajaran apa saja yang digunakan guru dalam KBM di kelas?
25. Bagaimana anda meningkatkan potensi yang ada di sekolah demi mendukung implementasi KTSP?
26. Bagaimanakah peran serta orang tua, komite sekolah, dewan sekolah dan masyarakat dalam melaksanakan KTSP?
27. Upaya apa yang anda lakukan untuk meningkatkan kreativitas guru demi mendukung dalam mengimplementasikan KTSP?
28. Bagaimana hasil evaluasi yang didapat dari sekolah dalam pelaksanaan KTSP?
29. Bagaimana antusias siswa dalam kegiatan KBM dalam diterapkannya KTSP?



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN MASTER

<p>INFORMAN :</p> <p>Guru</p>

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
(KTSP) DI SDN KALIBARU 01 DAN SDN SEMPER TIMUR 05
JAKARTA UTARA**

LANNY ANGGRAINI
0806441390

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA

1. Menurut anda apakah sekolah anda sudah siap dalam menerapkan KTSP?
2. Menurut anda apa yang dimaksud dengan KTSP?
3. Apakah ada sosialisasi KTSP sebelumnya?
4. Apakah ada pelatihan-pelatihan KTSP?
5. Bagaimana pandangan anda tentang KTSP?
6. Apakah anda memiliki dokumen-dokumen kTSP yang lengkap?
7. Komponen-komponen apa saja yang ada di dokumen KTSP?
8. Apakah anda pernah mengikuti pengembangan KTSP?
9. Apakah kegiatan pembelajaran di kelas anda sudah sesuai dengan KTSP?
10. Bagaimanakah peranan anda di kelas dalam KBM?
11. Apakah sarana prasarana yang ada di sekolah anda sudah cukup lengkap?
12. Media pembelajaran apa yang pernah anda pakai dalam KBM di kelas?
13. Metode pembelajaran yang anda pakai dalam KBM dikelas?
14. Alat evaluasi apa yang anda gunakan dalam menentukan tingkat keberhasilan anak?
15. Apakah bentuk penilaian tersebut menurut anda sudah mewakili kemajuan siswa pada aspek kognitif, psikomotrik dan afektif?
16. Setelah diberlakukan KTSP, bagaimana hasil prestasi anak?
17. Bagaimana antusias siswa setelah diterapkannya KTSP?
18. Kesulitan apa yang anda hadapi?
19. Upaya apa saja yang anda lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut?
20. Menurut anda KTSP ini sudah merupakan kurikulum yang baik?
21. Apakah disekolah anda ada pelajaran/kegiatan pengembangan diri?
22. Apakah disekolah anda ada pelajaran/kegiatan kecakapan hidup?
23. Apakah disekolah anda ada pelajaran/kegiatan keunggulan lokal dan global?
24. Apakah ada saran agar KTSP ini menjadi lebih baik lagi?

Lampiran 4

Wawancara dengan Kepala Seksi Kurikulum SD Provinsi DKI Jakarta

Informan : Bapak Sujadiono (S)

Hari/Tanggal : Selasa/15 Desember 2009

Waktu : 19.00 WIB

Keterangan : Wawancara melalui telepon

TRANSKIP DATA DAN KODING

Pewawancara (L)	Informan (S)	Kode
<p>1. Bagaimanakah proses sosialisasi dan pembinaan terhadap kepala sekolah dan guru dalam mengembangkan KTSP?</p>	<p>Dinas Pendidikan Provinsi tidak secara langsung mensosialisasikan dan memberikan pembinaan kepada kepala sekolah dan guru. Dinas Pendidikan Provinsi membuat suatu sistem regulasi dengan membentuk tim pengembang kurikulum provinsi (yang sebelumnya telah dibina oleh pusat) dan tim pengembang kurikulum kotamadya yang kemudian mengadakan sosialisasi dan pembinaan KTSP kepada Korwas (kordinator pengawas) dari tiap-tiap kecamatan, yang kemudian sosialisasi dan pembinaan tersebut dilanjutkan ke para pengawas serta disosialisasikan dan dibina di tingkat gugus masing-masing dengan para peserta kepala sekolah dan guru.</p>	<p>S1</p>
<p>2. Sejauh mana keterlibatan Dinas Pendidikan Provinsi/Kotamadya dalam pelaksanaan KTSP?</p>	<p>Tim pengembang kurikulum provinsi terlibat juga dalam hal menganalisa hasil monitoring evaluasi KTSP, terkait dengan apa yang akan menjadi regulasi Dinas Pendidikan, terkait tentang pembelajaran, penilaian, termasuk penyusunan soal UASBN, jadi keterlibatan tim pengembang sangat banyak.</p>	<p>S2</p>
<p>3. Hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Provinsi dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan tersebut?</p>	<p>Hambatannya jika sosialisasi tersebut tidak disiapkan dengan baik maka akan ada bias, oleh karena itu Dinas Provinsi selalu berupaya agar bias itu seminimal mungkin dan oleh karena</p>	<p>S3</p>

	itu biasanya ketika kita sosialisasi ada titik api, maksudnya ketika nanti teman-teman peserta yang sosialisasi ingin mengimbaskan dia tidak bisa sendiri, dia harus dengan timnya. Ini dalam rangka meminimalisasi bias tersebut. Kemudian komitmen teman-teman kepala sekolah tidak sama terutama yang mau menjelang pensiun, atau kepala sekolah yang sudah terlalu lama menjabat sehingga sosialisasi tidak dapat terlaksana secara optimal.	
4. Apakah Dinas Pendidikan Provinsi dalam melaksanakan pembinaan sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan oleh BSNP?	Ya tentu saja	S4
5. Apakah sudah cukup jelas panduan penyusunan KTSP yang dibuat oleh BSNP?	Ya wajar saja jika ada satu dua yang masih belum paham, dan oleh karena itu kita tidak ada habisnya untuk melakukan pembinaan dan diskusi-diskusi. Seperti menyamakan persepsi tentang revisi KTSP, apakah bentuknya harus mengganti KTSP seluruhnya atau hanya sebagian di revisi saja. Ini perlu mendapatkan kesepakatan sebagai bahan panduan di lapangan. Yang kedua terkait dengan pengesahan, apakah harus setiap tahun disahkan. Ada hal-hal yang perlu ditanyakan seperti yang di Cilincing ada beberapa pertanyaan tentang pendidikan kecakapan hidup, pendidikan keunggulan lokal dan global yang masih belum dapat dipahami di lapangan.	S5
6. Apakah Dinas Pendidikan Provinsi mengawasi secara langsung pelaksanaan KTSP ini disekolah?	Tidak, karena Dinas Pendidikan Propinsi hanya sebagai regulator saja dan membangun sistem. Namun demikian pada saat monitoring	S6

	<p>evaluasi KTSP dilapangan Dinas Pendidikan Propinsi datang ke sekolah sekolah hanya secara sampel saja.</p>	
<p>7. Apakah pihak sekolah melaporkan hasil pelaksanaan KTSP ini secara berkala ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kotamadya?</p>	<p>Tidak secara langsung ke Dinas Provinsi maupun kotamadya, tetapi secara struktural sekolah langsung membuat laporan ke pengawas</p>	S7
<p>8. Apakah Dinas Pendidikan Provinsi memberikan tanggapan dengan cepat atas laporan yang disampaikan sekolah?</p>	<p>Iya, namun dalam melakukan tindak lanjut laporan tersebut Dinas Pendidikan Propinsi melakukan skala prioritas.</p>	S8
<p>9. Apakah ada hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Provinsi terkait dengan pelaksanaan KTSP di sekolah-sekolah ?</p>	<p>Tentu saja ada hambatannya seperti belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang sudah sesuai dengan standar minimal di banyak sekolah, kemampuan guru yang masih kurang, serta kepala sekolah yang tidak berkomitmen.</p>	S9
<p>10. Apakah Dinas Pendidikan Provinsi mengadakan pertemuan-pertemuan berkala untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan KTSP?</p>	<p>Iya, Dinas Pendidikan Propinsi melalui team pengembangan kurikulum mengadakan pertemuan berkala sebulan sekali untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dibawah dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi.</p>	S10
<p>11. Apakah Dinas Pendidikan Provinsi mendistribusikan pedoman penyusunan KTSP maupun Peraturan Perundangan terkait dengan KTSP ini ke sekolah-sekolah?</p>	<p>Iya, namun jumlahnya masih terbatas sehingga belum bisa diberikan satu pedoman untuk satu sekolah. Mengingat begitu banyaknya sekolah-sekolah sehingga belum bisa menjangkau semua sekolah. Saya sangat menghargai sekali usaha tim pengembang yang berinisiatif untuk tidak menunggu buku yang diadakan</p>	S11

	oleh Dinas Pendidikan Provinsi, mereka mendownload di WEB yang kemudian dicetak dan digandakan sendiri untuk ke sekolah-sekolah.	
12. Dukungan apa saja yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi kepada sekolah-sekolah terkait dengan pelaksanaan KTSP ini?	Dinas Pendidikan Propinsi memberikan dukungan berupa dana BOP dari APBD. Kemudian memberikan pembinaan dan pelatihan pelatihan KTSP untuk Kepala Sekolah dan guru. Dalam pembinaan KTSP tersebut Dinas Pendidikan juga mendatangkan nara sumber dari instansi lain yang menguasai KTSP.	S12
13. Bagaimanakah dukungan sumber daya yang berupa guru, dana, kewenangan, informasi dan sarana prasarana dalam rangka mendukung implementasi KTSP ini?	<p>Dana saya pikir untuk DKI Jakarta bukannya tidak ada masalah, kalau dikatakan cukup tidak adaukupnya. Jika dilihat nominalnya dibandingkan di provinsi lain, DKI Jakarta patut bersyukur karena jumlahnya bisa dua kali lipat yaitu Rp. 60.000,-per bulan untuk per siswa. Sehingga jika dana tersebut dioptimalkan penggunaannya untuk peningkatan mutu pembelajaran secara umum akan menjadi baik.</p> <p>Sedangkan untuk sumber daya manusia dalam hal ini kemampuan gurunya. Kita memang terus mengupayakan peningkatan sumber dayanya melalui pelatihan-pelatihan dan peningkatan pendidikan guru dari D2 menjadi S1. Terkait dengan mencari narasumber, sebenarnya DKI Jakarta termasuk yang paling beruntung dibandingkan provinsi lainnya karena kebetulan tim pengembang kurikulumnya banyak yang ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum baik di Pusat Kurikulum dan Direktorat sehingga bisa mendapatkan narasumber yang berkompeten dan berpengalaman yang relatif lebih</p>	S13

	<p>menguntungkan dibandingkan provinsi lainnya.</p> <p>Terkait dengan sarana dan prasarana, saya pikir tidak hanya di DKI Jakarta saja, tetapi di provinsi lainnyapun sama, masih belum memadai. Memang saya akui meskipun dengan dana yang relatif lebih baik dibandingkan provinsi lainnya, sarana dan prasarana yang untuk bisa mencapai standar minimal seperti yang ada di Pemendiknas masih banyak yang belum bisa terpenuhi. Dan oleh karena itu kita juga sepakat bahwa memang ada sekolah-sekolah yang mengarah pada standar minimal yang dikategorikan sebagai sekolah mandiri yang disebut sebagai Sekolah Standar Nasional yang masih sedikit. Dan kita masih menyadari bahwa sarana prasarana ini masih sangat kurang. Namun demikian setiap tahunnya kita tetap terus meningkatkan sarana dan prasarana ini agar bisa memenuhi standar minimal. Bahkan seharusnya DKI Jakarta ini sarana dan prasarana sekolah harus sudah melebihi standar minimal yang ada.</p> <p>Terkait dengan dukungan informasi tentang KTSP, saya pikir sudah cukup terpenuhi. Kitapun tidak akan pernah berhenti berbicara mengenai pengembangan kurikulum yang bagus tetap harus dinamis, KTSP yang dibuat sekali bukan berarti sampai disitu, kita harus melakukan perubahan-perubahan sebagai bentuk inovasi dan pengembangan yang ada. Jadi memang tidak boleh berhenti.</p> <p>Terkait dengan dukungan kewenangan, sejauh ini kewenangan yang ada di dinas provinsi sudah cukup mendukung.</p>	
--	--	--

<p>14. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan sumber-sumber daya tersebut dalam rangka mendukung implementasi KTSP ini?</p>	<p>Banyak faktor yang mempengaruhi penggunaan sumber-sumber daya tersebut. Sebagai contoh komitmen daripada kepala sekolah, kemudian pengawas, yang ketiga adalah menyangkut tentang faktor-faktor yang ada. Terlepas dari itu semua yang terpenting adalah seluruh <i>stakeholders</i> yang ada harus memiliki <i>spirit</i> yang sama.</p>	<p>S14</p>
<p>15. Sejauh ini bagaimanakah sikap atau tanggapan para kepala sekolah maupun guru sebagai para pelaksana kebijakan KTSP ini dalam melaksanakan kebijakan?</p>	<p>Saya pikir kepada teman-teman kepala sekolah yang memahami bahwa dengan KTSP ini berarti telah diberi wewenang di dalam penyelenggaraan pendidikan kepada sekolah, mereka tentu menyambut ini sebaagi sesuatu yang sangat membanggakan bagi mereka. Namun bagi sekolah yang sudah terbiasa hanya menunggu instruksi dari atas. Tentu saja bagi mereka kTSP ini merupakan sesuatu yang sangat membebankan/memberatkan buat mereka yang biasa diarahkan, biasa tinggal mengikuti apa yang harus dibuat. Sekelompok sekolah yang seperti itu ada. Tapi secara umum KTSP ini merupakan otonomi sekolah.</p>	<p>S15</p>
<p>16. Apakah dengan adanya pelaksanaan KTSP ini memudahkan para kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari?</p>	<p>Iya, bagi mereka yang sangat memahami bahwa KTSP ini merupakan otonomi sekolah yang sangat menerima dan menyambut dengan baik adanya kebijakan KTSP ini. Namun bagi sekolah yang tadi sudah disebutkan diatas yaitu sekolah yang pasif, itu merupakan suatu beban berat yang makin menambah pekerjaan mereka.</p>	<p>S16</p>

<p>17. Bagaimana komitmen atau kesepakatan para pelaksana kebijakan terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan KTSP?</p>	<p>Sejauh ini para pelaksana kebijakan berkomitmen dalam upaya untuk mencapai tujuan kebijakan KTSP. Namun demikian kita akui bahwa ada juga sebagian para pelaksana kebijakan yang belum bisa berkomitmen. Seperti kepala sekolah yang akan menjelang masa pensiun, maupun kepala sekolah yang sudah terlalu lama menjabat sebagai kepala sekolah dan hanya bisa menunggu arahan maupun instruksi dari atas.</p>	<p>S17</p>
<p>18. Bagaimanakah struktur birokrasi yang ada sekarang ini dalam pelaksanaan KTSP (sudahkah cukup efisien)?</p>	<p>Saya pikir jika di masing-masing personal di birokrasi menjalankan tupoksinya yang sesuai sudah barang tentu keterlaksanaan KTSPnya akan menjadi lebih berjalan dengan lancar. Diluar itu semua selama ini yang ada memang terus terjadi perubahan-perubahan tetapi saya juga mengatakan bahwa masing-masing melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang ada.</p>	<p>S18</p>
<p>19. Apakah struktur birokrasi yang ada pada saat ini membuat komunikasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota dengan sekolah berjalan dengan lancar?</p>	<p>Secara umum saya katakan baik, masing-masing memahami dan melakukan kordinasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memang memberikan dukungan terhadap pembelajaran di sekolah, apalagi terkait dengan komitmen dari dinas pendidikan bahwa hal-hal yang terkait dengan sarana-prasarana dan bidang sekretariat, itu semua sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk memberikan <i>support</i> kepada bidang persekolahan. Jadi sama-sama dipahami bahwa <i>core</i> nya itu ada di bidang persekolahan. Semua aspek yang ada memberikan kontribusi kepada pembelajaran di sekolah.</p>	<p>S19</p>

<p>20. Bagaimana pembagian fungsi, tugas dan wewenang diantara pihak/ instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan KTSP ini?</p>	<p>Tidak terlepas daripada tugasnya. Bahwa Dinas Provinsi lebih kepada sebagai regulasi dan sistem yang mesti harus dibuat dengan melibatkan tim pengembang kurikulum. Dinas kota lebih kepada supervisi yang melibatkan tim pengembang kurikulum tingkat kota dan di tingkat kecamatan dan di tingkat sekolah.</p>	<p>S20</p>
<p>21. Apakah ada SOP dalam implementasi KTSP?</p>	<p>Paling acuannya Permendiknas 22 tahun 2006 maupun acuan-acuan yang dibuat oleh BSNP, dan juga edaran-edaran yang dimaksudkan untuk memberikan penguatan untuk memperjelas persepsi agar dilapangan tidak terjadi pengertian yang multipercasi.</p>	<p>S21</p>
<p>22. Bagaimana prosedur birokrasi dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan KTSP?</p>	<p>Dinas Pendidikan Provinsi hanya sebagai pembuat regulasi dan sistem. Sedangkan Dinas Pendidikan Kotamadya hanya sebagai supervisor. Sedangkan dinas kecamatan sebagai operator.</p>	<p>S22</p>

Wawancara dengan Kepala Seksi Kurikulum SD Kotamadya Jakarta Utara
 Informan : Bapak M. Bakrie (B)
 Hari/Tanggal : Kamis /10 Desember 2009
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Kantor Dinas Pendidikan Kotamadya Jakarta Utara

TRANSKIP DATA DAN KODING

Pewawancara (L)	Informan (S)	Kode
1. Bagaimanakah dinas Pendidikan Kotamadya melakukan proses pembinaan dan sosialisasi kebijakan KTSP ini kepada kepala sekolah dan guru?	Dinas Pendidikan Kotamadya tidak secara langsung mensosialisasikan dan memberikan pembinaan kepada kepala sekolah dan guru. Kami memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para kordinator pengawas ,yang mana nantinya akan dilanjutkan oleh para pengawas dari masing-masing gugus kepada kepala sekolah dan guru.	B1
2. Sejauh mana keterlibatan Dinas Pendidikan Kotamadya dalam pelaksanaan KTSP?	Ya kami melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah terhadap pelaksanaan KTSP ini, kami juga melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah melalui tim pengembang kurikulum pengawas.	B2
3. Hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Pendidikan Kotamadya dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan tersebut?	Hambatannya dari masing-masing sekolah tersebut Sumber Daya Manusianya dalam menjabarkan KTSP tidak sama.	B3
4. Apakah Dinas Pendidikan kotamadya dalam melaksanakan pembinaan sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan oleh BSNP?	Tidak sempurna sih seluruhnya, Jadi ada sekolah yang sudah sempurna dalm penyusunan KTSP di sekolahnya, ada juga yang masih belum sempurna. Jadi masih bervariasi	B4
5. Apakah sudah cukup jelas panduan penyusunan KTSP yang dibuat oleh BSNP?	Oh pedomannya yang sudah dibuat oleh BSNP sudah cukup jelas,cuman seperti yang saya katakan tadi kemampuan dari masing-masing	B5

	sekolah ini dalam menterjemahkan KTSP ini berbeda-beda. Sehingga dalam penyusunan KTSP dari masing-masing sekolah jauh dari sempurna.	
6. Apakah Dinas Pendidikan Kotamadya mengawasi secara langsung pelaksanaan KTSP ini disekolah?	Iya, saya langsung terjun ke lapangan, melakukan sidak tanpa jadwal untuk melihat sejauh mana pelaksanaan KTSP di sekolah ini. Namun mengingat sekolah-sekolah di Jakarta Utara ini begitu banyak dan menyebar di kecamatan-kecamatan, ya tentu saja saya lakukan secara sampel. Dan sekolah-sekolah di Jakarta Utara sudah seluruhnya menggunakan KTSP ini meskipun masih ada beberapa sekolah yang mengadopsi dari sekolah lainnya. Tapi itu menurut saya tidak apa-apa asalkan disesuaikan dengan kondisi sekolah.	B6
7. Apakah pihak sekolah melaporkan hasil pelaksanaan KTSP ini secara berkala ke Dinas Kotamadya?	Iya tentu saja, tapi melalui dinas pendidikan kecamatan dulu (para pengawas) yang kemudian diteruskan ke dinas pendidikan kotamadya	B7
8. Apakah Dinas Pendidikan Kotamadya memberikan tanggapan dengan cepat atas laporan yang disampaikan sekolah?	Kami tidak langsung dalam memberikan tanggapan terhadap laporan dari sekolah, karena sekolah tidak menyampaikan laporannya langsung ke dinas kotamadya, melainkan ke para pengawas sekolah di dinas pendidikan kecamatan. Jiak ada permasalahan yang mendesak barulah kita adakan diskusi dengan para pengawas tersebut untuk memecahkan permasalahan tersebut yang tentu saja dengan skala prioritas.	B8

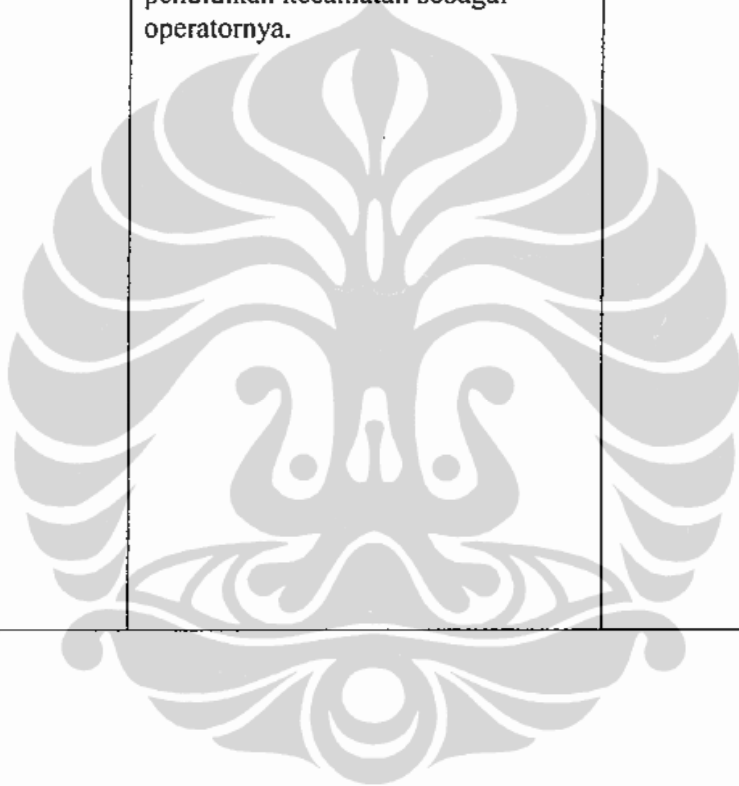
<p>9. Apakah ada hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kotamadya terkait dengan pelaksanaan KTSP di sekolah-sekolah ?</p>	<p>Tentu saja ada seperti sarana dan prasarana yang belum lengkap, SDM yang berbeda-beda dari masing-masing-masing sekolah (kemampuan guru rata-rata masih kurang), serta komitmen para kepala yang berbeda-beda pula</p>	<p>B9</p>
<p>10. Apakah Dinas Pendidikan Kotamadya mengadakan pertemuan-pertemuan berkala untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan KTSP?</p>	<p>Belum kita lakukan secara berkala, tetapi kita mengadakan pertemuan tersebut namun tidak berkala, tergantung tim pengembang kurikulum kotamadya. Jika memang permasalahan yang dihadapi sangatlah krusial maka akan diadakan pertemuan untuk mencari solusi.</p>	<p>B10</p>
<p>11. Apakah Dinas Pendidikan Kotamadya mendistribusikan pedoman penyusunan KTSP maupun Peraturan Perundangan terkait dengan KTSP ini ke sekolah-sekolah?</p>	<p>Iya, tapi karena jumlah masih sangat terbatas jadi kami hanya menyebarkannya satu-satu. Dan jika ada yang belum mendapatkannya, biasanya mereka inisiatif sendiri untuk mengunduhnya di internet.</p>	<p>B11</p>
<p>12. Dukungan apa saja yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kotamadya kepada sekolah-sekolah terkait dengan pelaksanaan KTSP ini?</p>	<p>Dinas Pendidikan Kotamadya memberikan dukungan berupa dana BOP dari APBD. Kemudian memberikan pembinaan dan pelatihan pelatihan KTSP untuk Kepala Sekolah dan guru tentu saja melalui pengawas. Kami juga dalam pembinaan KTSP tersebut mendatangkan nara sumber dari instansi lain yang menguasai KTSP seperti dari LPMP.</p>	<p>B12</p>
<p>13. Bagaimanakah dukungan sumber daya yang berupa guru, dana, kewenangan, informasi dan sarana prasarana dalam rangka mendukung implementasi</p>	<p>Dukungan dana hanya berasal dari APBD saja yaitu dana BOP. Saya rasa kalau dikatakan cukup tidak ada cukup-cukupnya. Y di cukup-cukupin. Tapi sejauh ini dengan dana yang ada , DKI jakarta lebih</p>	<p>B13</p>

<p>KTSP ini?</p>	<p>beruntung dibandingkan provinsi lainnya.</p> <p>Sedangkan untuk sumber daya manusia dalam hal ini kemampuan gurunya memang masing-masing sekolah memiliki SDM yang berbeda-beda apalagi masih banyak sekolah yang guru-gurunya berlatar belangan dari SPG, Tetapi kami memang terus berupaya untuk meningkatkan sumber dayanya melalui pelatihan-pelatihan dan peningkatan pendidikan guru dari SPG menjadi D2, D2 menjadi S1.</p> <p>Terkait dengan sarana dan prasarana, saya rasa sama dengan SDM berbeda-beda dari tiap sekolah-sekolah. Masih banyak sekolah-sekolah yang sarana dan prasarananya kurang lengkap atau bahkan tidak memadai. Tapi kami secara perlahan-lahan tetap membantu sekolah-sekolah tersebut untuk memberikan sarana-prasarana melalui <i>grant</i> dengan melihat skala prioritas.</p> <p>Terkait dengan dukungan informasi tentang KTSP, saya rasa sudah cukup terpenuhi. Kami akan siap untuk selalu memberikan informasi yang dibutuhkan, jika ada informasi baru terkait KTSP ini pasti akan selalu kami teruskan ke para pengawas untuk disampaikan langsung ke sekolah-sekolah. Bahkan jika mereka membutuhkan informasi langsung dari dinas kotamadya, kami akan selalu siap untuk datang langsung dan memberikan informasi tersebut ke sekolah.</p> <p>Terkait dengan dukungan kewenangan, kami memberikan kewenangan sepenuhnya kepada sekolah dikarenakan KTSP ini disusun memang berdasarkan kondisi</p>	
------------------	---	--

	masing-masing sekolah.	
14. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan sumber-sumber daya tersebut dalam rangka mendukung implementasi KTSP ini?	Menurut saya faktor yang paling mempengaruhi adalah komitmen kepala sekolah itu sendiri, kemudian pengawas, serta kerjasama dan kordinasi yang baik antar <i>stakeholders</i> pendidikan serta harus memiliki semangat yang sama.	B14
15. Sejauh ini bagaimanakah sikap atau tanggapan para kepala sekolah maupun guru sebagai para pelaksana kebijakan KTSP ini dalam melaksanakan kebijakan?	Karena para kepala sekolah ini diberi wewenang sepenuhnya di dalam penyelenggaraan pendidikan, mereka tentu menyambutnya dengan sangat baik ini. Namun tetap saja masih ada sekolah yang merasa KTSP merupakan suatu yang membebankan/memberatkan buat mereka karena mereka terbiasa diarahkan, terbiasa dengan tinggal mengikuti apa yang harus dibuat/diperintahkan. Sekelompok sekolah yang seperti itu ada. Tapi secara umum KTSP ini merupakan otonomi sekolah.	B15
16. Apakah dengan adanya pelaksanaan KTSP ini memudahkan para kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari?	Iya, tentu saja KTSP inikan merupakan otonomi sekolah jadi mereka tidak harus menunggu perintah dari atasan, hanya menunggu kalender pendidikan saja, mereka langsung menyusun kurikulum mereka. Tapi kembali lagi seperti yang katakan diatas bagi sekolah yang tadi sudah disebutkan diatas yaitu sekolah yang pasif, itu merupakan suatu beban berat yang makin menambah pekerjaan mereka.	B16
17. Bagaimana komitmen atau kesepakatan para pelaksana kebijakan terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan KTSP?	Seperti saya katakan tadi bagi mereka yang sangat menyambut dengan baik dan memahami bahwa KTSP ini otonomi sekolah, mereka akan berkomitmen dan sepakat untuk mencapai tujuan KTSP ini. Tapi bagi sekolah yang merasa terbebankan ya	B17

	<p>mereka membuat seadanya, atau bahkan bisanya hanya mengadopsi saja dari sekolah lain. Apalagi kepala sekolah yang akan menjelang pensiunan.</p>	
<p>18. Bagaimanakah struktur birokrasi yang ada sekarang ini dalam pelaksanaan KTSP (sudahkah cukup efisien)?</p>	<p>Saya rasa sudah cukup efisien asalkan jika di masing-masing personal di birokrasi menjalankan tupoksinya yang sesuai sudah barang tentu keterlaksanaan KTSPnya akan menjadi lebih berjalan dengan lancar.</p>	<p>B18</p>
<p>19. Apakah struktur birokrasi yang ada pada saat ini membuat komunikasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota dengan sekolah berjalan dengan lancar?</p>	<p>Ya tentu saja, masing-masing dari kami cukup memahami dan melakukan kordinasi yang baik ya dengan pembentukan tim pengembangan kurikulum itu, kami saling berkomunikasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memang memberikan dukungan terhadap pembelajaran di sekolah. Tentu saja harus berdasarkan wewenang dan tugas masing-masing.</p>	<p>B19</p>
<p>20. Bagaimana pembagian fungsi, tugas dan wewenang diantara pihak/ instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan KTSP ini?</p>	<p>Saya rasa untuk pembagian tupoksi dan wewenang diantara kami (provinsi, kotamadya, kecamatan) sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tentu saja kami tidak akan memasuki wewenang sekolah yang diberikan wewenang sepenuhnya dalam hal pelaksanaan KTSP. Kami hanya bertugas memfasilitasi saja, tidak ikut campur dalam hal pelaksanaan KTSPnya disekolah</p>	<p>B20</p>
<p>21. Apakah ada SOP dalam implementasi KTSP?</p>	<p>Ya SOPnya di buat oleh masing-masing kepala sekolah sesuai dengan</p>	<p>B21</p>

<p>22. Bagaimana prosedur birokrasi dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan KTSP?</p>	<p>karakteristik dan potensi sekolah yang tentu saja acuan utamanya adalah Permendiknas 22 tahun 2006 dan pedoman dari BSNP.</p> <p>Kami dari dinas pendidikan kotamadya sebaga supervisor saja, yang mengawasi pelaksanaan KTSP di sekolah ini. Sedang dinas pendidikan kecamatan sebagai operatornya.</p>	<p>B22</p>
--	---	------------



Wawancara dengan Kepala Sekolah SDSN Kalibaru 01 Jakarta Utara

Informan : Ibu Risnamurti (R)

Hari/Tanggal : Senin/07 Desember 2009

Waktu : 13.00-14.00 WIB

Lokasi : Kantor SDSN Kalibaru 01 Jakarta Utara

TRANSKIP DATA DAN KODING

Pewawancara (L)	Informan (S)	Kode
1. Apakah sekolah anda siap dalam melaksanakan KTSP?	Sangat siap	R1
2. Bagaimana pelaksanaan KTSP di sekolah anda sejauh ini?	Sejauh ini dilaksanakan dengan baik	R2
3. Apakah sebelumnya ada sosialisasi dari pihak pemerintah dalam memberikan pembinaan kepada anda tentang bagaimana cara mengembangkan kurikulum tersebut?	Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah di SD ini belum ada secara khusus.	R3
4. Alat komunikasi apakah yang digunakan Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kotamadya dalam rangka menginformasikan KTSP?	Melalui surat menyurat, faks, HP untuk mengundang seminar, workshop, maupun pelatihan	R4
5. Apakah sejauh ini cukup efektif alat komunikasi tersebut dalam menginformasikan KTSP?	Sebenarnya tidak terlalu efektif. Tetapi karena terlalu mendesak dan beritanya sering mendadak	R5
6. Sejauhmanakah keterlibatan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kotamadya dalam pelaksanaan KTSP ini?	Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Kotamadya sangat <i>concern</i> terhadap pelaksanaan KTSP, seperti dalam hal assistensi pembinaan kepada sekolah	R6

<p>7. Apakah ada keterlibatan Dinas Pendidikan Kecamatan dalam pelaksanaan KTSP?(jika ya dalam hal apa keterlibatan tersebut)</p>	<p>Sangat ada keterlibatannya melalui Korwas (Kordinator pengawas) yang secara langsung terjun ke lapangan memberikan pembinaan maupun pengawasan terhadap keterlaksanaan KTSP di sekolah</p>	<p>R7</p>
<p>8. Bagaimanakah dukungan sarana prasana di sekolah anda dalam pelaksanaan KTSP ini sudah cukup memadai?</p>	<p>Untuk di sekolah kami cukup memadai ketersediaan sarana prasarana seperti adanya perpustakaan yang cukup lengkap, lab bahasa maupun IPA dengan peralatan yang cukup lengkap</p>	<p>R8</p>
<p>9. Apakah potensi sekolah yang ada telah mendukung pelaksanaan kurikulum tersebut?</p>	<p>Sangat mendukung sekali</p>	<p>R9</p>
<p>10. Bagaimanakah penerimaan/sikap para guru terhadap kebijakan pelaksanaan KTSP tersebut?</p>	<p>Cukup senang dan antusias</p>	<p>R10</p>
<p>11. Bagaimanakah dukungan pembiayaan terhadap pelaksanaan KTSP di sekolah ini sudah cukup memadai?</p>	<p>Jika dikatakan cukup, ga ada yang cukup. Ya dengan dana yang ada ya dicukup-cukupin. Sejauh ini dukungan dana yang ada yaitu dana BOS dan BOP dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>R11</p>
<p>12. Bagaimanakah struktur birokrasi yang ada sekarang ini dalam pelaksanaan KTSP (sudahkah cukup efisien)?</p>	<p>Menurut saya untuk struktur birokrasi sebaiknya lebih baik sistem sentralisasi lagi yaitu dari pusat langsung ke sekolah-sekolah. Karena selama ini segala informasi yang didapat kadang-kadang sering terlambat, ada miss komunikasi sebaiknya langsung dari pusat ke sekolah</p>	<p>R12</p>

13. Bagaimanakah pemahaman para guru terhadap kebijakan KTSP ini?	Sejauh ini mereka cukup paham	R13
14. Bagaimanakah pengaruh pelaksanaan KTSP ini terhadap prestasi peserta didik?	Sebenarnya ada ya pengaruhnya apalagi antusias siswa ada dalam kegiatan belajar, tapi memang kalau dilihat dari nilai sepertinya tidak terlalu terlihat peningkatannya.	R14
15. Apakah sekarang ada perubahan yang cukup signifikan dari hasil prestasi belajar mereka setelah diberlakukannya KTSP tersebut?	Kalau dilihat dari antusias siswa sih harusnya ada perubahan menjadi lebih meningkat tapi jika dilihat dari nilai perubahannya sedikit ya tidak terlalu signifikan. Kan prestasi siswa itu dipengaruhi bukan hanya karena ya tidaknya implementasi KTSP, tetapi ada ada faktor lain seperti tingkat kecerdasan siswa itu sendiri.	R15
16. Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh sekolah dalam melaksanakan KTSP?	Masih kurangnya dukungan dana	R16
17. Upaya-upaya apa yang anda lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?	Sejauh ini yang hanya bisa kami lakukan memaksimalkan uang yang ada saja	R17
18. Apa manfaat yang didapat oleh sekolah dalam melaksanakan KTSP?	Bisa melaksanakan pembelajaran yang efektif, MBS dapat diterapkan	R18
19. Apakah struktur birokrasi yang ada pada saat ini membuat komunikasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota dengan sekolah berjalan dengan lancar?	Lancar	R19

20. Menurut anda apakah para guru telah mampu mengaplikasikan RPP ke dalam KBM?	Mampu	R20
21. Bagaimana KBM berjalan sejak dijalankannya KTSP?	Seluruh guru sudah dapat melaksanakan pembelajaran yang PAKEM (Pembelajaran Aktif Kreatif dan Menyenangkan)	R21
22. Sejauh mana peranan anda sebagai kepala sekolah dalam pelaksanaan KTSP?	Saya cukup berperan, seperti saya juga ikut menyusun KTSP juga, sebagai pendorong untuk memotivasi para guru dalam melaksanakan KTSP ini	R22
23. Faktor apa saja yang diperhatikan dalam pengembangan KTSP dan silabusnya?	Indikator dan tujuan pembelajaran ada garis merahnya antar indikator	R23
24. Metode pembelajaran apa saja yang digunakan guru dalam KBM di kelas?	Diskusi, kerja kelompok, klasikal pun masih dilakukan oleh para guru, penggunaan LCD	R24
25. Bagaimana anda meningkatkan potensi yang ada di sekolah demi mendukung implementasi KTSP?	Ya dengan memanggil orang luar sebagai nara sumber seperti dari Pengembang Kurikulum, Pusat Kurikulum maupun LPMP	R25
26. Bagaimanakah peran serta orang tua, komite sekolah, dewan sekolah dan masyarakat dalam melaksanakan KTSP?	Sangat mendukung sepenuhnya seperti halnya dalam mempersiapkan dana	R26
27. Upaya apa yang anda lakukan untuk meningkatkan kreativitas	Salah satunya dengan mendatangkan nara sumber dari luar untuk membina para guru, dan mengizinkan para guru	R27

<p>guru demi mendukung dalam mengimplementasikan KTSP?</p>	<p>apabila ada undangan workshop maupun pelatihan untuk mereka</p>	
<p>28. Bagaimana hasil evaluasi yang didapat dari sekolah dalam pelaksanaan KTSP?</p>	<p>Hasil evaluasi cukup baik, kami dapat melengkapi dokumen-dokumen KTSP dan keterlaksanaanyapun sejauh ini cukup baik dan lancar-lancar saja</p>	<p>R28</p>
<p>29. Bagaimana antusias siswa dalam kegiatan KBM dalam diterapkannya KTSP?</p>	<p>Sangat antusias dan senang mengingat KTSP ini benar-benar memperhatikan potensi anak dan para gurunya yang mengajar lebih variatif dan kreatif dalam mengajar mereka</p>	<p>R29</p>

Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Semper timur 05 Jakarta Utara

Informan : Bapak Nurrohman (N)

Hari/Tanggal : Selasa/08 Desember 2009

Waktu : 12.00-13.00 WIB

Lokasi : Kantor SDN Semper timur 05

TRANSKIP DATA DAN KODING

Pewawancara (L)	Informan (S)	Kode
1. Apakah sekolah anda siap dalam melaksanakan KTSP?	Ya kita melaksanakan, karena sudah menjadi tuntutan dari pemerintah meskipun dengan keadaan sekolah yang terbatas.	N1
2. Bagaimana pelaksanaan KTSP di sekolah anda sejauh ini?	Sejauh ini ya dilaksanakan sesuai kurikulumnya meskipun belum 100%	N2
3. Apakah sebelumnya ada sosialisasi dari pihak pemerintah dalam memberikan pembinaan kepada anda tentang bagaimana cara mengembangkan kurikulum tersebut?	Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah di SD ini belum ada yang memberikan sosialisasi secara khusus dan langsung baik untuk kepala sekolah maupun guru. Bahkan dari Dinas Kotamadya belum juga. Tapi saya tidak tahu saat kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya. Yang pasti pada saat ini belum ada. Baru hanya suku dinas saja yaitu melalui pengawas saja informasinya.	N3
4. Lalu alat komunikasi apakah yang digunakan oleh Dinas kecamatan dalam rangka menginformasikan KTSP?	Melalui sosialisasi maupun pelatihan tapi itupun masih sangat kurang bagi sekolah kami, dan secara tidak langsung juga melalui surat dan faks	N4
5. Apakah sejauh ini cukup efektif alat komunikasi tersebut dalam menginformasikan KTSP?	Karena kami merasa sosialisasinya masih kurang tentu saja belum efektif.	N5
6. Sejauhmanakah keterlibatan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kotamadya dalam pelaksanaan KTSP ini?	Tentu saja keterlibatannya masih sangat kurang sekali. Dinas provinsi belum pernah terjun langsung ke sekolah dalam memberikan sosialisasi maupun pelatihan. Dinas kota hanya memsupervisi KTSP kami.	N6

<p>7. Apakah ada keterlibatan Dinas Pendidikan Kecamatan dalam pelaksanaan KTSP?(jika ya dalam hal apa keterlibatan tersebut)</p>	<p>Justru memang keterlibatannya lebih banyak dari suku dinas Kecamatan itu melalui pengawas. Ya keterlibatannya hanya melalui sosialisasi saja, untuk pelatihan baru satu kali.</p>	<p>N7</p>
<p>8. Bagaimanakah dukungan sarana prasarana di sekolah anda dalam pelaksanaan KTSP ini sudah cukup memadai?</p>	<p>Untuk di sekolah kami masih sangat kurang lha, sekarang aja perpustakaannya ga ada. Lab bahasa dan IPA belum ada sama sekali, bahkan lab komputerpun belum ada.</p>	<p>N8</p>
<p>9. Apakah potensi sekolah yang ada telah mendukung pelaksanaan kurikulum tersebut?</p>	<p>Sejauh ini belum mendukung sepenuhnya. Yang ada hanya alat peraga, kit IPA itupun sudah tidak laik pakailagi.</p>	<p>N9</p>
<p>10. Bagaimanakah penerimaan/sikap para guru terhadap kebijakan pelaksanaan KTSP tersebut?</p>	<p>Sebenarnya kalau mereka nerima-nerima aja dan melaksanakannya, kan sudah merupakan kewajibannya. Hanya saja ya itu tadi mereka masih sangat kurang pengetahuan maupun pemahamannya tentang KTSP jadi masih sangat memerlukan sosialisasi dan pelatihan.</p>	<p>N10</p>
<p>11. Bagaimanakah dukungan pembiayaan terhadap pelaksanaan KTSP di sekolah ini sudah cukup memadai?</p>	<p>Jika dikatakan cukup, ga ada yang cukup. Ya dengan dana yang ada ya dicukup-cukupin. Sejauh ini dukungan dana yang ada yaitu dana BOS dan BOP dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>N11</p>
<p>12. Bagaimanakah struktur birokrasi yang ada sekarang ini dalam pelaksanaan KTSP (sudahkah cukup efisien)?</p>	<p>Menurut saya cukup, karena yang langsung berhubungan dengan sekolah adalah birokrasi yang terendah yang paling dekat dengan sekolah yaitu suku dinas pendidikan kecamatan.</p>	<p>N12</p>

<p>13. Bagaimanakah pemahaman para guru terhadap kebijakan KTSP ini?</p>	<p>Sejauh ini mereka hanya merabab-rabab, karena seperti dikatakan tadi keterlibatan langsung dari dinas provinsi dan kotamadya masih kurang, mungkin karena tidak bisa semuanya tersentuh. Paling banter pertemuan-pertemuan di gugus saja.</p>	<p>N13</p>
<p>14. Bagaimanakah pengaruh pelaksanaan KTSP ini terhadap prestasi peserta didik?</p>	<p>Ada sih pengaruhnya tapi sedikit, karenakan sekarang ini juga ada kemajuan teknologi seperti internet yang sangat mempengaruhi prestasi peserta didik.</p>	<p>N14</p>
<p>15. Apakah sekarang ada perubahan yang cukup signifikan dari hasil prestasi belajar mereka setelah diberlakukannya KTSP tersebut?</p>	<p>Ada sih perubahannya tapi tidak signifikan. Karenakan faktor hasil prestasi belajar anak tidak hanya diberlakukannya KTSP, tapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi.</p>	<p>N15</p>
<p>16. Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh sekolah dalam melaksanakan KTSP?</p>	<p>Masih kurangnya dukungan dana, sarana dan prasarana sekolah dan pemahaman guru yang masih kurang.</p>	<p>N16</p>
<p>17. Upaya-upaya apa yang anda lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?</p>	<p>Sejauh ini yang hanya bisa kami lakukan memkasimalkan uang yang ada saja. Begitupun sarana dan prasarana dimaksimalkan yang ada saja. Untuk pemahaman guru paling kami hanya bisa mengadakan pertemuan antar gugus saja dan saling sharing dengan guru lain yang lebih memahami KTSP yang tentu saja dibantu oleh pengawas.</p>	<p>N17</p>
<p>18. Apa manfaat yang didapat oleh sekolah dalam melaksanakan KTSP?</p>	<p>Dengan KTSPkan pengembangan bakat anak itu sangat diperhatikan.</p>	<p>N18</p>

<p>19. Apakah struktur birokrasi yang ada pada saat ini membuat komunikasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota dengan sekolah berjalan dengan lancar?</p>	<p>Lancar-lancar saja meskipun tidak secara langsung. Karena informasi apapun yang didapat baik dari dinas provinsi maupun kotamadya, kita bisa mengetahuinya melalui pengawas.</p>	<p>N19</p>
<p>20. Menurut anda apakah para guru telah mampu mengaplikasikan RPP ke dalam KBM?</p>	<p>Bisa</p>	<p>N20</p>
<p>21. Bagaimana KBM berjalan sejak dijalankannya KTSP?</p>	<p>Saya kira bagus, mereka bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi meskipun tidak semua pelajaran ya, tapi ada saja.</p>	<p>N21</p>
<p>22. Sejauh mana peranan anda sebagai kepala sekolah dalam pelaksanaan KTSP?</p>	<p>Saya juga terjun langsung dalam pengembangan dan penyusunan KTSP</p>	<p>N22</p>
<p>23. Faktor apa saja yang diperhatikan dalam pengembangan KTSP dan silabusnya?</p>	<p>Pemahaman guru, dan yang benar-benar perlu diperhatikan adalah penerimaan guru yang benar-benar untuk mengembangkan KTSP dan silabus.</p>	<p>N23</p>
<p>24. Metode pembelajaran apa saja yang digunakan guru dalam KBM di kelas?</p>	<p>Yang pasti metode ceramah itu tetap ada, diskusi kelompok juga sudah mereka gunakan.</p>	<p>N24</p>
<p>25. Bagaimana anda meningkatkan potensi yang ada di sekolah demi mendukung implementasi KTSP?</p>	<p>Kami mencoba untuk mengadakan pembinaan dari luar untuk meningkatkan kemampuan guru dalam implementasi KTSP, kami juga telah mempergunakan waktu sebaik-baiknya dengan menerapkan kedisiplinan terhadap waktu baik guru maupun siswa. Kami juga memberikan pembinaan khusus di luar jam sekolah untuk anak kelas 6 dalam pemantapan belajar.</p>	<p>N25</p>

<p>26. Bagaimanakah peran serta orang tua, komite sekolah, dewan sekolah dan masyarakat dalam melaksanakan KTSP?</p>	<p>Ya mereka sih mendukung saja, tapi tidak dalam bentuk dana ya, karena mereka tahu bahwa sekolah sudah gratis.</p>	<p>N26</p>
<p>27. Upaya apa yang anda lakukan untuk meningkatkan kreativitas guru demi mendukung dalam mengimplementasikan KTSP?</p>	<p>Ya paling yang saya bisa lakukan hanya memberikan kesempatan para guru saya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan KTSP yang diadakan oleh instansi lain.</p>	<p>N27</p>
<p>28. Bagaimana hasil evaluasi yang didapat dari sekolah dalam pelaksanaan KTSP?</p>	<p>Hasil evaluasi cukup baik, meskipun tidak sempurna ya. Masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pelaksanaan KTSP.</p>	<p>N28</p>
<p>29. Bagaimana antusias siswa dalam kegiatan KBM dalam diterapkannya KTSP?</p>	<p>Mereka sepertinya cukup antusias ya karena sebagian kan guru mengajarnya dengan metode pembelajaran yang bervariasi meskipun lebih banyaknya dengan ceramah. Tapi</p>	<p>N29</p>

Wawancara dengan Guru Kelas VI SDN Semper Timur 05 Pagi

Informan : Bapak Suharsono (SU)

Hari/Tanggal : Februari 2010

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Guru SDN Semper Timur 05 Pagi

TRANSKIP DATA DAN KODING

Pewawancara (L)	Informan (S)	Kode
1. Menurut anda apakah sekolah anda sudah siap dalam menerapkan KTSP?	Kalau dilihat dari kondisi sekolah yang sarana dan prasarananya kurang memadai ya saya rasa belum siap.	SU1
2. Menurut anda apa yang dimaksud dengan KTSP?	Batasan-batasan untuk mengajar dan memerlukan kreatifitas guru untuk mengajar, KTSP dalam satu semester per mata pelajaran terdiri dari kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa.	SU2
3. Apakah ada sosialisasi KTSP sebelumnya?	Katanya sih ada, tapi untuk saya pribadi belum pernah mengikuti. Hanya beberapa guru saja yang pernah mengikuti sosialisasi tersebut. Paling saya hanya mencari-cari sendiri dan bertanya kepada teman-teman yang pernah mengikuti sosialisasi sebelumnya.	SU3
4. Apakah ada pelatihan-pelatihan KTSP?	Ada juga, tapi saya sendiri belum pernah ikut jadi hanya meraba-raba saja. Kalau ada yang tidak saya mengerti saya bertanya ke teman guru lain yang pernah mengikuti pelatihan.	SU4
5. Bagaimana pandangan anda tentang KTSP?	Kalau di kelas 6 ini sangat berat tanggungjawabnya untuk mencapai hasil anak ini. Tapi karena memang sudah tuntutan ya harus dikerjakan sedikit demi sedikit.	SU5
6. Apakah anda memiliki dokumen-dokumen ktsp yang lengkap?	Ada dari sekolah seperti silabus, kalau RPP kita cari sendiri dari penerbit. Sekolah mendapat silabus itupun dari penerbit juga.	SU6

7. Komponen-komponen apa saja yang ada di dokumen KTSP?	Indikator, kompetensi dasar, materi, evaluasi, sumber belajar	SU7
8. Apakah anda pernah mengikuti pengembangan KTSP?	Belum pernah, setahu saya ya usaha saja sendiri bersama guru-guru lainnya.	SU8
9. Apakah kegiatan pembelajaran di kelas anda sudah sesuai dengan KTSP?	Ya manusia kan ga luput dari kekurangan, menurut saya masih jauh dari sempurna, kita hanya bisa mencari-cari melalui penerbit mana yang buku pelajarannya sudah sesuai atau yang mendekati dengan KTSP.	SU9
10. Bagaimanakah peranan anda di kelas dalam KBM?	Ya saya sebagai guru kelas yang membidangi 6 bidang studi.	SU10
11. Apakah sarana prasarana yang ada di sekolah anda sudah cukup lengkap?	Belum lengkap, perpustakaan tidak ada, media pembelajaran aja tidak ada.	SU11
12. Media pembelajaran apa yang pernah anda pakai dalam KBM di kelas?	Paling buku-buku pelajaran aja, LKS.	SU12
13. Metode pembelajaran yang anda pakai dalam KBM dikelas?	Ya banyakan ceramah, tapi saya pernah juga menggunakan metode demonstrasi, diskusi tapi tidak maksimal karena minimnya alat peraga	SU13
14. Alat evaluasi apa yang anda gunakan dalam menentukan tingkat keberhasilan anak?	Ya dengan tes formatif, sumatif, ulangan harian, progress report.	SU14
15. Apakah bentuk penilaian tersebut menurut anda sudah mewakili kemajuan siswa pada aspek kognitif, psikomotrik dan afektif?	Kalau menurut saya tes-tes yang pernah saya lakukan masih belum mewakili aspek-aspek yang dimaksud tadi. Paling hanya aspek kognitif saja yang sudah terpenuhi	SU15

	mengingat KBMnya saja saya hanya menggunakan metode ceramah saja, ditambah lagi jarang menggunakan alat peraga.	
16. Setelah diberlakukan KTSP, bagaimana hasil prestasi anak?	Nilai-lumayan mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Tetapi tetap saja hasil prestasi anak bergantung dari tingkat kecerdasan masing-masing anak dalam menerima pelajaran. Ada anak yang cepat menangkap ada juga anak sulit menerima pelajaran. Tetapi sejauh ini sih nilai anak ada peningkatan sedikit	SU 16
17. Bagaimana antusias siswa setelah diterapkannya KTSP?	Ya antusiasnya sudah mulai ada, sedikit demi sedikit karena meskipun metode yang lebih banyak saya gunakan adalah ceramah tapi pernah saya menggunakan metode yang lain dari biasanya yang tentu saja dengan menggunakan alat peraga seadanya mereka terlihat antusias dan mau belajar. Dukungan orang tuapun ada dengan menyemangati anak untuk belajar lebih giat, hal tersebut dilihat dengan banyaknya anak yang mengikuti pelajaran tambahan di luar jam pelajaran sekolah.	SU17
18. Kesulitan apa yang anda hadapi?	Alat peraga yang sangat minim, prasarana yang tidak memadai. Jangankan laboratorium, perpustakaan saja tidak ada.	SU18
19. Upaya apa saja yang anda lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut?	Ya saya mengajar dengan menggunakan bahan yang ada saja disekitar sekolah.	SU19
20. Menurut anda KTSP ini sudah merupakan kurikulum yang baik?	Iya itupun untuk sekolah yang sarana dan prasarananya sudah memadai dan guru-guru yang sudah memahami benar tentang KTSP. Karena dengan KTSP ini kan sekolah	SU20

	diberi otonomi sepenuhnya untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sekolah sesuai dengan potensi sekolah. Dan juga KTSP ini menuntut guru untuk lebih kreatif dalam mengajar dan juga perlu didukung sarana dan prasarana sekolah yang memadai.	
21. Apakah disekolah anda ada pelajaran/kegiatan pengembangan diri?	Ada, pencak silat, pramuka dan menari	SU21
22. Apakah disekolah anda ada pelajaran/kegiatan kecakapan hidup?	Tidak ada	SU22
23. Apakah disekolah anda ada pelajaran/kegiatan keunggulan lokal dan global?	Ada, seperti Kesenian Jakarta, Bahasa Inggris	SU23
24. Apakah ada saran agar KTSP ini menjadi lebih baik lagi?	Saya mengharapkan agar pelatihan tentang KTSP ini untuk guru-guru lebih digalakan lagi karena masih banyak guru yang belum pernah mengikuti pelatihan. Meskipun sudah ada tapi masih belum merata terutama di wilayah Jakarta Utara ini dan untuk sekolah kami khususnya diharapkan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan bantuan dalam melengkapi ataupun memperbaiki sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang keberhasilan penerapan KTSP ini.	SU24

Wawancara dengan Guru Kelas VI SDN Kalibaru 01

Informan : Bapak Buchari (BU)

Hari/Tanggal : Februari 2010

Waktu : 14.00 WIB

Tempat : Ruang Guru SDN Kalibaru 01

TRANSKIP DATA DAN KODING

Pewawancara (L)	Informan (S)	Kode
1. Menurut anda apakah sekolah anda sudah siap dalam menerapkan KTSP?	Saya rasa sekolah kami cukup siap dalam menerapkan KTSP ini apalagi sarana dan prasarana di sekolah kami sudah cukup memadai.	BU1
2. Menurut anda apa yang dimaksud dengan KTSP?	Panduan untuk pembelajaran di kelas	BU2
3. Apakah ada sosialisasi KTSP sebelumnya?	Pernah sih waktu itu yang mengadakan LPMP	BU3
4. Apakah ada pelatihan-pelatihan KTSP?	Ada juga, tapi baru sekali itupun pengawas dan sekolah yang mengadakan.	BU4
5. Bagaimana pandangan anda tentang KTSP?	Menurut saya sih dengan adanya KTSP ini memotivasi guru untuk lebih kreatif dalam pengajaran, sehingga anak-anak dapat lebih bersemangat dalam belajar.	BU5
6. Apakah anda memiliki dokumen-dokumen kTSP yang lengkap?	Ada, Kumpulan soal-soal, penilaian, pembelajaran mingguan, silabus, RPP yang dibuat sendiri setiap hari.	BU6
7. Komponen-komponen apa saja yang ada di dokumen KTSP?	SK-KD, SKL, indikator, KKM, metode pengajaran, batasan-batasan KBM, tujuan-tujuan pembelajaran, kalender pendidikan, silabus, RPP, Indikator, kompetensi dasar, materi,	BU7

	evaluasi sumber belajar, dan sebagainya	
8. Apakah anda pernah mengikuti pengembangan KTSP?	Ya tentu saja, semua guru dilibatkan dalam mengembangkan KTSP ini.	BU8
9. Apakah kegiatan pembelajaran di kelas anda sudah sesuai dengan KTSP?	Sudah bahkan saya sampai lupa waktu kalau sedang mengajar karena jam pulang suka molor saking keasikannya mengajar, dan saya juga memberikan jam pelajaran tambahan .	BU9
10. Bagaimanakah peranan anda di kelas dalam KBM?	Ya saya sebagai motivator dan fasilitator siswa .	BU10
11. Apakah sarana prasarana yang ada di sekolah anda sudah cukup lengkap?	Sudah sangat cukup. Tapi kalau bisa ditambahkan lagi pengadaan TV per kelas.	BU11
12. Media pembelajaran apa yang pernah anda pakai dalam KBM di kelas?	Laptop, gambar, kliping koran dan majalah, buku-buku pelajaran, internet.	BU12
13. Metode pembelajaran yang anda pakai dalam KBM dikelas?	Saya menggunakan metode yang bervariasi ya seperti diskusi, demonstrasi, wawancara, ceramah, unjuk kerja disesuaikan dengan SK-KD.	BU13
14. Alat evaluasi apa yang anda gunakan dalam menentukan tingkat keberhasilan anak?	Ya dengan tes tertulis, lisan, portofolio, formatif, sumatif, ulangan harian, progress report.	BU14
15. Apakah bentuk penilaian tersebut menurut anda sudah mewakili kemajuan siswa pada aspek kognitif, psikomotrik dan afektif?	Saya rasa sudah, bahkan sudah ke aspek sintesa (analisis)	BU15